

**BERHAJI PADA MASA REVOLUSI: IBADAH HAJI  
DENGAN MISI TERSEMBUNYI JAMA'AH HAJI  
INDONESIA TAHUN 1945-1950**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Bahasa  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam



Oleh:

**Taufik Ismail**

**NIM. 163231043**

**JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN BAHASA  
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdra. Taufik Ismail  
NIM : 163231043

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Adab dan Bahasa  
IAIN Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa sdr:

Nama : Taufik Ismail

NIM : 16331043

Judul : **BERHAJI PADA MASA REVOLUSI: IBADAH DENGAN MISI**

**TERSEMBUNYI JAMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1945-1950**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah skripsi guna memperoleh Sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 5 Nopember 2020

Pembimbing,



Latif Kusairi, M.A.

NIP: 19841025201801 1 001

## PENGESAHAN

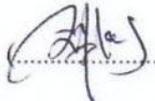
Skripsi ini dengan judul **BERHAJI PADA MASA REVOLUSI: IBADAH HAJI DENGAN MISI TERSEMBUNYI JAMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1945-1950** yang disusun oleh Taufik Ismail telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

Penguji 1 Merangkap  
Ketua Sidang : Martina Safitry, M.A.  
NIP. 19860308 201801 2 001



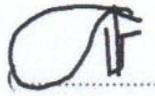
(.....)

Penguji 2 Merangkap  
Sekretaris Sidang : Latif Kusairi, M.A.  
NIP. 19841025 201801 1 001



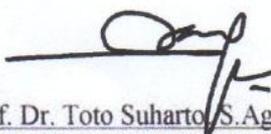
(.....)

Penguji Utama : Dr. H. Muh. Fajar Shodiq, S.Ag.  
NIP. 19701231 200501 1 013



(.....)

Surakarta, 17 Desember 2020  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Adab dan Bahasa



Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 19710403 199803 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak saya yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakanku dengan penuh cinta dan kasih sayang
2. Kedua kakak saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil
3. Semua orang yang telah berjasa dalam hidup saya

## **MOTTO**

*“Senajan Dalam Raa Alus, Sing Penting Wani Terus”*

Lirik Lagu Balungan Kere Ciptaan Hendran Kumbara & Daru

Dipopulerkan Ndar Boy Band

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Ismail  
NIM : 163231045  
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam  
Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 10 Desember 2020  
Yang Menyatakan,

Taufik Ismail  
NIM: 163231043

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang *Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peradaban Islam pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta.
3. Dr. H. Moh. Mahbub, S.Ag, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam IAIN Surakarta.
4. Yayan Andrian, S.Ag., M.ED.MGMT. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu selama proses belajar di bangku perkuliahan.
5. Latif Kusairi, M.A. selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penelitian ini serta banyak memberikan saran dan arahan dalam penelitian ini.
6. Para dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta yang telah memberikan ilmu pada penulis selama proses belajar di bangku perkuliahan.
7. Para Staf Tata Usaha dan Akademik yang telah memberikan bantuan untuk keperluan administrasi selama perkuliahan serta menyelesaikan penelitian ini.

8. Para Staf di Monumen Pers yang telah membantu menyediakan sumber data penelitian.
9. Orang tua, saudara serta teman yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, kasih sayang dan ketulusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Sejarah Peradaban Islam.
11. Sahabat Rafi, Heman, Fany Halifatun, Rika, Refa dan Bagus yang senantiasa menemani, memberikan motivasi, dukungan dan do'a dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam penulisan karya ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Teriring do'a yang penulis panjatkan kepada Allah SWT, semoga segala amal kebaikan beliu semua mendapat pahala dari Allah SWT, aamiin. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 14 Desember 2020  
Penulis,

Taufik Ismail

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan & Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Kerangka Konsep .....	12
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17

### **BAB II. IBADAH HAJI SEBELUM KEMERDEKAAN**

#### **REPUBLIK INDONESIA**

A. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji.....	19
1. Haji dalam Narasi Keagamaan .....	19
2. Perkembangan Umat Islam di Nusantara.....	21
B. Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa kolonial .....	24
1. Masa Pendudukan Belanda .....	26
2. Masa Pendudukan Jepang .....	34

### **BAB III. IBADAH HAJI PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK**

#### **INDONESIA**

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekosongan Pemberangkatan Ibadah Haji Indonesia tahun 1945-1947.....	38
1. Fatwa KH. Hasyim Asj'ari tahun 1946.....	38
2. Agresi Militer Belanda tahun 1947 dan 1948 .....	41
3. Proses Penataan Negara .....	54
B. Haji Dijadikan Sebagai Alat Politik Diplomasi Tahun 1948 .....	59
C. Perubahan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.....	63

### **BAB IV. MISI HAJI R.I DAN PERJALANAN IBADAH HAJI**

#### **YANG DIPRAKARSAI SENDIRI OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

A. Perjalanan Misi Haji R.I. tahun 1948.....	67
1. Latar Belakang Pemberangkatan dan Perjalanan Misi Haji R.I tahun 1948 .....	67
2. Hasil Positif dan Respon Pemerintah Belanda Terhadap Pemberangkatan Misi Haji R.I tahun 1948.....	81
B. Perjalanan Ibadah Haji Yang Diprakarsai Oleh Pemerintah Indonesia tahun 1950 .....	82
1. Mengandeng Yayasan PHI dalam Pemberangkatan Ibadah Haji .....	82
2. Tragedi Tertinggalnya 800 Jamaah Haji di Tanjung Priok tahun 1950.....	93

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
---------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>106</b>
----------------------	------------

## ABSTRAK

Taufik Ismail, 2020, *Berhaji Pada Masa Revolusi: Ibadah Haji Dengan Misi Tersembunyi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1945-1950*, Skripsi: Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa, IAIN Surakarta.

Penelitian ini menggambarkan perjalanan ibadah haji pasca kemerdekaan R.I. Pemilihan topik ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menyumbang umat Islam terbesar di dunia dan setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan setiap tahunnya mengalami berbagai hal dan kejadian unik yang patut diteliti dan diungkapkan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah: pelaksanaan ibadah haji pasca kemerdekaan R.I tahun 1945-1950, dimana pada tahun tersebut terdapat kekosongan pemberangkatan jamaah haji Indonesia, lalu diberangkatkannya misi haji R.I yang pertama kalinya, serta berbagai permasalahan yang mengiringi perjalanan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia.

Guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, adapun tahapan-tahapannya ialah: tahapan pengumpulan data atau sumber, dimana data atau sumber yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada sumber tertulis seperti arsip-arsip, koran dan buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tahapan verifikasi atau kritik sumber, tahapan interpretasi atau penafsiran dan tahapan yang terakhir ialah historiografi atau penulisan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1945-1947 terjadi kekosongan pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekosongan tersebut ialah: adanya fatwa dari K.H Hasyim Asj'ari, bangsa Indonesia sedang dihadapkan dengan agresi militer Belanda, serta bangsa Indonesia sedang dalam tahap penataan negara. Kegiatan ibadah haji berlanjut pada tahun 1948, dimana pemerintah Indonesia mengirim sebuah misi haji R.I untuk pertama kalinya ke Arab Saudi. K.H Mohammad Adnan, Saleh Suaidy, Ismail Banda dan H. Sjamsir diutus pemerintah Indonesia, untuk membawa mision bersifat diplomatis dan menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun 1950 ibadah haji diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berhasil memberangkatkan sejumlah 9.933 jamaah haji, selain itu dalam pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia ini terjadi tragedi tertinggalnya 800 jamaah haji di Tanjung Priok.

**Kata kunci : Masa Revolusi R.I, Ibadah haji, Misi haji R.I**

## DAFTAR ISTILAH

Arek-arek	:Orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu daerah, kota, dsb
Commonwealth	:Negara pesemakmuran buatan bangsa Belanda
Dzulhijjah	:Bulan keduabelas dan terakhir dalam penanggalan hijriyah
f.	:Satuan mata uang yang dipergunakan selama masa penjajahan Belanda disebut Gulden, dilambangkan dengan f (florin)
Gencatan senjata	:Penghentian tembak-menembak atau perang yang dilakukan kedua belah pihak
Gerilya	:Cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan perang, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba, perang secara kecil-kecilan dan tidak terbuka
Haji NICA	:Sebutan jamaah haji asal Indonesia yang berhasil di berangkatkan oleh pemerintah Belanda tahun 1946-1949
Haji Singapura	:Ibadah haji yang hanya sampai di Singapura
Ka'bah	:Bangunan suci yang terletak di dalam Masjidilharam diMakkah, berbentuk kubus, dan dijadikan sebagai kiblat sholat dan tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji
Keblinger	:Sesat atau keliru, pembajakan di udara yang terjadi baru-baru ini didorong oleh angan-angan yang keblinger dari seseorang yang mau jadi jagoan
Kongsi Tiga	:Perusahaan pelayaran dalam pengangkutan jamaah haji Indonesia, yang terdiri dari tiga perusahaan De Rotter damsche Lloyd, Stoomvaartmaatscappij Nederland, dan Stoomvaartmaatschappij Oceaen.
Mabrur	:Ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah SWT

Melontar jumroh	:Salah satu kegiatan ibadah haji dengan melempar batu kecil-kecil atau kerikil
Mukim	:Orang luar yang menenpati suatu wilayah tertentu
Padang Arafah	:Daerah terbuka an luas di sebelah timur luar kota Makkah dan dipakai buat wukuf
Pas jalan atau paspor	:Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri
Pemerintahan ad interim	:Mendirikan pemerintahan bersama antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda
Religious monotheistis	:Agama yang mengajarkan bahwa tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu
Sa'i	:Berjalan dan berlari-lari kecil pulang pergi tujuh kali dari Safa ke Marwah pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umroh
Sistem wehrkreise`	:Sistem pertahanan untuk mempertahankan setiap wilayah kepulauan maupun provinsi yang dipimpin oleh seorang komanda. Masing-masing komandan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggelar dan mengembangkan perlawanan
Syekh-syekh	:Agen atau calo yang menyediakan kapal untuk berangkat ibadah haji
Tahalu	:Diperbolehkannya seseorang melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tadinya terlarang selama mengerjakan ibadah haji atau umroh ditandai degan bercukur atau memotong beberapa helai rambut
Tawaf	:Berjalan mengelilingi ka'bah tujuh kali (arahnya berlawanan dengan arah jarum jam atau ka'bah disebelah kiri kita) sambil berdoa
Wukuf di Arafah	:Salah atu upacara dalam menuaniakan ibadah haji dengan berdiam diri atau hadir di Arafah yang waktunya dimulai saat tenggelam nya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada saat terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhujjah

## DAFTAR SINGKATAN

AURI	: Angkatan udara Republik Indonesia
BKMI	: Badan Kongres Muslimin Indonesia
BPDHI	: Badan Penolong Djamaah Hadji Indonesia
Ditjen PHU	: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh
K.H	: Kyai Haji
K.L.M Belanda	: Koninklijke luchtvaart maatschappij Belanda
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNIL	: Koninklijke nederlands indische leger
MPH	: Majelis Pimpinan Haji
NICA	: Netherland Indies Civil Administration
ONH	: Ongkos Naik Haji
p.p	: Pulang pergi
PDRI	: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
PPPHI/PHI	: Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia
R.I	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RKI	: Rombongan Kesehatan Indonesia
RRI	: Radio Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Jamaah Haji yang Diberangkatkan Pemerintah Belandatahun 1946-1949.....	58
Tabel 2.	Jumlah Quotum Jemaah Haji Indonesia tahun 1950.....	87

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Alur Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia Sebelum Kemerdekaan...	25
Bagan 2.	Alur Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Penyebaran Islam di Nusantara.....	22
Gambar 2.2	Suasana di Baitullah pada Musim Haji di Tahun 1900-an.....	34
Gambar 2.3	Suasana Pemulangan Jamaah Haji Nusanta masa Kolonial.....	34
Gambar 3.1	K.H Hasyim Asj'ari.....	38
Gambar 3.2	Kedatangan Pasukan Sekutu di Tanjung Priok.....	42
Gambar 3.3	Para pejuang R.I yang Sedang Melakukan Perlawanan Terhadap Pasukan Belanda.....	46
Gambar 3.4	Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim Bersiap Berangkat Menghadiri Sidang Keamana PBB.....	48
Gambar 3.5	Penandatanganan Perjanjian Renvile.....	49
Gambar 3.6	Jenderal Sudirman Memimpin Langsung Gerilya Walaupun Sedang Sakit.....	52
Gambar 3.7	Mohammad Hatta di Konferensi Meja Bundar.....	64
Gambar 3.8	Sri Sultan Hamengku Buwono IX Menghadiri Penyerahan Kedaulatan.....	65
Gambar 4.1	Tampak Ketua Misi Haji R.I K.H Mohammad Adnan yang duduk ditengah sedang beramah tamah dengan Presiden Soekarno.....	70
Gambar 4.2	Peta perjalanan misi haji R.I yang pertama kali.....	73
Gambar 4.3	Rombongan misi haji di sambut di Bandar Udara Farouk, Kairo, Tampak Ketua Misi Haji R.I Menggenakan Jas Bermantel.....	74
Gambar 4.4	Misi Hadji R.I jang Pertama.....	77
Gambar 4.5	Suasana di Pelabuhan Tanjung Priok Sebelum Keberangkatan Menuju Tanah Suci.....	89

Gambar 4.6	Suasana Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia di TanjungPriok, tampak Menteri Agama Wahid Hayim Melepas Kepergian Jamaah haji Indonesia di Tanjung Priok.....	90
Gambar 4.7	Kecurangan Per-ongkosan Ibadah Hadji.....	92
Gambar 4.8	Jamaah haji Indonesia yang Meninggal dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1950.....	92
Gambar 4.9	800 jamaah haji ketinggalan di Tanjung Priok.....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Maklumat No. 3 Tentang Kapal Haji Kongsi Tiga..... 106
- Lampiran 2. Tarif Perongkosan Perjalanan Hadji 1950/1369..... 107
- Lampiran 3. Lampiran Surat Edaran Kementerian Agama No. III/I/1606 tahun 1950 tentang jumlah quotum haji tahun 1950..... 108
- Lampiran 4. Data Statistik Jumlah Wafat, Ghoib, Kelahiran, Petugas, Biaya, Penyelenggara, Regulasi Biaya Jemaah Haji Indonesia Tahun 1950 Sampai Dengan 2018 Ditjen PHU..... 109
- Lampiran 5. Keputusan BKMI No.1/BKMI/L.S.E/50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Panitia Perbaikan perjalanan Haji Indonesia (PHI)..... 110-111
- Lampiran 6. Jumlah jamaah haji Nusantara tahun 1879-1939..... 112-113

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai etnik dan memiliki jumlah penduduk yang menganut berbagai kepercayaan. Salah satu kepercayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan Allah Swt, melalui nabi Muhammad Saw untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelumnya.<sup>1</sup> Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia diperkirakan pada abad ke-8 dan ke-9 M. Daerah yang pertama kali di masuki agama Islam adalah daerah Sumatra bagian Utara. Penyebar agama Islam dalam memperkenalkan ajarannya mengajarkan rasa toleransi dan persamaan derajat di antara sesama, ajaran ini sangat menarik perhatian penduduk setempat karena agama-agama yang sudah ada sangat menekankan perbedaan derajat manusia.<sup>2</sup>

Ibadah haji merupakan bentuk rukun Islam yang ke lima. Ibadah haji merupakan perjalanan mendatangi Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada bulan Dzulhijjah, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji, disandarkan kepada kaum muslimin yang *mampu*. Kata *mampu* disini mempunyai arti yang cukup luas, yaitu *mampu* secara jasmani maupun secara rohani, selain itu *mampu*

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan Al-Aydrus, *Penyebaran Islam Di Asia Tenggara*, terj Ali Yahya, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), hlm 54

<sup>2</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 194

<sup>3</sup> M Abdurachman Rochimi, Lc., *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*, (PT Gelora Aksara Pratama), hlm 8

disini juga berarti mampu secara finansial yakni bermakna memiliki dana yang cukup untuk menjalankan ibadah haji. Kesuksesan dalam ibadah haji bukan hanya didasarkan pada unsur ritualnya itu sendiri, melainkan melibatkan unsur-unsur diluar aspek ritual, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga pulang membawa predikat haji yang *mabrur*, oleh sebab itu ibadah haji juga disebut sebagai ibadah yang *unique*.<sup>4</sup>

Kegiatan ibadah haji umat Islam Nusantara diperkirakan dimulai sejak abad ke-16 M.<sup>5</sup> Belum diketahui secara pasti, kapan dan siapa yang berangkat pertama kali menunaikan ibadah haji. Shaleh Putuhena (2007:105) memaparkan, bahwasannya mereka yang pertama kali melaksanakan ibadah haji bukanlah jamaah haji, melainkan para pedagang, utusan sultan, dan para musafir penuntut ilmu. Ditengah-tengah kesibukan mereka sebagai para pedagang, utusan sultan, serta musafir penuntut ilmu apabila musim haji datang (bulan Dzulhijjah) mereka menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji.

Awalnya kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam Nusantara berjalan tanpa adanya halangan yang berarti. Semenjak kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten.<sup>6</sup> Belanda sedikit demi sedikit mulai membangun kekuasaannya di Nusantara, setelah menguasai Nusantara dan mengetahui hasrat umat Islam Nusantara dalam melaksanakan ibadah haji cukuplah besar. Pemerintah Belanda mulai ikut campur dalam pelaksanaan ibadah haji. Bangsa Belanda berusaha

---

<sup>4</sup> Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, Unique mempunyai arti unik. Pelaksanaan ibadah haji tidak semata-mata didasarkan pada unsur ritualnya saja, melainkan pelaksanaan ibadah haji melibatkan unsur-unsur lain diluar aspek ritualnya. Lihat Iman Syaikan, *Manajemen Pelayanan Haji Indonesia*, (Jakarta: CV Prasasti, 2009), hlm 1

<sup>5</sup>Koran *Republika*, Sejarah Pelaksanaan Haji di Indonesia, terbitan Ahad 10 Oktober 2010

<sup>6</sup> Djakaria, *Sejarah Indonesia II*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 71

mempersulit kegiatan umat Islam Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji. Berbagai macam kebijakan untuk membatasi dan mempersulit umat Islam Nusantara untuk pergi berhaji dibuat oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dikenal dengan sebutan kebijakan *Resolusi Haji*, yang kemudian disempurnakan dengan *Ordonansi Haji*.<sup>7</sup>

Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia atau sering disebut masa revolusi fisik negara Republik Indonesia (1945-1950) terdapat beberapa kebijakan yang mengiringi perjalanan ibadah haji Indonesia. Data dari Ditjen PHU (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umroh) menunjukkan bahwa pada tahun 1945-1947 terdapat kekosongan pemberangkatan ibadah haji jama'ah Republik Indonesia. Kekosongan pemberangkatan jamaah haji Republik Indonesia ini disebabkan beberapa faktor, adapun faktor-faktornya ialah; fatwa K.H Hasyim Asj'ari yang mengharamkan meninggalkan tanah air dan tidak wajib pergi haji dalam keadaan perang melawan penjajah, selain itu bangsa Indonesia

---

<sup>7</sup>Resolusi merupakan suatu kebijakan pemerintah Belanda mengenai ibadah haji yang dikeluarkan pada pertengahan abad ke-19. Resolusi ini diarahkan pada pembatasan kuota dan mengawasi gerak-gerik jama'ah haji. Salah satu kebijakan dalam resolusi ini ialah dengan ditetapkannya ongkos naik haji (ONH) sebesar f.110 dan apabila ada yang ingin berangkat ibadah haji tidak membayar f.110 akan dikenakan denda (hukuman), serta mewajibkan setiap jama'ah ibadah haji memiliki paspor. Ordonansi adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk menetapkan langkah-langkah baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Latar belakang lahirnya ordonansi ini karena banyak penyalahgunaan gelar haji dan ada sebagian jama'ah pasca menunaikan ibadah haji tidak kembali ke nusantara. Ordonansi dikeluarkan sejak tahun 1859. Salah satu kebijakan dalam ordonansi ini ialah dengan memberikan sertifikat gelar haji pada jama'ah yang sudah melaksanakan ibadah haji, serta memfasilitasi pemberangkatan ibadah haji senyaman mungkin. dari menyediakan kapal dengan kualitas baik dalam pemberangkatan ibadah haji. Menyediakan tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, dan perawatan medis didalam kapal, Memfasilitas kapal dengan baju pelampung, tempat tidur yang nyaman, serta air bersih di dalam kapal. Lihat M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm 83-111

juga menghadapi serangkaian agresi militer dari bangsa Belanda, serta bangsa Indonesia sedang dalam tahap penataan negara.<sup>8</sup>

Kekosongan disini bukan berarti tidak ada umat Islam Republik Indonesia yang menunaikan ibadah haji, melainkan dari pemerintah Republik Indonesia sendiri pada waktu itu belum mampu untuk menangani sendiri urusan ibadah haji. Saat itu pemerintah Republik Indonesia hanya berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Kementerian agama yang didirikan pada tahun 1946 juga belum disiapkan untuk mengurus ibadah haji. Perlu diketahui, antusias umat Islam Republik Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan yang signifikan. Waktu itu, umat Islam Republik Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui pemerintah Belanda atau biasa disebut haji NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*)<sup>9</sup>.

Dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tidak lantas bangsa ini berdiri kokoh. Bangsa Indonesia harus menghadapi serangkaian genjotan senjata lagi dari bangsa Belanda. Bangsa Belanda menganggap kedaulatan Republik Indonesia belum jelas secara hukum internasional. Salah satu unsur terbentuknya suatu negara dengan adanya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan biasanya mengarah pada istilah *de facto dan de jure*.<sup>10</sup> Masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, pengakuan kedaulatan ialah hal yang

---

<sup>8</sup> Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, *Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji di Indonesia*

<sup>9</sup> Rina Farihatul Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M*, (Tesis, UIN Sunan Ampel Program Study Dirasah Islamiyah), hlm 41

<sup>10</sup> Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm 8

sangat sulit untuk didapatkan. Salah satu bentuk usaha guna memperoleh pengakuan kedaulatan, ialah dengan cara memakai jalan politik diplomasi.<sup>11</sup>

Kegiatan ibadah haji umat Islam Republik Indonesia berlanjut pada tahun 1948. Tahun ini pemerintah Republik Indonesia mengirim misi haji R.I yang pertama kali, sekaligus sebagai bentuk usaha memperoleh pengakuan kedaulatan dengan jalan politik diplomasi. Waktu itu, Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden R.I memberi perintah kepada Menteri Agama yang dijabat oleh K.H Masykur agar dibentuknya misi haji R.I untuk dikirim ke Makkah dengan tugas ganda yaitu melaksanakan ibadah haji dan sekaligus menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Prof. K.H Mohammad Adnan, Saleh Suaidy, Ismail Banda M.A. dan H. Sjamsir menjadi utusan pemerintah Republik Indonesia ke Arab Saudi.<sup>12</sup> Kedatangan misi haji R.I disambut hangat oleh Raja Ibnu Saud. Ketua misi haji R.I K.H Mohammad Adnan menyampaikan amanat dari Presiden Republik Indonesia, dan menyerahkan sebilah keris yang berhulu emas sebagai kenang-kengangan. Saat wukuf di Padang Arafah terjadilah peristiwa monumental, dimana bendera merah putih dikibarkan.

Akhir tahun 1949, berdasarkan hasil konferensi meja bundar (KMB) Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pihak Belanda harus menyerahkan dan menandatangani kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), dari peristiwa tersebut menyebabkan pemerintah Belanda juga harus menyerahkan konsulatnya yang ada di Jeddah kepada Republik

---

<sup>11</sup> Wildan Insan Fauzi dan Neni Nurmayanti, "DIPLOMAT DARI NEGERI KATA-KATA: Diplomasi Haji Agus Salim Pada Inter Asia Relation Conference dan Komisi Tiga Negara", *HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. II, No. 2 (April 2019), hlm 111

<sup>12</sup> Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

Indonesia Serikat. Adanya peristiwa tersebut, dimulailah babak baru penyelenggaraan ibadah haji yang diprakasai sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tahun 1950 menjadi tonggak sejarah perjalanan ibadah haji Indonesia. Tahun ini merupakan permulaan penyelenggaraan ibadah haji yang di prakarsai sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pasca pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, Kementerian Agama yang waktu itu dijabat oleh K.H Wahid Hasim meletakkan beberapa dasar dalam kebijakan dari kementerian Agama RIS. Sejak itulah segala urusan mengenai ibadah haji diurus dan dilaksanakan oleh kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama menggandeng yayasan PHI sebagai satu-satunya wadah yang sah untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi perjalanan ibadah haji. Pemberangkatan ibadah haji yang pertama kali diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS, berhasil memberangkatkan sejumlah 9.933 jamaah haji. Tahun pertama dalam pemberangkatan ibadah haji yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia juga terdapat tragedi tertinggalnya 800 jamaah haji di Tanjung Priok.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik untuk terus mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa revolusi. Dengan demikian penulis mengambil judul dalam skripsi ini ***“BERHAJI PADA MASA REVOLUSI: IBADAH HAJI DENGAN MISI TERSEMBUNYI JAMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1945-1950”***

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Agar tidak melebarnya suatu permasalahan dalam suatu penelitian, maka perlu adanya batasan masalah. Argumentasi dari latar belakang di atas, penulis memfokuskan diri meneliti tentang peribadahan haji pada masa revolusi dan implementasinya pada misi haji R.I yang pertama kalinya serta pemberangkatan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh Pemerintah RIS. Pemilihan tahun 1945 merupakan awal dari kemerdekaan Republik Indonesia, selain itu pada tahun ini terdapat insiden kekosongan pemberangkatan ibadah haji jamaah Republik Indonesia, sementara tahun 1950 merupakan batasan tahun karena pada tahun tersebut awal mula kegiatan ibadah haji diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji sebelum kemerdekaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji pasca kemerdekaan Republik Indonesia?
3. Bagaimana perjalanan misi haji R.I yang pertama kali, dan bagaimana pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana latar belakang yang disampaikan diatas, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini. Secara umum tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memberikan informasi tentang problematika pelaksanaan ibadah haji pada masa

revolusi. Selain itu ada beberapa tujuan lain didalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Mendeskripsikan pengertian umum tentang ibadah haji, serta mengungkapkan pelaksanaan ibadah haji sebelum kemerdekaan Republik Indonesia
2. Mengungkapkan dan mendeskripsikan pelaksanaan ibadah haji pasca kemerdekaan Republik Indonesia
3. Mendeskripsikan peristiwa pemberangkatan misi haji R.I yang pertama kali serta mendeskripsikan pelaksanaan ibadah haji yang diprakasai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui problematika pelaksanaan ibadah haji pada masa revolusi. Penulis juga berharap, menjadi acuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama, dan dapat memperkaya keragaman penulisan dalam bidang Sejarah Peradaban Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang membahas tentang peribadahan haji di Indonesia memang sudah banyak dijumpai, setelah melakukan beberapa penelusuran dan memilah-milah berbagai koleksi terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang peribadahan haji di Indonesia, diantaranya:

Buku yang berjudul *Historiografi Haji Indonesia*, karangan M. Shaleh Putuhena, yang diterbitkan LkiS Yogyakarta, tahun 2007. Pembahasan dalam buku ini mencakup cukup luas, mulai dari memberi penjelasan tentang sejarah

haji, membahas secara terperinci kegiatan-kegiatan jama'ah haji di tanah suci, menjelaskan bagaimana pemerintah Belanda dalam mengelola dan mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan ibadah haji serta problematika peribadahan haji yang ada pada abad ke-19. Penelitian ini berbeda, di dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pada peribadahan haji pada masa revolusi dan implementasinya pada misi haji R.I yang pertama serta pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali diprakarsai oleh pemerintah Indonesia

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1869-1932”, yang ditulis Rina Farihatul Jannah, mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016. Dalam skripsi ini, Rina Farihatul Jannah memfokuskan diri pada permasalahan kebijakan haji yang dibuat oleh Belanda, yaitu kebijakan ordonansi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini sangatlah berbeda, dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan tentang peribadahan haji pada masa revolusi dan implementasinya pada misi haji R.I yang pertama serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda”, yang ditulis Istikomah, mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, tahun 2017. Pembahasan dalam skripsi ini lebih menitik beratkan dalam hal pengaruh ibadah haji terhadap kekuasaan pemerintah Belanda di Nusantara pada abad ke 19. Sangat jelas berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini menitik beratkan pada peristiwa misi haji R.I yang

pertama serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Haji di Indonesia Tahun 1967-1970; Studi Kasus Peristiwa Gambela”, yang ditulis Lena Inge Yunitasari, mahasiswa jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017. Dalam skripsi ini memaparkan tentang kebijakan haji yang dibuat pemerintah Indonesia, mempengaruhi sikap umat islam sehingga terjadi peristiwa Gambela yang direpresentasikan oleh Husami pada tahun 1970. Pokok pembahasan penelitian ini berbeda, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkapkan peribadahan haji pada masa revolusi dan implementasinya pada misi haji yang pertama serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam Di Indonesia Tahun 1900-1945”, yang ditulis Eka Yudha Wibowo, mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012. Pembahasan dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada aktifitas ibadah haji yang mempengaruhi sikap dan organisasi politik dengan munculnya organisasi-organisasi politik Islam yang direpresentasikan oleh Syarikat Islam (SI), dan Permi. Sangat jelas berbeda dengan penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini menitik beratkan pada peristiwa misi haji R.I yang pertama kali serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Persepsi Calon Jama’ah Haji Terhadap Kualitas Pelayanan Pada KBIH Bina Umat Yogyakarta”, yang ditulis Nur Sohirin,

mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pembahasan dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada pengaruh yang positif dan signifikan pada persepsi calon jama'ah haji terhadap kualitas pelayanan KBIH Bina Umat Yogyakarta. Pokok permasalahan dalam penelitian ini sangatlah berbeda, didalam penelitian ini membahas tentang peristiwa misi haji R.I yang pertama kali serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Tesis yang berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia tahun 1945-2000 M”, yang ditulis oleh Rina Farihatul Jannah, mahasiswa pasca sarjana program studi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam tesis ini memaparkan penyelenggaran ibadah haji pada masa orde lama dibagi menjadi empat fase, fase 1950-1959, fase 1960-1962, fase 1963-1964, fase 1964-1965, penyelenggaran ibadah haji pada masa orde baru dibagi menjadi dua fase, fase 1966-1978, fase 1979-1999 dan penyelenggaraan ibadah haji awal reformasi ada dua, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler dan lembaga swasta (biro haji dan umroh) sebagai penyelenggara ibadah haji plus. Penelitian ini sangatlah berdeda, penelitian ini lebih mengerucut pada peristiwa haji pada saat revolusi dan implementasinya pada peristiwa misi haji R.I yang pertama serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia

Hasil dari penelusuran buku maupun skripsi tersebut, peneliti banyak menemui pembahasan tentang peribadahan haji. Namun pembahasan tentang peribadahan haji masa revolusi dan implementasinya pada misi haji R.I yang

pertama kali serta pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia lebih menjadi perhatian bagi peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

### **E. Landasan Teori dan Konseptual**

Berkaitan dengan judul diatas, dalam melakukan rekontruksi sejarah penulis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, konflik merupakan suatu tindakan dasar manusia yang berkeinginan terus-menerus dan kegelisahanya terhadap kekuasaan setelah berkuasa, artinya rasa ingin berkuasa adalah sesuatu hal yang tidak pernah mengalami kepuasan.<sup>13</sup> Dideklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia tidak lantas membuat umat Islam Indonesia dengan mudah melaksanakan ibadah haji. Hal ini dikarenakakan karena umat Islam Indonesai harus menghadapi kembali rongrongan senjata dari bangsa Belanda.

Rupanya bangsa Belanda belum puas berkuasa selama ratusan tahun di Indonesia, berbagai tipu daya bangsa Belanda dikerahkan untuk menguasai kembali wilayah Republik Indonesia. Salah satu upaya bangsa Belanda dalam melakukan tipu dayanya ialah dengan cara menggunakan iming-iming ibadah haji. Ibadah haji pasca kemerdekaan Republik Indonesia dijadikan sebagai alat propaganda pemerintah Belanda untuk meraih simpati lagi dari umat Islam Indonesia. Bukan hanya itu saja, pemerintah Belanda juga menggunakan berbagai cara untuk menguasai lagi wilayah R.I, mulai dari mengadakan agresi militer dan

---

<sup>13</sup>M Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), hlm 36

perundingan-perundingan dengan bangsa Indonesia. Melihat pemerintah Belanda menggunakan iming-iming ibadah haji sebagai alat propagandanya, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, K.H Hasyim Asj'ari langsung mencegah propaganda tersebut. K.H Hasyim Asj'ari mengeluarkan fatwa bagi umat Islam Republik Indonesia agar umat Islam menolak tawaran ibadah haji dari pemerintah Belanda.

Bangsa Belanda melihat kedudukan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat masih bermasalah secara hukum internasional. Mengenai hal tersebut, penulis menggunakan teori diplomasi. Menurut Hasyim Djalal, diplomasi ialah usaha untuk menyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan mendengarkan pandangan kita, dan jika mungkin mendukung pandangan kita, tanpa perlu menggunakan kekerasan.<sup>14</sup> Diplomasi ini mempunyai tujuan utama untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional dan dilaksanakan secara damai.

Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi bangsa Indonesia. Dimana pada tahun tersebut, bangsa Indonesia mengirim misi haji R.I yang pertama kali dan sekaligus sebagai salah satu bentuk usaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dengan jalan politik diplomasi. Utusan beberapa tokoh untuk menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ke Arab Saudi.

Penelitian ini juga menggunakan teori fungsional yang dipopulerkan oleh Robert K. Merton, dalam pemikirannya Merton menyebutkan bahwa teori

---

<sup>14</sup> Rendi Prayuda, Rio Sundara, "Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis", *Journal of Diplomacy and Internasional Studies*, hlm 84

fungsional dibedakan menjadi dua, yaitu: fungsi *manifest* dan fungsi *latent*. Fungsi *manifest* ialah fungsi yang disadari dan biasanya merupakan tujuan awal yang ingin dicapai. Pelaksanaan misi haji R.I pada tahun 1948, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah haji melainkan mempunyai tugas ganda. Dalam hal ini, menyampaikan misi diplomatis lah yang lebih diprioritaskan dalam pemberangkatan misi haji R.I tersebut, sedangkan fungsi *latent* ialah fungsi yang tidak diharapkan, maksudnya kurang disadari karena fungsi sampingan. Mengenai hal tersebut fungsi *latent* dalam pemberangkatan misi haji R.I ini ialah melaksanakan ibadah haji.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Di dalam metode sejarah, akan menyajikan tentang pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilai sumber-sumber secara kritis, penafsiran terhadap sumber serta pemaparan hasil penelitian, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan skripsi ini ialah:

##### **1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)**

Tahapan yang pertama ini, penulis mengumpulkan data atau sumber melalui buku-buku, artikel, jurnal, majalah, koran dan arsip yang berhubungan dengan peribadahan haji pada masa revolusi. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau kerangka pemahaman yang berdasarkan sumber-

sumber yang relevan.<sup>15</sup> Adapun sumber yang di gunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang bisa penulis kumpulkan ialah sumber tertulis. Sumber tertulis yang berhasil dikumpulkan oleh penulis antara lain: koran dan majalah-majalah terbitan tahun 1948, 1949, 1950 yang di dapatkan di Monumen Pers, serta data dan arsip dari Ditjen Pemberangkatan Haji dan Umroh.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku literatur yang berkaitan tentang peribadahan haji di Indonesia seperti buku Historiografi Haji Indonesia, Berhaji di Masa Kolonial, Lintasan Sejarah Perjalanan Haji Indonesia, Administrasi Islam di Indonesia dsb.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Data atau sumber telah kumpul, langkah selanjutnya ialah kritik sumber. Kritik sumber ini bertujuan untuk mendapatkan data atau sumber penelitian yang benar-benar valid. Data atau sumber-sumber ini kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkain kritik yang bersifat intern maupun ekstern.

a. Kritik Intern

Kritik internal dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas data atau sumber. Kredibilitas semacam ini biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa.

---

<sup>15</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995), hlm 90-98

Untuk menjalankan kritik intern ini dengan cara membaca, mempelajari, memahami, menelaah secara mendalam terhadap sumber-sumber yang didapatkan tadi. Langkah selanjutnya ialah membandingkan isi sumber satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya.

#### b. Kritik Ektern

Kritik ektern ini dilakukan untuk mengetahui keautentikan terhadap data atau sumber-sumber. Untuk menjalankan kritik ektern ini, dengan cara melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, koran atau majalah.<sup>16</sup> Dengan menggunakan kritik ektern ini, diharapkan penulis dapat menggunakan data atau sumber yang bisa dipertanggung jawabkan.

### 3. Interpretasi (Penafsiran)

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber dan data yang telah dikumpulkan. Interpretasi mempunyai pengertian menguraikan secara terminologi,<sup>17</sup> dengan ini peneliti dapat memberikan penafsiran terhadap data atau sumber yang diperoreh tentang peribadahan haji pada masa revolusi. Penafsiran ini bertujuan untuk memperoleh sejumlah fakta dari sumber sejarah, lalu disusunlah fakta tersebut kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perneradamedia Group, 2014), hlm 221

<sup>17</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 64

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm 102

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah tahapan terakhir dalam metode sejarah yang berupa penulisan, pemaparan atau pelaporan yang menyajikan fakta-fakta dalam bentuk tulisan.<sup>19</sup> Tahapan ini, penulis menyajikan laporan hasil penelitian dengan sistematis dan kronologis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi penelitian ini, maka pada bagian ini memaparkan secara sistematis bagian-bagian yang akan dibahas. Dalam penyusunan penelitian ini bagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penelisan.

Bab kedua memaparkan tentang pelaksanaan ibadah haji sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan pada bab ini dimulai dengan mendeskripsikan pengertian umum tentang ibadah haji, dilanjutkan mendeskripsikan pelaksanaan haji pada masa pendudukan Belanda dan Jepang.

Bab ketiga memaparkan tentang pelaksanaan ibadah haji pasca kemerdekaan. Bab ini diawali dengan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan pemberangkatan ibadah haji Indonesia, lalu dilanjutkan mendeskripsikan tentang ibadah haji dijadikan sebagai alat politik

---

<sup>19</sup> Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian*, hlm 67

diplomasi, lalu mendeskripsikan berubahnya Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat.

Bab empat mendeskripsikan tentang peristiwa pemberangkatan misi haji R.I yang pertama kali, dilanjutkan dengan mendeskripsikan dampak positif dari pemberangkatan misi haji R.I, lalu mendeskripsikan tentang pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia. Awal dari pembahasan dimulai mendeskripsikan PHI dalam Pemberangkatan Ibadah Haji oleh pemerintah Indonesia, lalu mendeskripsikan tragedi tertinggalnya 800 jamaah haji di Tanjung Priok.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil analisa dari seluruh pembahasan mengenai ibadah haji pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **IBADAH HAJI SEBELUM KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia merupakan suatu bangsa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam dikenal sebagai penduduk yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam jika mampu dan dilaksanakan seumur hidup sekali. Sebelum masuk ke pembahasan utama tentang perjalanan misi haji R.I dan perjalanan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia, penulis akan memaparkan sedikit tentang peribadahan haji secara umum, selain itu pada bab ini juga menjelaskan tentang perkembangan umat Islam di Nusantara serta mendeskripsikan perjalanan ibadah haji pada masa pendudukan Belanda dan Jepang.

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji**

##### **1. Haji dalam Narasi Keagamaan**

Sacara bahasa, haji berasal dari kata *AL-Hajju* yang memiliki arti menyengaja, menuju atau mengunjungi, adapun secara istilah mempunyai arti berkunjung ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah yang telah ditentukan waktunya, dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan ridho-Nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurahman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 8

Haji dalam istilah fikih memiliki makna perjalanan umat Islam menuju Ka'bah guna menjalankan ritus keagamaan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Jadi bisa disimpulkan haji merupakan sebuah perjalanan ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu: *ihram, tawaf, sa'i, wukuf* di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, *melontar jumroh, tahalul* dan dilaksanakan pada bulan dzulhijjah dengan syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Melaksanakan ibadah haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu dan minimal seumur hidup sekali.<sup>3</sup>

Perintah untuk melaksanakan ibadah haji tidak hanya berlaku pada umat Nabi Muhammad Saw. Jauh sebelum itu, ibadah haji telah diperintahkan kepada Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Sebagian riwayat menyatakan bahwa orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji adalah Nabi Adam a.s. Beberapa riwayat menyebutkan, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam a.s. Beberapa sumber menunjukkan bahwa, Nabi Adam a.s sudah melaksanakan ibadah haji dengan cara *tawaf* sebanyak 7 putaran setelah membangaun ka'bah.<sup>4</sup>

Nabi Ibrahim a.s diperintahkan Allah SWT untuk membangun kembali ka'bah yang runtuh, setelah pembangunan ka'bah selesai, Ibrahim a.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyeru umat manusia agar melaksanakan haji ke Baitullah. Ibrahim a.s beserta puteranya terlebih dahulu melaksanakan haji, mereka berdua memulai ibadah haji dengan melakukan *tawaf* sebanyak 7 kali

---

<sup>2</sup> Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), hlm 13

<sup>3</sup> Miti Yarmunuda, *Fiqh Haji dan Umroh (Tinjauan Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 17

<sup>4</sup> Koran *Republika*, Haji Mengagungkkn Baitullah, terbit 30 Oktober 2011

yang pada setiap putarannya mengusap *rukun* atau sudut Ka'abah, sehabis *tawaf* mereka melaksanakan sholat, kemudian dilanjutkan dengan melakukan *sa'i* atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwah, dan melempar jumroh.<sup>5</sup>

Orang Arab masa jahiliah, masa sebelum nabi Muhammad juga memelihara tradisi nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji, meski dengan cara yang berbeda.<sup>6</sup> Pada masa Rasulullah Saw, ibadah haji baru disyariatkan atau diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah, atau kurang lebih enam tahun sejak nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Nabi Muhammad Saw baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah, atau sekitar 3 bulan sebelum wafatnya. Masa Rasulullah inilah, pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara lengkap dengan syarat, rukun dan wajib haji, seperti *tawaf*, *sai*, *wukuf*, *melontar jumrah*, *tahalul*, dan *ihram*<sup>7</sup>

## 2. Perkembangan Umat Islam di Nusantara

Agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara diperkirakan abad ke-8 dan ke-9 M.<sup>8</sup> Islam masuk ke Nusantara membawa pandangan *religious monotheistis* yang sangat maju. Para penyebar agama Islam dalam memperkenalkan agama Islam mengajarkan rasa toleransi dan persamaan derajat manusia. Ajaran agama ini sangat menarik perhatian masyarakat setempat, karena agama-agama yang sudah ada sangat menekankan perbedaan derajat manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Shaleh putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2007), hlm 27

<sup>6</sup> Ibid., hlm 22

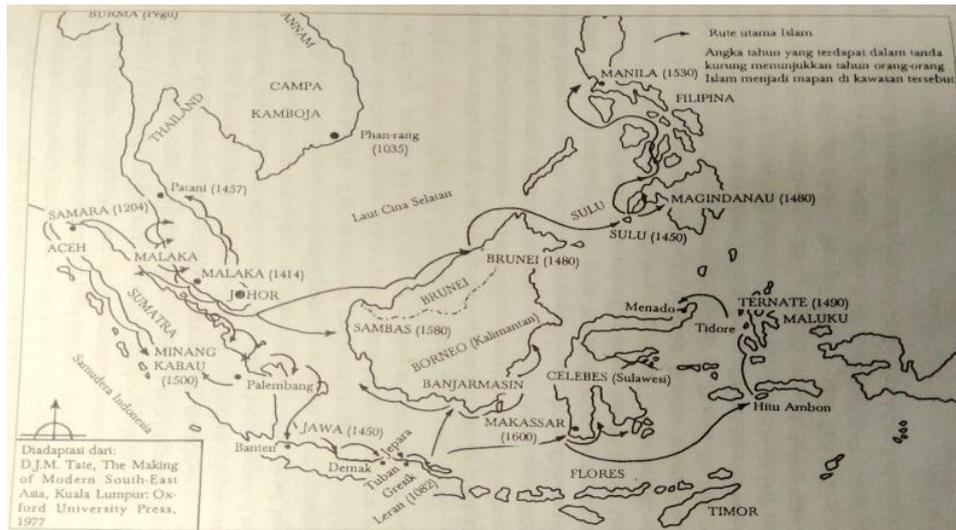
<sup>7</sup> Koran *Republika*, Haji Mengagungkan Baitullah, terbit 30 Oktober 2011

<sup>8</sup> Muhammad Hasan Al-Aydrus, *Penyebaran Islam Di Asia Tenggara*, terj Ali Yahya, (Jakarta: PT Lestara Barritama, 1996), hlm 54

<sup>9</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 197-200

Masuknya agama Islam ke daerah-daerah Nusantara tidak dalam waktu yang bersamaan, sedangkan daerah pertama kali yang dimasuki agama Islam ialah daerah Sumatra bagian Utara.

Gambar 2.1  
Peta Penyebaran Islam di Nusantara



Sumber: Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 18

Proses islamisasi di pulau Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-11 M. Perkembangan agama Islam di pulau Jawa bersamaan dengan melemahnya kerajaan Majapahit. Pertumbuhannya pun berhubungan erat dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam dari daerah Sumatra (Samudra Pasai, Malaka dan Aceh). Perkembangan agama Islam di bagian timur Nusantara, tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang dan menjadi pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Diperkirakan agama Islam berkembang di daerah Maluku sejak abad ke-14 M. Mereka datang dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, dakwah dan perkawinan.<sup>10</sup> Wilayah Kalimantan bagian Timur, proses islamisasi

<sup>10</sup> Ibid., hlm 200

dimulai oleh Datuk Ri Badang dan Tunggang Parangan. Mereka merupakan seorang mubalig yang datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar sudah memeluk agama Islam. Proses islamisasi di daerah Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar tahun 1575 M.<sup>11</sup>

Proses islamisasi di Nusantara berjalan dengan cepat, damai dan disertai dengan rasa saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan para pengikut agama-agama yang sudah ada. Proses islamisasi di Nusantara terjadi dan dipermudah karena adanya dua pihak, yakni orang-orang Islam yang datang dengan mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat Nusantara yang menerimanya. Masa-masa kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya, Islam sebagai agama dengan mudah memasuki dan mengisi masyarakat Nusantara yang sedang mencari pegangan hidup, lebih-lebih cara yang dilakukan para penyebar Islam dalam mensyiarkan agama Islam disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya yang ada.<sup>12</sup>

Sejalan dengan perkembangan agama Islam di Nusantara, yang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, hasrat untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima bagi umat Islam Nusantara cukuplah besar. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan. Aktifitas pelaksanaan ibadah haji umat Islam Nusantara sangat tergantung dengan keadaan transportasi antara kepulauan Nusantara dengan Jazirah Arab. Hubungan antar wilayah Nusantara dan Jazirah

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm 200

<sup>12</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm 179-180

Arab dilakukan melalui pelayaran perdagangan, yang berkaitan erat dengan masuk dan tersebarnya agama Islam di Nusantara.<sup>13</sup>

## **B. Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Kolonial**

Kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam Nusantara diperkirakan dimulai sejak abad ke-16 M.<sup>14</sup> Siapa dan kapan umat Islam Nusantara yang pertama kali menunaikan ibadah haji belum diketahui secara pasti. Shaleh Putuhena (2007: 105) yang pertama kali berangkat menunaikan ibadah haji dari Nusantara bukanlah jamaah haji, melainkan para pedagang, para utusan sultan, dan para musafir penuntut ilmu. Tampaknya ditengah kesibukan mereka, apabila musim haji datang (bulan Dzulhijjah) mereka menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi umat Islam Nusantara ibadah haji tidak hanya semata-mata melaksanakan perjalanan spiritual, melainkan ada yang beranggapan sebagai simbol status sosial agar dilegitimasi oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya sebagai orang yang mampu dan taat beragama.<sup>15</sup>

Awalnya kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam Nusantara berjalan tanpa ada halangan yang berarti, bahkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Masa-masa awal pemberangkatan ibadah haji sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar Kepulauan Nusantara dengan Timur Tengah. Berdasarkan catatan yang ditulis oleh Lewis Barthema (Sejarawan Barat), di Makkah pada tahun 1503, terdapat ada beberapa jamaah haji yang berasal dari

---

<sup>13</sup> Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, hlm 67

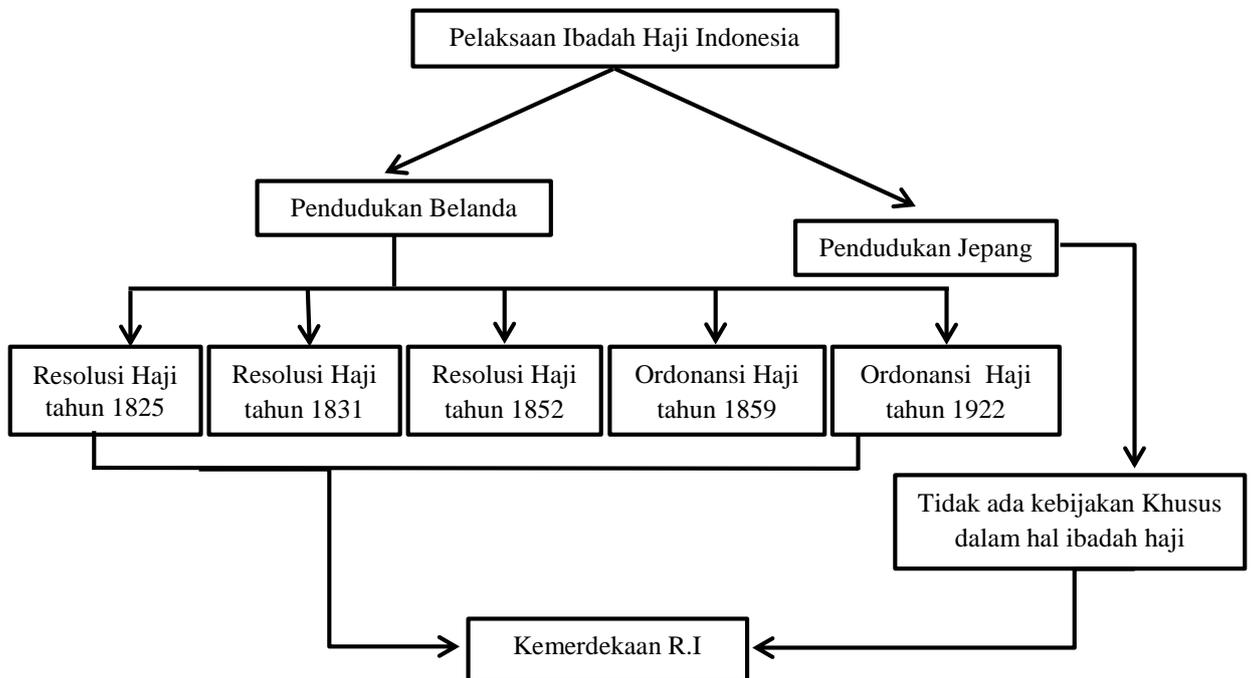
<sup>14</sup> Koran *Republika*, Sejarah Pelaksanaan Haji di Indonesia, terbit Ahad, 10 Oktober 2010

<sup>15</sup> Moh. Rosyid, "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal", *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 17, No. 2 (2017), hlm 242

*Greatel India* (India Major-Anak benua India) dan *Lesser East Indies* (kepulauan Nusantara).<sup>16</sup>

Jamaah haji yang dijumpai oleh Barthema ini barangkali ialah orang-orang Nusantara yang pertama kali melaksanakan ibadah haji. Saat itu, para umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji menumpang kapal layar dagang. Jalur yang ditempuh umat Islam Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji melalui rute pelayaran dari Singapura, Colombo, Aden, kemudian masuk ke wilayah Laut Merah, menuju Jeddah. Perjalanan pelayaran yang ditempuh umat Islam Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan waktu relatif lama kurang lebih 6 bulan, karena dalam perjalanannya tergantung pada faktor musim angin.<sup>17</sup>

Bagan 1. Alur Pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia Sebelum Kemerdekaan



<sup>16</sup> Koran *Republika*, Sejarah Pelaksanaan Haji di Indonesia, terbit Ahad, 10 Oktober 2010

<sup>17</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), hlm 46-51

## 1. Masa Pendudukan Belanda

Semenjak kedatangan bangsa Belanda yang di pimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596.<sup>18</sup> Belanda sedikit demi sedikit mulai membangun kekuasaannya di Nusantara, setelah menguasai Nusantara dan mengetahui hasrat umat Islam Nusantara dalam melaksanakan ibadah haji cukuplah besar. Pemerintah Belanda mulai ikut campur dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagai penguasa terhadap daerah jajahan, bangsa Belanda dengan leluasa membuat suatu kebijakan. Pemerintah Belanda membuat berbagai kebijakan tentang peribadahan haji yang sifatnya sama sekali tidak menyenangkan dan menjengkelkan bagi umat Islam Nusantara.

Mulanya perjalanan ibadah haji umat Islam Nusantara ke Makkah melalui jalur laut dapat dilakukan tidak hanya dari Nusantara, melainkan juga dapat dilakukan dari Singapura dan Malaka. Hal ini sangat berdampak dan dapat merugikan pemerintah Belanda dalam bidang ekonomi dan politik. Maka dari itu, timbul ide dari pemerintah Belanda untuk mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan perjalanan ibadah haji umat Islam Nusantara. Dibiidang ekonomi, jika umat Islam Nusantara hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur laut Singapura dapat mengurangi pendapatan pemerintah Belanda, karena semua kebutuhan yang diperlukan untuk pergi berhaji harus dibeli di Singapura. Dibiidang politik, tujuan utama menerapkan kebijakan tersebut supaya para jama'ah haji yang menggali ilmu pengetahuan disana (Makkah) dapat dikendalikan dari sikapnya yang dapat merugikan bahkan melawan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menyadari bahwa umat Islam Nusantara dapat

---

<sup>18</sup> Djakaria, *Sejarah Indonesia II*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 71

bertemu dengan sesama umat Islam dari seluruh dunia. Ada yang hanya sekedar menuniakan kewajiban melaksanakan ibadah haji dan ada pula yang sambil bertukar pemikiran dan menggali ilmu pengetahuan di sana.<sup>19</sup>

Tahun 1825 untuk pertama kalinya, sarana pemberangkatan jamaah haji menggunakan kapal khusus atau kapal penumpang.<sup>20</sup> Kapal tersebut disiapkan oleh Syekh Umar Bugis, yang sekaligus menjadi awal tren pengangkutan jamaah haji dengan menggunakan kapal khusus. Sejak saat itulah, pemberangkatan haji dilakukan menggunakan kapal milik seorang Syekh<sup>21</sup> dengan jumlah jamaah yang terus mengalami peningkatan.

Umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji sebelumnya menggunakan kapal dagang. Layaknya kapal dagang, mereka biasanya bersinggah selama beberapa hari di setiap pelabuhan yang dilewati kapal dagang tersebut, selain itu awak kapal juga tidak menyediakan perlengkapan khusus bagi jamaah haji yang menumpang kapal dagang tersebut. Umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kapal dagang harus membawa sendiri keperluan logistiknya sendiri seperti makanan. Kapal dagang ini juga tidak menyediakan fasilitas kamar. Para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji harus lera berdesakan dan berhimpitan dengan barang dagangan yang menjadi muatan utama kapal. Bahkan lebih dasyat lagi apabila ada penumpang yang

---

<sup>19</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 82

<sup>20</sup> Koran *Republika*, Sejarah Pelaksanaan Haji di Indonesia, terbit Ahad, 10 Oktober 2011

<sup>21</sup> Syekh disini memiliki pengertian sebagai agen penyedia kapal untuk pemberangkatan ibadah haji

hendak membuang hajat kecil dan besar terpaksa dilakukan ditempatnya bernaung.<sup>22</sup>

Suasana bercengkrama sesama umat Islam dari seluruh dunia di Makkah, dapat menimbulkan suatu gagasan dan pemikiran-pemikiran yang bersifat progresif-radikal; sebuah kesadaran akan perlawanan terhadap kaum penindas yang disandarkan atas pemerintah Belanda.<sup>23</sup> Adanya peristiwa tersebut pemerintah Belanda berupaya mengantisipasi dengan membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Diawali dengan lahirnya kebijakan *Resolusi Haji* tahun 1825<sup>24</sup> yang berisi ketentuan, bahwa umat Islam Nusantara tidak diperbolehkan pergi melaksanakan ibadah haji jika tidak mempunyai pas jalan. Kebijakan *Resolusi Haji* tahun 1825 ini juga diarahkan pada pembatasan kuota dan mengawasi gerak-gerik jamaah haji Nusantara, serta menetapkan ongkos naik haji (ONH) sebesar f. 110,- sudah termasuk pembuatan pas jalan.<sup>25</sup>

Tahun 1831 dikeluarkan kebijakan lagi, bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, tidak memiliki pas jalan dari pemerintah Belanda, sepulangnya dari melaksanakan ibadah haji akan dikenai denda sebesar f. 220,-.<sup>26</sup> Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda tak sepenuhnya ditaati umat Islam Nusantara, sebab dalam pelaksanaannya dianggap terlalu memberatkan umat

---

<sup>22</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 51

<sup>23</sup> Ibid., hlm 83

<sup>24</sup> Ibid., hlm 83

<sup>25</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1984), hlm 34

<sup>26</sup> Ibid., 34

Islam Nusantara, oleh sebab itu banyak umat Islam Nusantara yang mau melaksanakan ibadah haji melalui embarkasi Singapura dan Malaka.

Tahun 1852, Duynmaer van Twist mencabut kebijakan *Resolusi Haji* yang telah dibuat tadi dan hanya memberlakukan penggunaan pas jalan, selain itu kebijakan tentang pembayaran denda dihapuskan. *Resolusi Haji* tahun 1852 ini juga menginstruksikan kepada para kepala pemerintahan di Jawa, Residen Palembang, dan Gubernur Pesisir Barat Sumatra untuk mengawasi jamaah haji dan memberikan laporan mengenai keberangkatan dan kepulangan.<sup>27</sup>

Penerapan kebijakan *Resolusi Haji* yang dianggap gagal, pemerintah Belanda kembali menetapkan langkah-langkah baru dalam pelaksanaan ibadah haji. Tahun 1859 pemerintah Belanda mengeluarkan Kebijakan yang dikenal dengan *Ordonansi Haji*.<sup>28</sup> Munculnya kebijakan ini sangat dipengaruhi dari banyaknya penyalahgunaan gelar haji dan ada sebagian jamaah haji Nusantara setelah melaksanakan ibadah haji tidak kembali ke Nusantara.<sup>29</sup>

Tidak bisa dimungkiri sebagian umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui embarkasi Singapura. Ada sebagian jamaah yang terlantar, karena minimnya pengetahuan dan kekurangan bekal uang dan makanan. Mereka terpaksa tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Makkah dan hanya sampai di Singapura. Ada istilah khusus yang diberikan kepada umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji tetapi hanya sampai di Singapura, istilah itu disebut "*Haji Singapura*", atas dasar tersebut pemerintah

---

<sup>27</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm 8

<sup>28</sup> Sumur Harapan dan Mursidi, *Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm

<sup>29</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 95

Belanda berharap tidak ada lagi umat Islam Nusantara yang menjadi “*Haji Singapura*”. Jamaah haji yang telah kembali ke Nusantara, dikenakan wajib lapor untuk menentukan murni-tidaknya menyandang gelar haji. Jamaah haji yang sudah melapor ke pemerintah Belanda, mereka akan diberi sertifikat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan ibadah haji.<sup>30</sup> Peraturan *Ordonansi Haji* ini juga mencangkup mengenai kewajiban pas jalan yang sudah diberi keterangan dari Bupati setempat, bahwa jamaah haji tersebut mempunyai kecukupan bekal untuk perjalanan ibadah haji dan maupun yang ditinggal pada saat melaksanakan ibadah haji.<sup>31</sup>

Berbagai aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda tidak mampu membendung arus keinginan umat Islam Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji, sementara itu pemerintah Belanda tidak bisa memantau apa saja yang dilakukan para jamaah selama di tanah suci, selain melaksanakan ibadah haji. Tahun tahun 1872, pemerintah Belanda mendirikan kantor Konsulat Belanda di Jeddah.<sup>32</sup> Tugas dari konsulat yang berada di Jeddah ini memberi pertolongan dan pengertian kepada jamaah haji bahwa mereka berasal dari mana, bagaimana mengurus barang-barang milik sendiri atau barang-barang milik jamaah yang meninggal. Adanya kantor konsulat yang ada di Jeddah ini diharapkan banyak memberi sumbangan berbagai data kepada pemerintah Belanda, tentang apa saja yang dilakukan jamaah di tanah suci, selain melaksanakan ibadah haji.

Beberapa petugas konsulat yang diangkat pemerintah Belanda di Jeddah pada abad ke-19 adalah W. Henegraaf, J.A Kruyt, Mr. J.A de Vicq, H. Spakler,

---

<sup>30</sup> *Ibdi.*, hlm 101-102

<sup>31</sup> Sumur Harapan dan Mursidi, *Op.Cit*, hlm 34

<sup>32</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 120

G.S Endt, Mr. J.E de Sturler, E.Th. Van Delden dan F.G.A van Delden dll.<sup>33</sup> Konsulat yang berada di Jeddah ditempatkan dibawah Departemen Luar Negeri untuk membuat laporan serta mengirim ke Den Haag. Laporan tersebut lantas diteruskan ke Departemen Luar Negeri lalu ke Departemen Koloni yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jenderal. Laporan seputar jamaah haji Nusantara di Hijaz mulai mengalir baik ke pemerintah Belanda dengan adanya kantor konsulat yang ada di Jeddah. Data yang akurat mengenai jumlah haji yang tiba di Mekkah, kapal-kapal yang mengangkut para jamaah haji, serta para jamaah haji yang kehabisan bekal, selalu dilaporkan dalam bentuk laporan tahunan.<sup>34</sup>

Akhir abad ke-19, terjadi perkembangan di alat transportasi yang dipakai untuk pemberangkatan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, mulanya dalam pemberangkatan ibadah haji menggunakan kapal layar yang merupakan kapal dagang, berkembang ke kapal khusus atau kapal penumpang, lalu berkembang lagi dengan menggunakan kapal uap untuk mengangkut jamaah haji ke Mekkah. Pergantian kapal tersebut membawa dampak positif atas keamanan penumpang, relatif murah dan mempercepat waktu perjalanan dari Nusantara menuju ke Mekkah.<sup>35</sup>

Dibukanya Terusan Suez pada tahun 1896<sup>36</sup> semakin memperpendek jalur pelayaran antara kawasan Asia Tenggara dengan Timur Tengah sehingga

---

<sup>33</sup> Untuk lebih lanjut, lihat lampiran Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 224

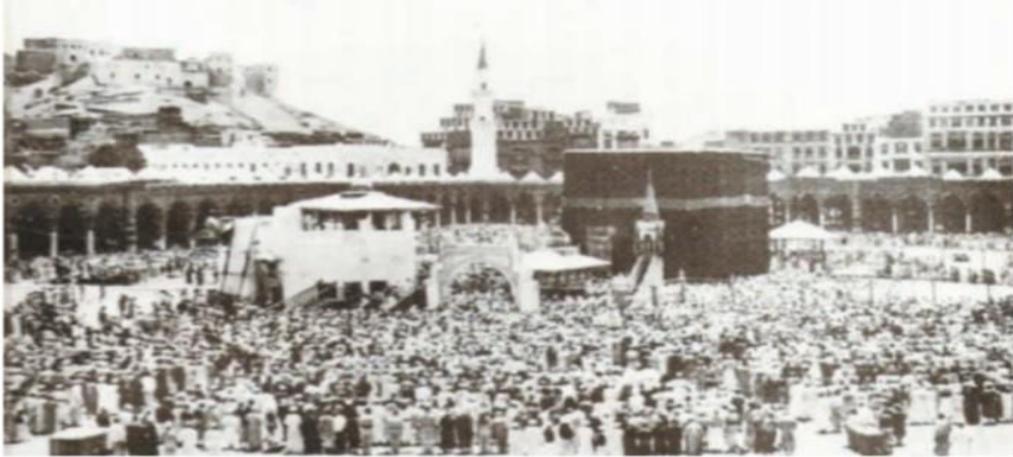
<sup>34</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 120

<sup>35</sup> Ibid., hlm 69

<sup>36</sup> Terusan Suez merupakan jalur air permukaan laut buatan yang terletak di Mesir dan menghubungkan Laut Mediterania ke Samudra Hindia melalui Laut Merah. Terusan atau yang biasa dengan kanal ini memiliki panjang 193,30 km (120 mil). Terusan Suez adalah salah satu rute pengiriman yang paling efektif untuk perjalanan dari Atlantik Utara ke Samudra Hindia tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Lihat M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 69

membawa pengaruh dan minat umat Islam Nusantara untuk melaksanakan ibadah haji.

Gambar 2.2  
Suasana di Baitullah pada Musim Haji di Tahun 1900-an



Sumber: Koran *Republika*, Lika-Liku Perjalanan Haji Indonesia, terbit Ahad, 10 Oktober 2010

Mengalaminya perkembangan di alat transportasi, pada tahun 1873 pemerintah Belanda hanya menyediakan 3 perusahaan yang diberi wewenang untuk menangani pelayanan transportasi ibadah haji, adapun perusahaan-perusahaan tersebut ialah: *De Rotter damsche Lloyd*, *Stoomvaartmaatschappij Nederland*, dan *Stoomvaartmaatschappij Oceaan*. Ketiga perusahaan pelayaran ini tergabung dalam satu kongsi yang dinamai dengan *Kongsi Tiga*. *Kongsi Tiga* ini ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk menangani pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan umat Islam Nusantara yang hendak melaksanakan ibadah haji melalui pemerintah Belanda.<sup>37</sup>

Guna menyukseskan “*Politik Islamnya*”, pemerintah Belanda berusaha mengambil hati umat Islam di satu pihak, tapi menindak dengan tegas setiap usaha-usaha yang menentang pemerintah Belanda. Tahun 1922 diadakanlah suatu

---

<sup>37</sup> M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 52-53

pembaharuan-pembaharuan mengenai kebijakan ibadah haji. Tahun 1922 kebijakan *Ordonansi Haji* diperbarui tentang pelayanan ibadah haji. Pembaruan kebijakan *Ordonansi Haji* ini disebabkan karena adanya desakan dari umat Islam Nusantara dan organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang menuntut agar melakukan perbaikan pelayanan di atas kapal perjalanan ibadah haji. Tuntutan ini disebabkan karena banyaknya antusias umat Islam Nusantara dalam melaksanakan ibadah haji, namun tidak diimbangi dengan penambahan dan perbaikan fasilitas di atas kapal.

Kebijakan *Ordonansi Haji* 1922 mencangkup penumpang yang mau melaksanakan ibadah haji tidak dibedakan jenis kelamin dan usia. Kecepatan kapal yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah haji hanya 10 mil/jam dan brutonya kurang lebih 2500 m<sup>3</sup>. Kondisi kapal yang digunakan untuk memberangkatkan ibadah haji harus memenuhi standar. Memiliki fasilitas sekurang kurangnya bagian atas *dek* terbuat dari kayu dan besi, ventilasi yang memadai serta penerangan yang cukup. Perlengkapan kapal seperti baju pelampung, tempat tidur harus memenuhi standar. Kapal juga harus memiliki fasilitas seperti kamar mandi, ruang dapur, dan ruang cuci. Disediakan pula tenaga kebersihan, kesehatan, dan perawat medis.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm 105-106

Gambar 2.3  
Suasana Pemulangan Jamaah Haji Nusantara Masa Kolonial Belanda



Sumber: M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, hlm 209

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda tidak selalu ditaati oleh umat Islam Nusantara dalam hal urusan ibadah haji. Para jamaah haji Nusantara menganggap pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji dari pemerintah Belanda lebih sulit, berbelit-belit dan mahal dibanding dengan pelayanan dan penyelenggaraan di Singapura dan Malaka. Umat Islam Nusantara baru menemui titik terang, dengan adanya pembaharuan kebijakan *Ordonansi* pada tahun 1922, dari sinilah umat Islam Nusantara mulai tertarik melakukan perjalanan ibadah haji melalui pemerintah Belanda.

## 2. Masa Pendudukan Jepang

Menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang, ini berarti mengakhiri penjajahan Belanda di Nusantara.<sup>39</sup> Jepang berkuasa di Nusantara dimulai sejak tahun 1942 sampai pertengahan 1945. Pemerintah Jepang juga menjalankan

---

<sup>39</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 11-12

*“Politik Islam”*<sup>40</sup>, sebenarnya pemerintah Jepang juga khawatir dengan ajaran Islam, namun pemerintah Jepang berkeyakinan bahwa agama dan kebudayaannya sendiri yang bersumber pada kaisar Tenno Heika (sebagai keturunan dewa Ameterazu), Shintoisme dan Nippon Seishin adalah jauh lebih unggul dibandingkan dengan ajaran Islam.<sup>41</sup> Atas dasar tersebut pemerintah Jepang lebih banyak memberikan kelonggaran dibidang agama dari pada masa pendudukan Belanda. Pertengahan tahun 1942 didirikanlah kantor urusan agama yang disebut *Shumubu* untuk tingkat pusat dan *Shumuk* untuk tingkat daerah.

Mengenai ibadah haji, pemerintah Jepang tidak merevisi peraturan yang telah dibuat pemerintah Belanda ataupun tidak membuat peraturan baru mengenai ibadah haji. Bahkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Belanda masih tetap dipakai berdasarkan aturan peralihan undang-undang bala tentara Jepang no.1 tahun 1942 yang berbunyi: *“semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain berasal dari pemerintah Hindia Belanda dahulu tetap berlaku selama peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan bala tentara dai nippon”*.<sup>42</sup> Aturan ini juga termasuk aturan tentang ordonansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda.

Masa pendudukan Jepang tidak mengatur layanan pengangkutan jamaah haji seperti yang dilakukan pada masa pemerintahan Belanda. Masa pendudukan Jepang di Nusantara juga tidak ada data yang menyebutkan adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroperasi. Kapal-kapal angkutan swasta pun yang selama ini mengangkut jamaah haji dari umat Islam Nusantara tidak diketahui

---

<sup>40</sup> Sumur Harapan dan Mursidi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 50

<sup>41</sup> Ibid., hlm 51

<sup>42</sup> Ibid., hlm 50

melakukan pengangkutan jamaah haji. Hal ini dikarenakan situasi saat itu sedang Perang Dunia ke-II dan tidak kondusif untuk melakukan perjalanan haji.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rina Farihatul Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M*, (Tesis, UIN Sunan Ampel Program Study Dirasah Islamiyah), hlm 38

### **BAB III**

#### **IBADAH HAJI PASCA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia atau lazim disebut dengan sebutan masa revolusi fisik negara Republik Indonesia (1945-1950) terdapat beberapa kebijakan yang mengiringi perjalanan ibadah haji Indonesia. Dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tak lantas membuat umat Islam Indonesia dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji. Pasalnya umat Islam Indonesia harus menghadapi kembali gejotan senjata dari bangsa Belanda yang ingin menguasai lagi wilayah Indonesia.

Data yang dihimpun dari Ditjen PHU (Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh) menunjukkan bahwa pada tahun 1945-1947 terdapat kekosongan pemberangkatan jamaah haji dari Republik Indonesia. Kekosongan disini bukan berarti tidak ada umat Islam dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, melainkan dari pemerintah Republik Indonesia sendiri yang pada waktu itu belum mampu menangani sendiri ibadah haji. Kementerian Agama yang didirikan pada tahun 1946 juga belum disiapkan untuk menangani ibadah haji.

Pembahasan pada bab ini diawali dengan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan pemberangkatan haji Indonesia, lalu dilanjutkan dengan mendeskripsikan tentang ibadah haji yang dijadikan sebagai alat politik diplomasi, serta mendeskripsikan tentang berubahnya Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat.

## A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekosongan Pemberangkatan Haji Indonesia

### 1. Fatwa dari K.H Hasyim Asj'ari

Ibadah haji pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, dijadikan sebagai alat propaganda pemerintah Belanda untuk meraih simpati dari umat Islam Indonesia. Pemerintah Belanda menggunakan iming-iming ibadah haji untuk mencaplok kembali wilayah Republik Indonesia. Waktu itu, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, K.H Hasyim Asj'ari langsung mencegah propaganda tersebut. K.H Hasyim Asj'ari yang lahir pada Selasa Kliwon, 14 Februari 1871 memiliki andil besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, melalui resolusi jihad yang dikeluarkan olehnya telah memberikan dorongan yang kuat supaya bangsa ini terbebas dari belenggu penjajahan.<sup>1</sup> Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh K.H Hasyim Asj'ari ini dijadikan dasar guna melakukan perlawanan yang akan ditunjukkan kepada bangsa Indonesia.

Gambar 3.1  
K.H Hasyim Asj'ari



Sumber: Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan ulama: Biografi K.H Hasyim Asj'ari*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm 12

---

<sup>1</sup>Zainul Milal Bizawie, *Masterpiece Islam Nusantara (sanad dan jejaring ulama-santri 1830-1945)*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2016), hlm 277

Beberapa bulan setelah mengeluarkan resolusi jihatnya, tepat pada hari Sabtu 20 April 1946 lewat saluran radio K.H Hasyim Asj'ari mengeluarkan fatwa bagi umat Islam Republik Indonesia. K.H Hasyim Asj'ari yang juga merupakan pemimpin masyumi (partai Islam di Indonesia)<sup>2</sup> menyiarkan fatwa agar umat Islam menolak tawaran ibadah haji dari pemerintah Belanda, ia juga melarang umat Islam Republik Indonesia melaksanakan ibadah haji dengan bantuan tangan penjajah. "*Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan Tanah Air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan negara*" seru K.H Hasyim Asj'ari dalam siaran radio.<sup>3</sup>

Keluarnya fatwa yang disampaikan oleh K.H Hasyim Asj'ari tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu, *pertama* salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan dan melawan bangsa Belanda. Keluarkannya fatwa tersebut mengandung unsur ajakan dan anjuran kepada umat Islam Republik Indonesia untuk melawan bangsa Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. *Kedua*, saat itu Republik Indonesia sedang mengalami blokade darat, udara dan laut yang dilancarkan bangsa Belanda, jadi untuk pergi menunaikan ibadah haji dirasa kurang aman. *Ketiga*, waktu itu pemerintah Republik Indonesia belum mampu untuk memfasilitasi pemberangkatan ibadah haji.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Zainal Milal Bizawe, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garis Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), hlm 131

<sup>3</sup>*KumparanNews*, Mengorbankan Haji Demi Merengkuh Kemerdekaan, terbit 16 Agustus 2019 pukul 13:50, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/mengorbankan-haji-demi-merengkuh-kemerdekaan-1rgOETUjTsBR> diakses pada tanggal 16 September 2020

<sup>4</sup>Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, (Jakarta:INIS, 1997), hlm 18

Fatwa yang dikemukakan K.H Hasyim Asj'ari dengan cepat beredar luas ke umat Islam Republik Indonesia lewat jejaring kelompok Islam. Bukan hanya mengakar kuat di kalangan Nahdlatul Ulama, tapi hampir seluruh kelompok Islam dan umat Islam yang ada di Republik Indonesia. Banyak para tokoh agama Islam yang mendengar fatwa tersebut langsung menunda keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak yang sudah mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji akhirnya dibatalkan, waktu itu pemerintah Belanda benar-benar geram dengan kebijakan yang dicetuskan oleh K.H Hasyim Asj'ari tersebut.

Mendengar kabar tersebut, Kementerian Agama yang waktu itu dipimpin oleh Prof. K.H Fathurahman Kafrawi menerbitkan maklumat Kementerian Agama Nomer 4 tahun 1947 guna mempertegas bahwa ibadah haji dihentikan sementara, selama keadaan masih dalam keadaan genting dan tidak menentu.<sup>5</sup> Tetapi penulis belum bisa menemukan naskah asli dari maklumat Kementerian Agama Nomer 4 tahun 1947 tersebut. Dikeluarkannya fatwa dan maklumat Kementerian Agama tersebut berhasil menggagalkan rayuan pemerintah Belanda untuk menarik simpati dengan cara mengiming-imingi ibadah hajinya. Tercatat pada tahun 1946 hanya 70 jamaah haji yang diberangkatkan oleh pemerintah Belanda. Kebanyakan jamaah haji ini berasal dari kota-kota yang sudah diduduki oleh Belanda: Sulawesi, Maluku dan Sunda kecil.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Afandi, BAB III: Latar Belakang Berdirinya Kementerian Agama di Indonesia, dalam <http://diligib.uinsby.ac.id/3919/6/Bab%203.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2020

<sup>6</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, hlm 52

## 2. Agresi Militer Belanda

Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang.<sup>7</sup> Sejak saat itulah, wilayah Nusantara berada dibawah pedudukan Jepang. Saat berlangsungnya penjajahan Jepang, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan R.I untuk memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tidak serta-merta bangsa ini berdiri dengan kokoh. Bangsa Indonesia harus menghadapi kembali serangkaian genjotan senjata dari bangsa Belanda.

Pasca dideklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada bulan September tahun 1945, bangsa Belanda kembali ke wilayah Republik Indonesia dengan cara membonceng sekutu. Laksamana Muda W.R Patterson, wakil *SEAC Lord Louis Mountbatten* di Singapura, mendarat di Tanjung Priok dengan menggunakan kapal Cumberland. Rombongan dalam kapal Cumberland ini juga terdapat C.H.O. Van der Plas salah satu petinggi Netherland Indies Civil Administration (NICA).<sup>8</sup> Kedatangan pasukan sekutu ke wilayah R.I bertujuan untuk melecuti tentara Jepang yang masih ada di Republik Indonesia, mereka dikumpulkan lalu di pulangkan ke negara asalnya serta membebaskan tawanan-tawanan perang yang berasal dari bangsa Eropa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainal Milal Bizawe, *Laskar Ulama-Snatri dan Resolusi Jihad: Garis Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*, hlm 111

<sup>8</sup> Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta: PT Gita Karya, 1985) hlm 34

<sup>9</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980), hlm 28

Gambar 3.2  
Kedatangan Pasukan Sekutu di Tanjung Priok



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

Kembalinya bangsa Belanda ke wilayah R.I, menjadikan bangsa Indonesia yang sudah merdeka kembali terusik. Jadi, ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya bangsa Belanda tidak terpengaruh. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dianggap tidak membahayakan ketika bangsa Belanda datang kembali ke wilayah Republik Indonesia. Bangsa Belanda menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai suatu cetusan kelompok kecil nasionalis yang *keblinger* di bawah pimpinan Ir. Soekarno.<sup>10</sup> Bangsa Belanda yang memiliki hasrat besar guna melakukan penjajahan kembali di wilayah Republik Indonesia melakukan berbagai cara guna merebut kembali wilayah R.I. Hal ini menjadi sorotan perhatian publik, karena menyangkut masalah kemerdekaan Republik Indonesia.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Republik Indonesia diawali dengan adanya insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Tanggal 19

---

<sup>10</sup> R.H.A Saleh, *Mari Bung Rebut Kembali*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm 46

September 1945, Ada sejumlah orang berkebangsaan Belanda yang berada di hotel tersebut mengibarkan bendera berwarna merah, putih dan biru (bendera kebangsaan Belanda) di puncak hotel Yamato. *Arek-arek* Surabaya yang melihat hal tersebut, marah besar dan menuntut kepada orang-orang Belanda untuk menurunkan bendera tersebut, namun keinginan *arek-arek* Surabaya itu ditolak oleh pihak Belanda. Bentrokan pun terjadi antara *arek-arek* Surabaya dengan pasukan Belanda, dalam peristiwa ini salah satu *arek* Surabaya menaiki tiang bendera dan merobek bendera dibagian yang berwarna biru dan berkibarlah kembali bendera merah putih.<sup>11</sup>

Terbunuhnya Jenderal Mallaby di Surabaya menimbulkan peperangan yang sangat dasyat antara *arek-arek* Surabaya dengan pasukan sekutu di Surabaya.<sup>12</sup> Pertempuran-pertempuran lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan R.I juga terjadi di beberapa tempat, seperti di Ambarawa yang terjadi pada 20 November - 15 Desember 1945<sup>13</sup> dan juga terjadi di kota-kota lainnya seperti Bandung, Semarang dan Sumatra Utara.

Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia juga menempuh jalan politik. Berbagai perundingan dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda. Perjuangan melalui jalan politik berpuncak pada perundingan yang dilakukan di Linggarjati pada tanggal 10-15 November 1946. Waktu itu, bangsa Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Schermerhorn dan Lord Killearn sebagai

---

<sup>11</sup> Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 102-106

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 110-113

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 116-119

perwakilan sekutu. Akibat dari perundingan Linggarjati tersebut terjadilah agresi militer Belanda pertama.

#### **a. Agresi Militer Belanda Pertama**

Perselisihan pendapat sebagaimana akibat perbedaan penafsiran dalam persetujuan Linggarjati semakin memuncak dan berbuntut panjang, sehingga menimbulkan banyak kesukaran. Bangsa Belanda berpendapat, bahwa sebelum negara Indonesia Serikat dibentuk, hanyalah bangsa Belanda yang berdaulat di seluruh Indonesia, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa sebelum negara Indonesia Serikat dibentuk, kedudukan de facto Republik Indonesia tidak berubah.<sup>14</sup> Bangsa Belanda bersikukuh tetap berdasarkan tafsirannya pada pidato Ratu Wilhelmina, bahwasanya Indonesia akan dijadikan anggota *Commonwealth*<sup>15</sup> dan akan dibentuk federasi, sedangkan hubungan luar negerinya di urus pemerintah Belanda.

Keadaan yang semakin kacau dan kian hari semakin memburuk ini, Bangsa Belanda berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan Republik Indonesia. Tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirim nota ultimatum dan harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 hari. Isi pokok nota tersebut: membentuk pemerintahan *ad interim* bersama, mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, Republik Indonesia harus mengirim beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda,

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil dan Julianto. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 49

<sup>15</sup> Commonwealth sebutan untuk negara persemakmuran yang didirikan oleh Belanda, Lihat Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm 144

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.<sup>16</sup>

Waktu itu Sjahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri menyatakan kesediaannya untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Jawaban tersebut mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai-partai politik dan mengakibatkan kabinet Sjahrir jatuh. Amir Sjarifuddin, yang memimpin kabinet berikutnya, memberikan jawaban dalam notanya tertanggal 15 Juli 1947. Belanda kembali mengultimatum dalam kurun waktu 32 jam, Republik Indonesia harus memberikan jawaban terhadap tuntutan-tuntutan bangsa Belanda. Pemerintah Republik Indonesia menjawab melalui Perdana Menteri Amir Sjarifuddin pada tanggal 17 Juli 1947 melalui RRI Yogyakarta, namun jawaban tersebut di tolak oleh pemerintah Belanda.<sup>17</sup>

Atas rekomendasi Dr. H.J van Mook, perdana menteri Belanda yang dipimpin oleh Dr. L.J.M. Beel secara resmi melancarkan agresi militernya kepada Republik Indonesia. Tanggal 20 Juli malam menjelang tanggal 21 Juli 1947 Belanda mulai melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik Indonesia. Belanda menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut, dan Udaranya untuk menghancurkan Republik Indonesia. Belanda berdalih bahwa serangan tersebut hanyalah sekedar tindakan kepolisian belaka, namun serangan yang dilancarkan Belanda, mengerahkan semua komponen angkatan perang Belanda.<sup>18</sup> Belanda menyerang 7 daerah yang merupakan daerah-daerah pokok Republik Indonesia di Jawa dan

---

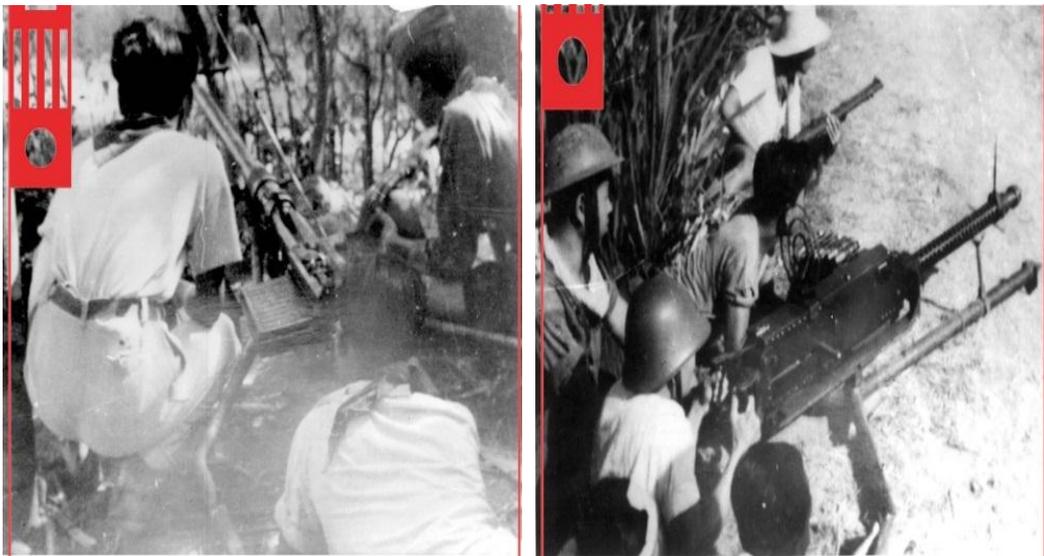
<sup>16</sup> Ibid., hlm 144

<sup>17</sup> Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm 145

<sup>18</sup> C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Inonesia*, hlm 49

Sumatra. Didaerah Jawa digempur denga pasukan yang bersenjata lengkap dan modern, yang terdiri dari tiga divisi: untuk menguasai Jawa Barat, Belanda mengerahkan dua divisi, satu divisi diantaranya melanjutkan serangan ke Jawa Tengah, untuk daerah Jawa Timur hanya mengerahkan satu divisi saja. Sedangkan di Sumatra diserang dengan tiga brigade.<sup>19</sup>

Gambar 3.3  
Para pejuang R.I yang Sedang Melakukan Perlawanan Terhadap Pasukan Belanda



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

Tujuan utama agresi militer yang di lakukan oleh bangsa Belanda ini ialah sebagai salah satu upaya untuk memperluas wilayah pendudukan dan menguasai daerah-daerah yang mempunyai arti ekonomi penting untuk menunjang aksi selanjutnya. Sekitar jam 07.00 tanggal 21 Juli 1947, lapangan terbang Maguo mendapatkan serangan udara, sekitar 4 buah pesawat terbang milik Belanda melancarkan pengeboman dan penembakan. Belanda dengan terang-terangan menunjukkan kelebihanannya, mereka ingin membuat hati rakyat Republik

---

<sup>19</sup> Pramudia Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer dan Ediaty Kamil, *Konflik Revolusi Indonesai Jilid III*, ( Bogor: Percetakan SMK Mardi Yuana, 2001), hlm 234-235

Indonesia gentar.<sup>20</sup> Hanya membutuhkan waktu yang singkat pasukan Belanda berhasil menerobos pertahanan Republik Indonesia yang digawangi oleh TNI. Kekuatan TNI yang mempunyai pelaratan sederhana tidak bisa menghambat serangan dari bangsa Belanda yang mempunyai peralatan yang serba modern. Pasukan TNI yang terpecar dalam agresi militer Belanda berusaha mengkonsolidasikan diri dan membangun daerah-daerah pertahanan baru. Sistem *wehrkreise* diterapkan untuk menggantikan sistem pertahanan linear, yang ternyata tidak dapat menahan gempuran serangan Belanda yang memiliki persenjataan modern. Taktik *gerilya* pun dilancarkan dalam menghadapi serangan dari bangsa Belanda

Agresi militer Belanda ini telah membawa reaksi hebat dari kalangan pemerintah Republik Indonesia dan luar negeri. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar permasalahan bangsa Indonesia dibahas dalam dewan keamanan. Akhirnya, dewan keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan kedua belah pihak menghentikan peperangan. Sidang keamanan PBB tersebut, Republik Indonesia mengutus Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Tanggal 4 Agustus 1947 Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata bersama, dengan adanya pengumuman tersebut berakhirilah agresi militer yang dilancarkan Belanda kepada Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Purnawan Tjondronegoro, *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*, (Jakarta: Sinar Negara, 1980), hlm 54

Gambar 3.4  
Sutan Sjahrir dan H. Agus Salim Bersiap Berangkat Menghadiri Sidang Keamana PBB



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

#### **b. Agresi Militer ke dua**

Pasca diadakannya perundingan Renville, ternyata terdapat banyak sekali kesulitan-kesulitan yang tak dapat diatasi dan gagal. Kedua belah pihak bangsa Belanda maupun Indonesia mempunyai pendapat dan tafsiran sendiri-sendiri tentang isi perundingan tersebut. Belanda yang tetap bersisikukuh menghancurkan Republik Indonesia, mengadakan blokade ekonomi terhadap Republik Indonesia dan menuntut supaya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibubarkan.<sup>21</sup> Perundingan Renville yang membawa banyak kerugian bagi Republik Indonesia, terutama dalam hal pengosongan daerah-daerah strategis sebagaimana akibat dari agresi militer pertama.

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Inonesia*, hlm 52

Gambar 3.5  
Penandatanganan Perjanjian Renville



Sumber: Facebook Arsip Nasional Indonesia

Waktu itu keadaan Republik Indonesia berada pada posisi sedang goyah. Republik Indonesia juga harus menghadapi serangkaian konflik internal yang sedang berkecamuk. Tikaman pemberontakan PKI di Madiun juga ikut memperlemah keadaan Republik Indonesia. Keadaan seperti inilah dianggap sangat ideal untuk menggempur dan menyingkapkan Republik Indonesia dari muka bumi. Bangsa Belanda memperhitungkan, bahwa Republik Indonesia akan hancur dan tak berdaya atas konflik internal yang terjadi dengan PKI tersebut.<sup>22</sup>

Jenderal Spoor dan Dr. Beel tidak bisa menahan hasratnya untuk menyerang dan menghancurkan Republik Indonesia. Tanggal 18 Desember 1948 tengah malam, Jenderal Beel berpidato bahwa Belanda tidak terikat lagi pada persetujuan Renville dengan dalih bahwa Republik Indonesia dianggap tidak mematuhi isi perundingan tersebut.<sup>23</sup> Tanggal 19 Desember 1948, Belanda secara tiba-tiba melaksanakan aksinya untuk menyerbu daerah ibu kota Republik

<sup>22</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm 67

<sup>23</sup> Ibid., hlm 67

Indonesia. Agresi militer ke dua yang dilancarkan oleh Belanda ini di mulai dengan menyerang lapangan terbang Maguwo selama satu jam, dilanjutkan dengan penerjunan pasukan payung. Bangsa Belanda mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang kota Yogyakarta. Mulanya rakyat Yogyakarta, tidak curiga atas adanya serangan yang dilakukan oleh Belanda, karena pada saat itu telah gencar berita yang memberitakan bahwa akan ada latihan perang yang dilakukan oleh TNI sendiri. Tetapi ketika ada pesawat-pesawat yang sedang melakukan tembak-tembakan dan kemudian ramai kedengaran suara senjata dari lapangan Maguwo, maka sadarlah rakyat bahwa mereka sedang diserang secara mendadak. Serangan dari pihak Belanda ini langsung dihadapi oleh setengah kompi taruna Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dengan Kasmiran sebagai perwira tingginya.<sup>24</sup> Kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia tidak bisa dipertahankan.

Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belanda. Adapun tokoh-tokoh yang ikut ditawan oleh bangsa Belanda: Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Muh, Roem, A.G Pringgodigdo, Assat, Suryadharma, dll. Mereka dibawa ke Prapat, kemudian sebagian di bawa ke Bangka.<sup>25</sup> Sebelum pemimpin-pemimpin Republik Indonesia ini ditawan, mereka terlebih dahulu memberikan mandat kekuasaan kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.<sup>26</sup> Kalau tidak mungkin, supaya menteri keuangan yang sedang berada

---

<sup>24</sup> Pramoedya Ananta Toer, Koeslah Soebagyo, Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia jilid IV*, (Bogor: Grafika Mandiri Yuana, 2003), hlm 702-704

<sup>25</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm 69

<sup>26</sup> Ginanjar Kartasmita, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm192

di luar negeri (New Delhi) yaitu: A.A. Marimas untuk menggantikan Syafuddin Prawira negara.<sup>27</sup>

Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengeluarkan amanat untuk melawan serangan Belanda dengan segala kekuatan. Pasca menduduki kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sekaligus sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia bangsa Belanda mengira bahwa Republik Indonesia akan berakhir, akan tetapi pemimpin-pemimpin bangsa telah menghitung segala kemungkinan. Pemerintah Darurat Republik Indonesia segera menjalankan tugasnya dengan Syafruddin Prawiranegara bertindak sebagai kepala pemerintahan darurat.<sup>28</sup> Penangkapan beberapa tokoh Republik Indonesia tersebut, justru mengobarkan semangat rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adanya penawanan tersebut kecintaan dan kepercayaan terhadap pemimpinnya bertambah besar.

Ketika pemimpin-pemimpin R.I sudah ditawan, maka Belanda berusaha keras menangkap Jendral Sudirman. Jendral Sudirman berhasil meloloskan diri setelah Yogyakarta dikuasai oleh Belanda.<sup>29</sup> Jendral Sudirman yang waktu itu sedang sakit parah, dengan semangat gigihnya menyingkir dari Yogyakarta masuk ke daerah pedalaman. Keadaan yang serba terbatas inilah, disusun rencana untuk mempertahankan dan dipikirkan siasat penyerbuan. Anggota TNI lainnya menyiapkan diri untuk melakukan perang gerilya. Dari sinilah Mulainya sejarah

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm 192

<sup>28</sup> C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Inonesia*, hlm 52-53

<sup>29</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nsional*, hlm 72

perang gerilya yang terus menerus menakutkan dan memusingkan bangsa Belanda. Para anggota TNI sangat menenal baik daerah-daerah operasinya, mereka bergerak ditengah-tengah rakyat, yang menjadi incaran mereka adalah kota-kota yang sudah diduduki oleh bangsa Belanda dan jalan-jalan yang sering dilewati oleh iring-iringan kendaraan bermotor yang mengangkut persenjataan pasukan Belanda.<sup>30</sup>

Gambar 3.6  
Jenderal Sudirman Memimpin Langsung Gerilya Walaupun Sedang Sakit



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

Pasukan-pasukan TNI menghindari pertempuran besar-besaran, mereka menyusup dan melakukan penyerangan terhadap Belanda secara mendadak. Anggota TNI mencegat pasukan-pasukan Belanda yang sedang berpratali dan kemudian melarikan diri untuk mebaur atau menyamar lagi bersama rakyat setempat. Masa perang gerilya inilah bantuan rakyat sangatlah besar artinya bagi para gerilyawan yang mempertahankan kemerdekaan. Lambat laun kedudukan Belanda semakin hari semakin terdesak. Wilayah-wilayah yang sudah mereka duduki tak merasa aman. Keleluasaan untuk bergerak pun semakin hari semakin

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm 53

sempit. Pasukan pasukan gerilya tak dapat ditindas, malah semakin hari semakin bertambah kuat.

Puncak dari serangkaian serangan-serangann yang dilancarkan oleh TNI adalah dengan adanya serangan umum terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin langsung oleh Letkol Kolonel Soeharto, komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III yang membawahi daerah Yogyakarta.<sup>31</sup> Walaupun dengan serangan gerilya sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang positif bagi bangsa Indonesia, tetapi dampaknya kurang keras terhadap dunia luar. Disusunlah siasat untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta yang sudah dikuasai oleh bangsa Belanda tersebut. Serangan umum tersebut juga bertujuan agar dalam perundingan-perundingan nantinya antara Belanda dengan R.I tidak mengandung unsur keraguan terhadap kekuatan bersenjata.<sup>32</sup>

Serangan umum dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Pos komando ditempatkan di desa Muto. Guna mempermudah penyerangan dibantu sektor-sektor. Sektor barat dipimpin oleh Mayor Ventjen Sumul, sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sardjono, untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Peristiwa 1 Maret 1949 ini, menggemparkan bangsa Belanda. Kaum politisi yang sedang menghadapi serangkaian perundingan dengan bangsa Belanda mendapat keyakinan dan kekuatan tersendiri. Dunia luar pun juga ikut gempar, sebab tidak diduga kalau ibu kota yang diduduki Belanda itu dengan mudah diserang oleh bangsa Indonesia.

---

<sup>31</sup> Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm 207

<sup>32</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm 73

Kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda di wilayah R.I melalui agresi militernya yang ke-II, mengalami jalan butu. Serangan bangsa Indonesia atas kota Yogyakarta sebagai ibu kota dari R.I merupakan puncak dari perlawanan bangsa Belanda dalam bidang militer. Kini bangsa Belanda harus mengakui bahwasannya hanya tindakan militer saja belum mampu untuk menguasai kembali wilayah R.I. Akhirnya jalan politiklah di tempuh kembali dengan mengadakan perundingan-perundingan.

### **3. Proses Penataan Negara**

Selain adanya fatwa dari K.H Hasyim Asj'ari dan Agresi Militer Belanda, bangsa Indonesia juga dihadapkan dengan proses penataan negara. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka masih meraba-meraba dalam menjalankan roda pemerintahan. Walaupun sudah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka, bangsa Indonesia masih gamang dalam menjalankan roda pemerintahan. Para pemimpin-pemimpin bangsa bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara yang merdeka. Para pemimpin-pemimpin bangsa berhasil memilih pimpinan bangsa secara aklamasi yakni Ir. Soekarno sebagai Presiden R.I dan Drs. Muh. Hatta sebagai wakil presiden R.I.

#### **a. Pengesahan undang-undang 1945**

Langkah awal yang lancarkan pemerintah Indonesai dengan cara mengesahkan Undang-undang Dasar 1945. Tepat tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia bergerak cepat menetapkan dasar negara sebagai asas kehidupan.

Rancangan Undang-Undang ini sebenarnya sudah ada sejak tanggal 22 Juni 1945,<sup>33</sup> yang sering disebut Piagam Jakarta. Undang-Undang Dasar tersebut terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Adanya undang-undang dasar tersebut, bangsa Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.

#### **b. Pembagian wilayah Indonesia**

Republik Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai kepulauan. Untuk mempermudah jalannya pemerintahan, para pemimpin-pemimpin bangsa memutuskan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan bangsa Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.<sup>34</sup>

#### **c. Pembentukan Kementerian**

Langkah selanjutnya demi memperlancar roda pemerintahan ialah dengan menetapkan kementerian-kementerian Republik Indonesia. Adapun kementerian-kementeriannya sebagai berikut: Menteri Luar Negeri yang dijabat oleh: Ahmad Subarjo, Menteri Dalam Negeri dijabat oleh: R. Adipati Aria Wiranata Kusumah, Menteri Kehakiman dijabat oleh: Supomo, Menteri Keamanan dijabat oleh Supriyadi, Menteri Kesehatan dijabat oleh: dr. R. Buntaran Martoatmojo, Menteri Kemakmuran dijabat oleh: Ir. Surachman,

---

<sup>33</sup> A.H Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II*, (Bandung: Disjarah Angkatan Darat dan Angkasa, 1984), hlm 217-218

<sup>34</sup> Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm 102

Menteri Pendidikan dijabat oleh: Ki Hajar Dewantoro, Menteri Penerangan dijabat oleh: Amir Syarifuddin Harapan, Menteri Keuangan dijabat oleh: dr. Samsi Sastrawidigda, Menteri Sosial dijabat oleh: R. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum: R. Abikusno Cokrosuyoto dan menetapkan 4 kementerian negara yang masing-masing dijabat oleh: K.H Wahid Hasyim, R. M. Sartono, Alexander Andries Maramis, R. Otto Iskandar Dinata, dr. M. Amir, selain itu, juga diangkat pejabat-pejabat tinggi negara antara lain: Ketua Mahkamah Agung yang dijabat oleh Kusumah Atmaja, Jaksa Agung yang dijabat oleh Gatot Tarunamiharja, Sekertaris Negara yang dijabat oleh Gafar Pringgodigdo, Juru Bicara Negara yang dijabat oleh Sukarjo Wiryopronoto.<sup>35</sup>

#### **d. Pembentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan**

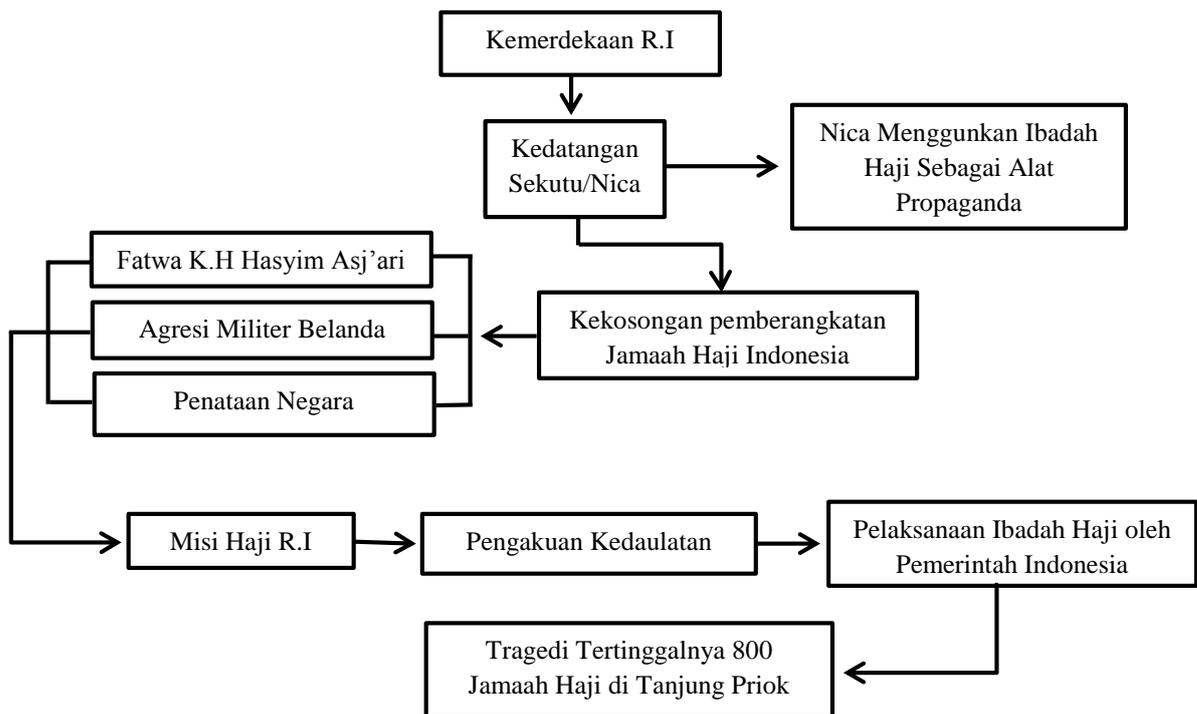
Melihat keadaan yang sedang goyah, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Waktu itu, Soekarno menugaskan mantan mayor KNIL, Oerip Soemohardjo menyusun konsep dan membentuk tentara nasional. Tepat pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat), dengan pimpinan tertingginya Soepriadi. Karena Soepriadi tidak begitu aktif meduduki jabatannya, maka diadakanlah pemilihan pimpinan tinggi TKR, yang saat itu terpilihlah Kolonel Soedirman.

---

<sup>35</sup> Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, hlm 109-110

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berkembang dan berubah berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, kemudain tepat pada tanggal 7 Januari 1946 berubah menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia), yang akhirnya pada tanggal 3 Juli 1947 berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).<sup>36</sup> Presdien Soekarno juga meresmikan berdirinya BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Kebanyakan anggota BKR ini terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL dan Heiho. Inilah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekosongan pemberangkatan jamaah haji dari Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Bagan 2. Alur Pelaksaaan Ibadah Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan



Kekosongan di sini bukan berarti tidak ada jamaah haji dari Republik Indonesia yang menunaikan ibadah haji, melainkan dari pemerintah Republik

<sup>36</sup> Ibid., hlm 133

<sup>37</sup> Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, *Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji di Indonesia*

Indonesia sendiri yang belum mampu untuk menangani sendiri urusan ibadah haji. Saat itu pemerintah Republik Indonesia hanya berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu diketahui, antusias umat Islam Republik Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Waktu itu, umat Islam Republik Indonesia yang melaksanakan ibadah haji melalui pemerintah Belanda dan sering disebut dengan sebutan haji NICA (*Netherland Indie Civil Adminitrarion*)<sup>38</sup>

Tabel 1  
Jamaah Haji yang Diberangkatkan Pemerintah Belanda tahun 1946-1949

Tahun Masehi	Jumlah Jamaah
1946	70 orang
1947	3.956 orang
1948	8.818 orang
1949	8.770 orang

Sumber: Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, hlm 52

Pelaksanaan ibadah haji pada masa revolusi, juga bisa ditelusuri dari karyanya K.H Abdussamad, Melawat ke Mekkah (menunaikan haji) dalam kumpulan tulisan Henri Chambert-loir. Pembahasan buku tersebut, menceritakan bahwa K.H Abdussamad berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji pada tanggal 13 Agustus 1948 melalui pelabuhan Tanjung Priok, adapun rute pelayaran kapal yang ditumpangi K.H Abdussamad dari Batavia, Kuala, Selat Sunda hingga Sabang, Colombo, Aden, Bad el-Manded dan Jedah kemudian dilanjutkan ke Madinah dan Mekkah. Mengenai penjelasan mengapa K.H Abdussamad tetap melaksanakan ibadah haji walaupun saat itu ada fatwa tentang

<sup>38</sup> Rina Farihatul Jannah, *Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2000 M*, (Tesis, UIN Sunan Ampel, Program Study Dirasah Islamiyah), hlm 41

pelarangan ibadah haji, serta Maklumat Kementerian Agama tidak ditemukan dalam naskah buku tersebut.<sup>39</sup>

## **B. Haji Dijadikan Sebagai Alat Politik Diplomasi**

Pasca Republik Indonesia merdeka, bangsa ini dihadapkan kembali dengan rongrongan senjata dari bangsa Belanda yang berniat untuk menguasai lagi wilayah Indonesia. Rupanya bangsa Belanda belum puas berkuasa selama ratusan tahun di Indonesia. Bangsa Belanda melihat kedudukan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat masih belum jelas secara hukum internasional. Berdirinya suatu bangsa harus memenuhi beberapa syarat, adapun syarat yang *pertama* yaitu: harus mempunyai wilayah tertentu, yang *kedua* mempunyai rakyat yang menetap disuatu wilayah dan yang *ketiga* adanya pemerintah yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa adanya suatu wilayah tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara dan begitu pula dengan rakyat, mustahil untuk menyebutkan adanya suatu negara tanpa ada rakyat yang menetap. Walaupun kedua syarat wilayah dan rakyat ini terpenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintah yang berdaulat yang bersifat nasional belumlah dapat dinamakan negara yang merdeka.<sup>40</sup>

Masa-masa diawal kemerdekaan Republik Indonesia, pengakuan kedaulatan adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Negara yang berdaulat merupakan negara dengan pemerintahan sendiri, memiliki payung hukum sendiri, tidak terikat dengan negara lain, serta mampu untuk menentukan nasibnya

---

<sup>39</sup> K.H Abdussamad, "Melawat ke Makka", dalam buku, Henri Chambert-Loir, *Naik Haji Masa Silam tahun 1900-1950*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm 699-743

<sup>40</sup> Moh. Kusnari, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Sastra Hudaya, 1985), hlm 291

sendiri.<sup>41</sup> Guna memperoleh pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia memakai dua jalan: perang fisik dan politik diplomasi.<sup>42</sup> Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan biasanya mengarah pada istilah *de facto dan de jure*.<sup>43</sup>

Pengakuan secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* merupakan pengakuan yang sifatnya sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada realitas atau kenyataan-kenyataan tentang kedudukan pemerintah yang baru, apabila kemudian dipertahankan terus menerus dan mengalami perkembangan yang maju. Pengakuan *de facto* akan berubah dengan sendirinya menjadi pengakuan *de jure* yang bersifat tetap dan diikuti dengan tindakan-tindakan hukum lainnya. Pengakuan *de jure* adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya dengan menjalin hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian kerjasama antar kedua negara.<sup>44</sup>

Upaya politik diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara *de facto dan de jure*, selalu menghadapi tantangan dan rintangan dari bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang berencana menguasai kembali wilayah R.I berusaha menutup jalan diplomasi

---

<sup>41</sup> Agil Burhan Setia, dkk, "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2019)

<sup>42</sup> Wildan Insan Fauzi dan Neni Nurmayanti Hasanah, "Diplomat dari Negeri Kata-Kata (Politik Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asia Relatin Conference dan Komisi Tiga Negara)", *Historia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. II, No. 2 (April, 2019), hlm 111

<sup>43</sup> Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, tidak ada halamannya

<sup>44</sup> *Ibid.*, tidak ada halamannya

bangsa Indonesia. Masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, politik diplomasi diperlukan karena banyak bangsa-bangsa di dunia yang belum mengetahui jika bangsa Indonesia sudah merdeka. Hal ini dikarenakan berita-berita yang menyiarkan kabar akan kemerdekaan Republik Indonesia kalah bersaing dengan berita-berita yang disiarkan oleh bangsa Belanda di forum-forum internasional.<sup>45</sup>

Kurun waktu tahun 1945-1950, telah banyak usaha yang dilakukan dalam bidang politik diplomasi guna mendapatkan pengakuan kedaulatan dari bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang berhasil di bidang politik diplomasi ialah dengan mengirim misi diplomasi ke negara Mesir. Kedatangan misi tersebut membawa hasil yang positif, pemerintah Mesir memberikan dukungan moril dan materiil kepada bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal 23 Maret 1946, pemerintah Mesir memberikan dukungan berupa pernyataan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara *de facto*.<sup>46</sup>

Bukan hanya sampai situ saja, perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang politik diplomasi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 juga berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia. Dimana pada tahun tersebut, bangsa Indonesia mengirim misi haji R.I yang pertama kali. Ibadah Haji sebagai rukun Islam yang ke lima, sejatinya menjadi ibadah yang sakral yang tak pelak dalam ranah politik. Keadalah lah yang menuntut ibadah haji dijadikan sebagai alat politik diplomasi. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ibadah

---

<sup>45</sup> Wildan Insan Fauzi dan Neni Nurmayanti Hasanah, "Diplomat dari Negeri Kata-Kata (Politik Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asia Relatin Conference dan Komisi Tiga Negara)", hlm 112

<sup>46</sup> Suranta Abd. Rahman, "Diplomasi R.I di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947", *Jurnal Wacana*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2007), hlm 154

haji yang semula sebagai peristiwa agama berkembang serta memiliki keterkaitan yang erat dan saling berpengaruh dengan politik. Haji dan politik sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya saling bahu-membahu dalam proses berdirinya bangsa Indonesia. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi satu sama lain.

Pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 ini bukan hanya sekedar melaksanakan serangkain ibadah haji belaka, namun mempunyai tujuan awal untuk menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>47</sup> Indonesia sebagai suatu negara yang menyumbang jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunya. Kesempatan inilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk melakukan tipu daya kepada bangsa Belanda, dengan dalih pelaksanaan ibadah haji agar proses berjalannya diplomasi berjalan lancar dan tidak digagalkan oleh pemerintah Belanda.

Kota Mekah dan Madinah juga merupakan pusat dari ilmu pengetahuan agama. Banyak umat Islam dari Indonesia yang bermukim disana. Mendengar akan datangnya misi haji R.I ke sana, mereka para *mukimin* berbondong-bondong menyambut dengan meriah kedatangan misi haji R.I tersebut. Disana para *mukimin* juga ikut serta dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Sebelumnya, sejak bulai Mei 1942 para *mukimin* mendapatkan tunjangan keungan dari pemerintah Belanda di Jeddah akibat pecahnya perang dunia II.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

<sup>48</sup> Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, hlm 17

Mendengar kabar bahwa bangsa Indonesia memproklamsikan kemerdekaan, para *mukimin* tersebut menolak diberikan tunjangan. Bahkan para *mukimin* segera mengembalikan pas jalan yang dikeluarkan pemerintah Belanda dan tidak mau menerima bantuan dari pemerintah Belanda. Mereka para *mukimin* menjelma menjadi aktivis-aktivis penerangan yang giat menyiarkan berita-berita dari Indonesia. Para *mukim* juga dengan kompak memberikan dan menyatakan dukungan mereka terhadap pemerintahan Republik Indonesia.

### **C. Perubahan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949**

Menghadapi berbagai hal dan rintangan mulai dari pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, dan agresi militer bangsa Belanda, tekanan internal maupun eksternal selama kurang lebih 4 tahun ini, membuat pemerintah Republik Indonesia kuwalahan. Sampai kemudian tercapainya titik terang di perundingan KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949.<sup>49</sup> Bangsa Indonesia mengirim beberapa tokoh delegasi yang terdiri dari: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Satroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodani, Kolonel T.B Simatupang, dan Mr. Soemardi, sedangkan dari bangsa Belanda juga mengirim delegasi yang diketuai oleh Mr. Van Maarseven.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm 82

<sup>50</sup> Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm

Gambar 3.7  
Mohammad Hatta di Konferensi Meja Bundar



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

Adapun tujuan diadakan konferensi KMB ini ialah untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda, dengan cara adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada bangsa Indonesia. Adapun hasil konferensi KMB ialah: bangsa Belanda menyerahkan kedaulatan atas bangsa Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949, mengenai masalah tentang Irian Barat diadakan perundingan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS, antara RIS dan bangsa Belanda akan diadakan hubungan uni Indonesia-Nederland, yang dikepalai raja Belanda.<sup>51</sup>

Diberikannya batasan waktu penyerahan kedaulatan, maka segala sesuatu dalam dunia politik di Indonesia bergerak dengan cepat. Demikian pulalah dengan segera diadakan perubahan ketatanegaraan dengan wujud Republik Indonesia Serikat segera dilaksanakan. Tepat bulan Agustus 1949, berdirilah negara

---

<sup>51</sup> C.S.T Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Inonesia*, hlm 55

Republik Indonesia Serikat atas persetujuan R.I dan negara-negara bagian.<sup>52</sup> Dalam rangka pembentukan RIS, diangkatlah Soekarno sebagai Presiden RIS, yang akan dilantik tanggal 17 Agustus 1949, sedangkan Moh. Hatta ditunjuk sebagai formatur kabinet.<sup>53</sup>

Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat (RIS) berlangsung secara bersamaan di dua tempat. Tanggal 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda, Perdana Menteri RIS Moh. Hatta atas nama pemerintah RIS, menerima kedaulatan dari Ratu Juliana. Di Jakarta, wakil Perdana Menteri RIS, Hamengku Buwono IX menerima kedaulatan dari wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J Lovink.<sup>54</sup>

Gambar 3.8  
Sri Sultan Hamengku Buwono IX Menghadiri Penyerahan Kedaulatan



Sumber: <https://anri.go.id/page/pameran-arsip-virtual-hut-75>

Berdasarkan hasil konferensi meja bundar (KMB) Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pihak Belanda harus

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia Serikat merupakan negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian antara lain: negara Sumatra Timur, negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur dll.

<sup>53</sup> Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Nasional*, hlm 87

<sup>54</sup> Batara R Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, hlm 537

menyerahkan dan menandatangani kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), dari peristiwa tersebut menyebabkan pemerintah Belanda juga harus menyerahkan konsulatnya yang ada di Jeddah kepada Republik Indonesia Serikat. Adanya peristiwa tersebut, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan ibadah haji yang diprakasai sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS).

## **BAB IV**

### **MISI HAJI R.I DAN PERJALANAN IBADAH HAJI YANG DIPRAKARSAI SENDIRI OLEH PEMERINTAH INDONESIA**

Bagi umat Islam Indonesia ibadah haji bukan hanya sekedar melaksanakan ritus keagamaan, melainkan juga bisa dijadikan sebagai alat politik diplomasi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia. Dimana pada tahun tersebut, bangsa Indonesia mengirim misi haji R.I yang pertama kalinya. Misi haji R.I yang pertama kali ini mempunyai tujuan untuk menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai salah satu bentuk usaha memperoleh pengakuan kedaulatan dengan jalan politik diplomasi

Bab ini merupakan inti dari permasalahan dalam penelitian, dimana penulis akan mulai dengan memaparkan tentang peristiwa pemberangkatan misi haji R.I yang pertama kali, lalu dilanjutkan dengan mendeskripsikan tentang pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah Indonesia.

#### **A. Perjalanan Misi Haji R.I Tahun 1948**

##### **1. Latar Belakang Pemberangkatan dan Perjalanan Misi Haji R.I Tahun 1948**

Ditengah kekacaun yang berkecamuk sebagaimana akibat dari konflik eksternal dan internal. Konflik eksternal menghadapi serangkaian genjotan senjata dari bangsa Belanda. Disaat tenaga dan pikiran dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah konflik internal

pemberontakan oleh golongan komunis yang dipimpin oleh Muso, Alimin, dan Amir Syarifuddin.<sup>1</sup> Ditambah lagi bangsa Indonesia juga harus menghadapi serangkaian perundingan dengan bangsa Belanda, yang menjadikan bangsa Indonesia kuwalahan.

Penumpasan terhadap berbagai serangan yang dilancarkan bangsa Belanda dan PKI dilakukan oleh satu kesatuan TNI yang bekerja sama dengan segenap kekuatan rakyat yang masih menginginkan tegaknya Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia juga tidak lupa untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan bangsa Belanda selalu mendengungkan tentang kedaulatan bangsa Indonesia yang belum jelas secara hukum internasional. Oleh karena itu, wakil presiden R.I Mohammad Hatta, menugaskan Menteri Agama yang waktu itu dijabat oleh K.H Masykur agar membentuk sebuah misi haji untuk dikirim ke Mekkah<sup>2</sup> dengan tugas ganda yaitu melaksanakan ibadah haji dan sekaligus menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menindak lanjuti tugas yang diberikan oleh Wakil Presiden R.I tadi, tanggal 19 September 1948 K.H Masykur pergi ke Surakarta menemui K.H Mohammad Adnan. Lawatan ke kediaman K.H Mohammad Adnan tersebut untuk menyampaikan mandat yang diperintahkan Mohammad Hatta untuk mengirim misi haji R.I yang pertama kalinya ke tanah suci, sekaligus menawari K.H

---

<sup>1</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1984), hlm 57

<sup>2</sup> Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, Prof KHR Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam, dalam: <http://digilib.uinsuka.ac.id/12690/1/Mohammad%2520Adnan.pdf> diakses pada 11 September 2020, hlm 31

Mohammad Adnan untuk memimpin misi haji tersebut.<sup>3</sup> Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menetapkan susunan formasi dalam misi haji R.I yang pertama kali: K.H Mohammad Adnan yang waktu itu menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi didapuk sebagai ketua misi haji R.I, Saleh Su'aidy sebagai sekretaris, H. Sjamsir sebagai bendahara dan Ismail Banda sebagai anggota.

Sebelum berangkat ke Mekkah, anggota misi haji R.I terlebih dahulu bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden R.I di Yogyakarta. Bagi bangsa Indonesia, perjalanan misi haji R.I ini memang bukan hanya sekedar melaksanakan serangkaian ibadah haji belaka, melainkan mengandung misi untuk merangkul hubungan diplomatik dari berbagai negara khususnya negara Timur Tengah. Pertemuan tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pesan *“agar misi haji R.I meninjau keadaan orang-orang Indonesia yang bermukim Makkah, beri mereka penerangan seterang-terangnya tentang keadaan bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan dan sampaikanlah rasa terima atas nama rakyat dan pemerintah Republik Indonesia kepada Kepala Negara Arab Saudi Raja Ibn Saud”*. Wakil Presiden R.I Mohammad Hatta juga berpesan *“supaya kita harus meningkatkan perjuangan diplomatik ke negara-negara Timur Tengah, khususnya negara Arab Saudi yang dianggap penting, lalu misi diminta berdoa memohon Kepada Allah SWT, supaya*

---

<sup>3</sup>*Tribun Jogja*, Jamaah Haji Pertama Indonesia Hanya 3 Orang, Berangkat dari Yogya Berbekal Rp.3.500, terbit Selasa, 10 Juli 2018

*bangsa Indonesia mencapai kemenangan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia”<sup>4</sup>.*

Gambar 4.1

Tampak Ketua Misi Haji R.I K.H Mohammad Adnan yang duduk ditengah sedang beramah tamah dengan Presiden Soekarno



Sumber: *Tribun Jogja*, terbit Selasa, 10 Juli 2018

Presiden Soekarno juga menitipkan sebilah keris berhulu emas kepada ketua rombongan misi haji K.H Mohammad Adnan untuk disampaikan kepada Kepala Negara Arab Saudi Raja Ibn Saud, sebagai kenang-kenangan dari rakyat Indonesia. Anggota misi haji R.I juga diberi bekal uang senilai Rp.3.500 dari pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya dengan berbekal uang tersebut, perjalanan misi haji dimulai.<sup>5</sup>

Tepat tanggal 26 September 1948, rombongan misi haji R.I berangkat melalui Bandar Udara Maguwo (sekarang bandara Adisucipto) Yogyakarta. Pemberangkatan misi haji R.I ini dilakukan pukul 02.00 dinihari menuju Kota

---

<sup>4</sup> Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, Prof KHR Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam, dalam: <http://digilib.uinsuka.ac.id/12690/1/Mohammad%2520Adnan.pdf> diakses pada 11 September 2020, hlm 32

<sup>5</sup> *Tribun Jogja*, Jamaah Haji Pertama Indonesia Hanya 3 Orang, Berangkat dari Yogya Berbekal Rp.3.500, terbit Selasa, 10 Juli 2018

Bangkok dengan pesawat carteran milik maskapai penerbangan *Pasific Overseas Airlines Service*.<sup>6</sup> Pemberangkatan yang dilakukan pukul 02.00 dini hari ini, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya serangan dari bangsa Belanda. Waktu itu berpergian menggunakan pesawat terbang bukanlah hal yang mudah, sebab wilayah Indonesia sudah diblokade dari segala jurusan (darat,laut dan udara) oleh bangsa Belanda. Sebelum pemberangkatan misi haji R.I tersebut terdapat insiden pesawat Dakota VT-CLA yang membawa obat-obatan dari Singapura sumbangan Palang Merah Malaya menuju ke Republik Indonesia telah dikejar dan ditembak jatuh oleh pesawat milik Belanda dan akhirnya jatuh Yogyakarta.<sup>7</sup>

Akhirnya atas lindungan Allah SWT, pesawat charteran yang ditumpangi rombongan misi haji R.I tersebut berhasil sampai di Kota Bangkok. Di Kota Bangkok inilah, H. Sjamsir menjual sebongkah berlian milik istrinya yang ia bawa dan hasil penjualannya dipakai untuk membiayai perjalanan misi haji R.I tersebut. Perjalanan misi haji R.I Yogyakarta-Makkah (pulang pergi) sebagian besar biayanya ditanggung oleh H. Sjamsir yang merupakan seorang pengusaha swasta. Awalnya, pemerintah R.I hanya memfasilitasi pesawat terbang carteran sampai ke Bangkok, untuk perjalanan selanjutnya menggunakan biaya pribadi.

Sehari di Bangkok, rombongan misi haji R.I tersebut melanjutkan perjalanannya menuju Makkah. Waktu itu, satu-satunya pesawat terbang yang akan berangkat dengan rute penerbangan ke Timur Tengah hanyalah pesawat K.L.M Belanda, sebuah pesawat milik suatu negara yang sedang menjajah wilayah Indonesia. Disinilah terjadi perdebatan antar anggota misi haji R.I,

---

<sup>6</sup>*Tribun Jogja*, Jamaah Haji Pertama Indonesia Hanya 3 Orang, Berangkat dari Yogya Berbekal Rp.3.500, terbit Selasa, 10 Juli 2018

<sup>7</sup> Ginanjar dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta: PT Gita Karya, 1985), hlm 149

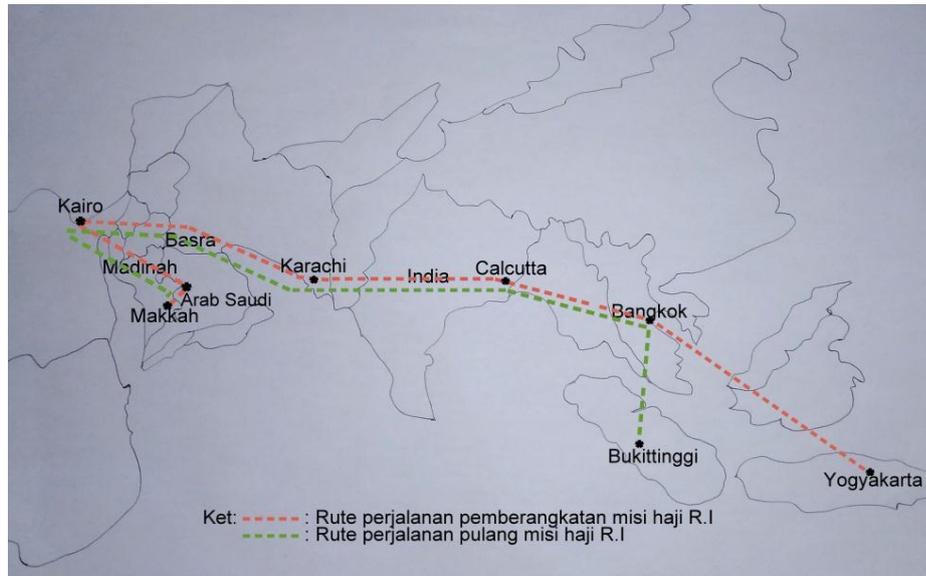
sebagian anggota misi haji R.I tidak mau menggunakan pesawat ini. Tetapi kalau menggunakan pesawat yang lain akan terlambat sampai Makkah karena waktu haji sudah dekat. Akhirnya ketua misi haji R.I, K.H Mohammad Adnan mengambil kebijakan tetap memakai pesawat K.L.M Belanda dengan dalih justru pesawat ini milik Belanda, maka harus kita peralat. Semua anggota misi haji R.I pun sepakat dan puas apa yang dikatakan K.H. Mohammad Adnan (ketua misi haji R.I) tadi.<sup>8</sup>

Hampir semua persyaratan untuk pergi ke luar negeri sudah dipenuhi oleh semua anggota misi haji R.I. misalnya pas jalan yang sudah disertai izin keluar dari negeri keberangkatan, visa juga sudah diperoleh, hanya satu hal yang belum dimiliki oleh anggota misi haji R.I yaitu *Internasional Health Certificate* atau Kartu Kesehatan Internasional, yang menerangkan bahwa pemegang kartu tersebut bebas dari penyakit menular seperti cacar air. Pesawat K.L.M Belanda tidak mau memberangkat apabila tidak memiliki Kartu Kesehatan Internasional. Masalah tersebut bisa segera diatasi, dengan adanya seorang dokter berkebangsaan Vietnam yang penulis tidak ketahui namanya, mau mengulurkan tangannya untuk membuatkan kartu kesehatan. Akhirnya perjalanan misi haji R.I bisa dilanjutkan dengan rute penerbangan dari Bangkok menuju Calcuta, Karachi, Basra dilanjutkan ke Kairo.

---

<sup>8</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

Gambar 4.2  
Peta perjalanan misi haji R.I yang pertama kali



Perjalanannya pun ditempuh cukup lama, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, rombongan misi haji R.I singgah terlebih dahulu ke Mesir. Tepat tanggal 6 Oktober 1948 rombongan misi haji R.I sudah sampai Bandar Udara Farouk, Kairo, Mesir. Rombongan misi haji R.I kemudian disambut oleh sejumlah umat Islam Indonesia yang bermukim disana dan sejumlah mahasiswa yang sedang menuntut ilmu disana. Di Kota Kairo inilah, rombongan misi haji menyempatkan diri untuk berbelanja sejumlah pakaian. Waktu itu, mereka hanya mengenakan pakaian yang amat sederhana hanya baju drill dan sepatu karet mentah yang masih melekat ditubuh anggota misi haji R.I tersebut. Di Kota Kairo inilah mereka membeli satu stel pakaian woll, sepatu dll.<sup>9</sup> Rombongan misi haji R.I hanya singgah semalam di Kota Kairo untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Arab Saudi.

---

<sup>9</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1948

Gambar 4.3  
Rombongan misi haji di sambut di Bandar Udara Farouk, Kairo, Tampak Ketua Misi Haji R.I  
Menggenakan Jas Bermantel



Sumber: Kabar Washliyah, *Fakta Sejarah, Peran Al Washliyah Dalam Misi Haji dan Kemerdekaan*, terbit Senin, 27 Juni 2015

Perjalanan pun dilanjutkan ke Arab Saudi, sesampainya di Arab Saudi rombongan misi haji R.I amat terharu ketika kedatangannya disambut dengan meriah oleh rakyat Indonesia yang bermukim disana. Mereka memekikan sebuah kata “*merdeka, merdeka, merdeka!!! Jaiz Jumhuriyah Indonesia*”. Pasca mendengar kabar tentang kemerdekaan Republik Indonesia, mereka para rakyat Indonesia yang bermukim di Arab Saudi segera mengembalikan pas jalan buatan Pemerintah Belanda. Mereka juga tidak mau menerima bantuan dari bangsa Belanda. Saat itu tercatat ada sekitar 3000 *mukimin* Indonesia yang ada disana. Kebanyakan para *mukimin* menetap disana disebabkan karena terputusnya hubungan dengan keluarga, ada juga yang karena sedang menuntut ilmu.<sup>10</sup>

Sesampainya di Arab Saudi, rombongan misi haji R.I langsung berkunjung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Rombongan misi haji R.I diterima sebagai tamu negara oleh pemerintah Arab Saudi. Dari kementerian Luar Negeri Arab Saudi, rombongan misi haji R.I melanjutkan perjalanannya menuju ke

---

<sup>10</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

Makkah. Rombongan misi haji R.I kemudian mengunjungi perkumpulan para *mukimin* di Umuddud dan Jarwal. Disana mereka disambut oleh H. Rosjidi dan istrinya beserta para *mukimin* dengan semangat dan disertai pekik “*merdeka*” yang terus diucapkan. H. Rosjidi merupakan salah satu putra bangsa yang sudah lama berdiam di Kairo yang kemudian diangkat sebagai Wakil Tetap Indonesia di Mesir dan negara-negara Arab.

Tanggal 10 Oktober 1948 rombongan misi haji R.I ditemani oleh H. Rosjidi melakukan kunjungan resmi kepada Kepala Negara Arab Saudi, Raja Ibn Saud di istana negaranya di Makkah. Saat itu bersamaan dengan beberapa orang dari Mesir dan Syria yang hendak menemui Raja Ibn Saud, tetapi hampir seluruh waktu Raja Ibn Saud diperuntukkan untuk rombongan misi haji R.I. Raja Ibn Saud menerima kedatangan rombongan misi haji R.I dengan hangat, bahkan Raja Ibn Saud juga duduk berdampingan dengan ketua misi haji R.I K.H Mohammad Adnan.

Temu wicara dengan Raja Ibn Saud ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh rombongan misi haji R.I, dalam pertemuan tersebut disampaikan salam dari pemerintah dan rakyat Indonesia dan amanat yang dipesankan oleh Presiden dan Wakil Presiden R.I tadi. Dalam pertemuan tersebut ketua misi haji R.I juga menyampaikan amanat dari Pesiden Soekarno, untuk memberikan sebilah keris yang berhulu emas sebagai tanda persahabatan kepada Raja Ibn Saud. Kemudian Raja Ibn Saud mengamati dengan seksama keris tersebut, sambil “*mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya*”. Raja Ibn Saud kemudian memberikan pesan “*agar mengajak seluruh umat untuk bersatu mengusir penjajah yang menguasai negara-negara Islam dengan mengutip ayat Al-qur’an yang artinya Janganlah*

*engkau bertengkar wahai kaum muslimin sebab pertengkaran diantaramu akan mengakibatkan kelelahan dan hilangnya kehormatanmu*".<sup>11</sup> Pertemuan dengan Raja Ibn Saud berlangsung kurang lebih selama 20 menit, setelah itu rombongan misi haji R.I izin diri untuk pamit kembali ke padepokan.

Tanggal 15 Oktober 1948, rombongan misi haji R.I mendirikan kemah-kemah di Mina, pendirian kemah-kemah tersebut berdampingan dengan kemah-kemah jajaran korps Diplomatik negara-negara Islam. Dilihat tinjauan dari kaca mata sekarang, kegiatan seperti ini tampaknya biasa saja, tetapi di masa Republik Indonesia yang masih tahap survival, disejajarkan dengan negara lain yang sudah lama diakui sebagai negara berdaulat mempunyai arti tersendiri.<sup>12</sup> Kedatangan rombongan misi haji R.I ini juga mendapat perhatian dari jamaah haji NICA.<sup>13</sup> Mereka para haji NICA tak putus-putus untuk mendatangi kemah rombongan misi haji R.I, selain menghadap Raja Ibn Saud, kegiatan diplomatik rombongan misi haji R.I juga dilakukan dengan mendatangi kemah-kemah kedutaan negara-negara Islam seperti Mesir, Libanon, Syria, Irak, Pakistan dsb.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968.

<sup>12</sup>*NU Online*, Peristiwa Monumental Bendera Merah Putih Berkibar di Arafah, terbit Sabtu, 2 September 2017, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/80929/peristiwa-monumental-bendera-merah-putih-berkibar-di-arafah> diakses pada tanggal 14 September 2020

<sup>13</sup> Sebutan jamaah haji yang berhasil berangkat pada tahun 1946-1949 dari wilayah yang dikuasai oleh bangsa Belanda

<sup>14</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

Gambar 4.4  
Misi Hadji R.I jang Pertama



Sumber: Koran *Patria*, terbit 1 Oktober 1968

Tanggal 18 Oktober 1948 bertepatan dengan 9 Dzullhijjah, yang merupakan puncak ibadah haji. Rombongan misi haji R.I menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Di Padang Arafah sinilah diadakan pertemuan dengan orang-orang Indonesia yang berjumlah kurang lebih 500 orang. Rombongan misi haji R.I memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam pertemuan tersebut. Rombongan misi haji R.I melaksanakan tugasnya, dengan memberikan penerangan seluas-luasnya, mengenai perjuangan bangsa Indonesia, agar mendapatkan dukungan dari mereka, selain itu di Padang Arafah inilah terjadi peristiwa monumental, peristiwa tersebut saat rombongan misi haji mengibarkan bendera merah putih, bendera kebangsaan Republik Indonesia. Di Jabal Rahman, ketua misi haji R.I K.H Mohammad Adnan memimpin doa: *Labbaik! Allahuma Labbaik! Ya, Allah! Kami datang ke hadapan-Mu, untuk*

*memohon. Berikan kami, bangsa Indonesia kemenangan dalam menegakkan kemerdekaan.*<sup>15</sup>

Tanggal 21 Oktober 1948, rombongan misi haji R.I berkunjung ke berbagai tempat, dan para tokoh agama dan politik serta orang-orang penting lainnya. Diantara kunjung yang paling menohok ialah ketika berkunjung ke Hasan el-Banna pemimpin mursyid al-‘am Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Tanggal 23 Oktober 1948, rombongan misi haji menghadap lagi kepada Raja Ibn Saud untuk memohon diri kembali ke Indonesia.

Waktu perjalanan pulang ke Indonesia, rombongan misi haji R.I singgah terlebih dahulu di Mesir. Rombongan misi haji R.I singgah selama 13 hari sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia.<sup>16</sup> Di Mesir, rombongan misi haji juga menemui berbagai tokoh dan para rakyat Indonesia yang bermukim di sana. Kepada para tokoh pemimpin pemerintahan yang dapat ditemui disana, disampaikanlah pesan-pesan dari Presiden Republik Indonesia. Diantara tokoh-tokoh yang bisa ditemui ialah Rektor Jami’ah Al-Azhar. Kepada rakyat Indonesia yang bermukim di Mesir, rombongan misi haji juga menjelaskan tentang keadaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, dan perjuangan rakyat Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan. Di Mesir inilah salah satu anggota misi haji R.I yang bernama Ismail Banda memutuskan untuk tetap tinggal, tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Indonesia.

---

<sup>15</sup>*NU Online*, Peristiwa Monumental Bendera Merah Putih Berkibar di Arafah, terbit Sabtu, 2 September 2017, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/80929/peristiwa-monumental-bendera-merah-putih-berkibar-di-arafah> diakses pada tanggal 14 September 2020

<sup>16</sup> *Ibid*

Perjalanan pulang rombongan misi haji R.I pun dilanjutkan. Ketika rombongan misi haji R.I ini pulang tidak lantas langsung meneruskan pulang di daerah masing-masing. Perjalanan pulang rombongan misi haji R.I harus dilalui dengan susah payah. Rombongan misi haji R.I harus singgah sekali lagi di Bangkok. Di Kota Bangkok ini rombongan misi haji R.I singgah selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Di Kota Bangkok ini, rombongan misi haji R.I menunggu kedatangan pesawat penumpang R.I Seuwalah yang berkode RI 001, yang dibeli rakyat Aceh untuk perjuangan menegakkan kemerdekaan. Pesawat Seuwalah yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Akhirnya lewat bantuan maskapai penerbangan Muang Thai, rombongan misi haji R.I diterbangkan menuju Sumatra tepatnya di Pekanbaru.<sup>17</sup> Sesampainya di Pekanbaru, rombongan haji kemudian menemui Syafruddin Prawiranegara yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kesemakmuran di Bukittinggi.

Saat itu situasi Republik Indonesia pada bulan Desember 1948 semakin gawat. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan aksi serangan Agresi Militer ke-II nya. Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatra ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)<sup>18</sup>, saat itu juga PDRI memerintahkan rombongan misi haji R.I untuk hijrah ke daerah yang aman atau ikut bergabung dengan PDRI bergerilya di hutan.

Salah satu anggota misi haji R.I H. Sjamsir mengusulkan agar rombongan misi haji R.I ke kampungnya yang berada di desa Guguk, kurang lebih 25 km dari Bukittinggi. Waktu itu, rombongan misi haji R.I memutuskan memilih usulan dari

---

<sup>17</sup>Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

<sup>18</sup> Ginanjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hlm 192

H. Sjamsir, sementara Saleh Su'ady memutuskan untuk kembali ke kampungnya sendiri. Sementara K.H Mohammad Adnan yang satu-satunya anggota misi haji R.I yang berasal dari Jawa tinggal bersama keluarga H. Sjamsir di desa Guguk. Sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali pulang ke Jawa, K.H Mohammad Adnan mengisi hari-harinya dengan berdakwah dan mengajar di surau-surau. Hampir selama kurang lebih 4 bulan K.H Mohammad Adnan tinggal bersama keluarga H. Sjamsir.

Atas izin dari pemerintah Belanda di Bukittinggi, K.H Mohammad Adnan diperbolehkan pulang ke Surakarta. Sesampainya di Jakarta K.H Mohammad Adnan diperintahkan melapor kepada pejabat *Adviseur voor Inlandse Zaken*. Disinilah K.H Mohammad Adnan dibujuk oleh pemerintah Belanda untuk menjabat ketua Mahkamah Islam Tinggi dalam pemerintah federasi sementara (Pemerintah boneka buatan Belanda), namun dengan nada yang halus K.H Mohammad Adnan menolaknya. K.H Mohammad Adnan kemudian diperbolehkan pulang ke Solo melalui Semarang.<sup>19</sup>

Saat itu suasana di Kota Solo masih dalam keadaan genting. Jam malam pun masih berlaku. Tentara KNIL terus menghadapi perlawanan gerilyawan R.I yang sangat sengit. Rumah K.H Mohammad Adnan yang sering disinggahi para gerilyawan pun ketahuan. Terjadilah pembersihan besar-besaran dan penggeledahan yang dilakukan tentara KNIL dari rumah ke rumah, bahkan termasuk Masjid Agung Surakarta. Penggeledahan inilah ditemukan baret, sarung

---

<sup>19</sup> Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, Prof KHR Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam, dalam: <http://digilib.uinsuka.ac.id/12690/1/Mohammad%2520Adnan.pdf> diakses pada 11 September 2020, hlm 40

pistol dan selongsong peluru di kediaman mertua K.H Mohammad Adnan, dengan adanya hal ini menyebabkan K.H Mohammad Adnan ditahan.<sup>20</sup>

## **2. Hasil Positif Pemberangkatan Misi Haji R.I dan Respon Pemerintah Belanda Terhadap Pemberangkatan Misi Haji R.I tahun 1948**

Bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pemberangkatan misi haji R.I menuai banyak hasil positif. Mereka anggota misi haji R.I merupakan orang-orang pilihan. Mereka terdiri dari berbagai unsur, orang yang dihormati, disegani, berwibawa dan orang yang memiliki keilmuan pada bidangnya masing-masing. Kualitas ilmu dan imannya pun tentu diatas rata-rata. Itulah sebabnya mengapa misi haji itu berjalan sesuai dengan yang diamanahkan.

Hasil positif yang timbul dari pemberangkatan misi haji R.I ini ialah dengan medekatnya negara-negara Arab dan dunia Islam kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta menjauhkannya dari hasutan yang dilancarkan bangsa Belanda. Secara politis pemberangkatan misi haji R.I ini menggugah simpati negara-negara Islam, sehingga baik *de facto* maupun *de jure* mereka mengakui kedaulatan Republik Indonesia

Kesempatan itu juga digunakan oleh salah satu anggota misi haji R.I Ismail Banda untuk berorasi melalui media pers Arab Saudi memperkenalkan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme bangsa Belanda.<sup>21</sup> Selama bangsa Belanda melakukan agresi militer ke keduanya di wilayah

---

<sup>20</sup> Ibd., hlm 40

<sup>21</sup>Kabar Washliyah, *Fakta Sejarah, Peran Al Washliyah Dalam Misi Haji dan Kemerdekaan*, terbit Senin, 27 Juni 2015 dalam <http://kabarwashliyah.com/2015/07/27/fakta-sejarah-peran-al-washliyah-dalam-misi-haji-dan-kemerdekaan/>

Republik Indonesia pesawat milik Belanda di boikot dan dilarang mendarat di wilayah Arab Saudi oleh pemerintah.

Mendengar kabar tentang pemberangkatan misi haji R.I, pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Pemerintah Belanda pun juga mengirim sebuah misi haji dari negara Indonesia Timur<sup>22</sup>. Propaganda dari negara-negara boneka buatan Belanda itu, sengaja dikirim ke Mekkah seperti Alamudi dan Almusawa. Mereka para anggota misi haji dari negara Indonesia Timur malah dimaki-maki dan dilempari batu.<sup>23</sup> Pemerintah Arab Saudi hanya mengakui Pas jalan atau pasport dari Republik Indonesia dan pasport NICA/Belanda ditolak. Misi haji buatan Belanda tidak mendapat perhatian dan tidak diberin pintu oleh pemerintah Arab Saudi dan umat Islam lainnya, sebab jelas bentuknya adalah misi Dhairaan dari kaum kafir<sup>24</sup>

## **B. Perjalanan Ibadah Haji Yang Diprakarsai Oleh Pemerintah Indonesia tahun 1950**

### **1. Mengandeng Yayasan PHI dalam Pemberangkatan Ibadah Haji**

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), bangsa Belanda harus menyerahkan dan menandatangani kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), dari peristiwa inilah dimulai babak baru penyelenggaraan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS. Pasca diadakannya penyerahan dan penandatanganan pengakuan kedaulatan dari bangsa Belanda, Menteri Agama

---

<sup>22</sup> Negara Indonesia Timur merupakan sebuah negara boneka pertama yang dibentuk oleh Belanda. Pembentukan negara ini didasarkan pada Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar, akhirnya diputuskan jika wilayah Negara Indonesia Timur meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil dan Kepulauan Maluku.

<sup>23</sup> Koran *Patria*, Misi Hadji R.I jang Pertama, terbit tanggal 1 Oktober 1968

<sup>24</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 59

yang waktu itu dijabat oleh K.H Wahid Hasjim meletakkan beberapa dasar dalam kebijakan Kementerian Agama RIS. Salah satunya ialah dengan merubah politik keagamaan sistem kolonial ke dalam politik keagamaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan keagamaan disegala bidang kehidupan masyarakat.

Segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab dalam penyusunan ibadah haji disesuaikan dengan derajat bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sejak itulah segala urusan mengenai ibadah haji diurus dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk pertama kalinya sejak Republik Indonesia merdeka, secara resmi penyelenggaraan ibadah haji diprakarsai sendiri oleh Kementerian Agama dimulai pada tahun 1950. Kementerian Agama juga membentuk badan khusus dalam menyelenggarakan ibadah haji. Badan khusus dalam Kementerian Agama tersebut dikepalai oleh R.H Soeridialaga dan sebagai pembantunya rdO. Hidayat.<sup>25</sup> Menangani segala hal tentang ibadah haji, pemerintah Indonesia masih mengira-ngira bagaimana cara pelaksanaan ibadah haji, sebab selama ini yang menyelenggarakan ibadah haji adalah pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk dan pedoman selain dari peraturan *Odronansi Haji* yang dikeluarkan pemerintah Belanda.

Pemerintah Republik Indonesia Serikat dalam hal menangani urusan ibadah haji juga menggandeng Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI/PHI) yang didirikan pada tanggal 21 Januari 1950. PHI ini merupakan

---

<sup>25</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 63-64

hasil keputusan sidang dari Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI).<sup>26</sup> Adapun susunan kepengurusannya diketuai oleh K.H Sudjak, wakil ketua K.H Wahab Hasbullah<sup>27</sup>. Sebenarnya, sejak zaman pendudukan kolonialisme umat Islam Nusantara sudah berkeinginan mempunyai kapal sendiri, untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji, namun selama masa pendudukan kolonialisme keinginan tersebut tidak terwujud.

Pasca Republik Indonesia merdeka usaha ini pun dilanjutkan kembali, dalam melanjutkan cita-cita perbaikan perjalanan haji, K.H Sudjak, KH Wahab Hasbullah, dan H. Saleh Suaidy selaku utusan dari kongres Muslimin Indonesia menghadap Menteri Agama untuk membicarakan tentang pembentukan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji dan masalah-masalah yang berkenaan dengan urusan haji.

Tujuan didirikannya PHI ini untuk mengatur menyelenggarakan dan mengawasi perjalanan haji Indonesia agar selaras dengan tuntutan agama dan negara. Adapun tugas-tugas yang dibebankan kepada PHI ini merupakan tugas-tugas yang sifatnya sosial dan kemasyarakatan. Langkah awal dalam memulai perbaikan perjalanan ibadah haji ialah dengan memutuskan jaringan pemerasan dan tidak memberi izin lagi bagi *syech-syech* atau *badal-badal* maupun sejenisnya melakukan operasi di Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm 66

<sup>27</sup> Untuk mengetahui lebih lengkap putusan Badan Kongres Muslimin Indonesia lihat lampiran

<sup>28</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 68

Adapun penyelenggaraan haji yang dilaksanakan oleh PHI dilakukan disetiap karasidenan (pemerintah daerah).<sup>29</sup> PHI sebagai wadah resmi untuk memberangkatkan ibadah haji, menetapkan wakilnya diberbagai tempat. PHI menempatkan wakilnya di kota pelabuhan besar sebagai tempat kedatangan umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Saat itu juga PHI juga membentuk suatu paitia yang bernama Majelis Pimpinan Haji (kini Tim Petugas Haji Indonesia). MPH ini dibentuk dengan maksud untuk melatih para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji serta memberi petunjuk selama perjalanan, melayani jamaah haji, mengawasi dan memimpin rombongan jamaah haji.<sup>30</sup> MPH juga sebagai penghubung antara jamaah haji dengan perwira kapal selama perjalanan pulang pergi. PHI juga membentuk Rombongan Kesehatan Indonesia (yang kini menjadi Tim Kesehatan Indonesia). RKI ini terdiri atas sejumlah dokter dan perawat untuk menjaga kesehatan jamaah haji.<sup>31</sup>

Tentang kedudukan PHI dalam penyelenggaraan urusan haji dijelaskan dengan surat Kementerian Agama No. 3170 yang ditanda tangani sendiri oleh Menteri Agama K.H Wahid Hasyim. Sebelum itu, dengan adanya surat keputusan Menteri Agama RIS tanggal 6 Februari 1950 No. 9 dan surat edaran Menteri Agama R.I di Yogyakarta No. AIII/1/648 tanggal 9 Februari 1950 dan bertitik tolak pada Keputusan Dewan Menteri RIS dalam rapatnya tanggal 8 Februari 1950, masalah haji menjadi kompetisi Kementrian Agama dan menunjuk Yayasan PHI sebagai satu-satunya wadah yang sah yang bekerja bersama instansi-instansi pemerintah untuk mengatur, melaksanakan dan mengawasi perjalanan haji.

---

<sup>29</sup> Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 26

<sup>30</sup> Delia Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm 105

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 106

Pelaksanaan tugasnya, PHI berada dibawah pengawasan dan atas petunjuk Kementerian Agama serta perlindungan dari pamongpraja.<sup>32</sup>

Sama seperti halnya yang dihadapi pemerintah Belanda di masa lalu, pemerintah RIS dan PHI harus menghadapi kenyataan bahwa minat umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji cukuplah tinggi. Begitu pula di tahun pertama dalam menyelenggarakan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS. Jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar ibadah haji waktu itu cukuplah besar. Akibatnya pemerintah kesulitan akomodasi dan kekurangan valuta asing, sehingga menyebabkan pemerintah memperkenalkan sistem kuota haji. Sistem kuota adalah jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah berdasarkan minat umat Islam disuatu wilayah untuk melaksanakan ibadah haji dengan pertimbangan skala prioritas.<sup>33</sup>

Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A/III/1110 Tahun 1950 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah RIS menetapkan sistem kuota. Faktor yang *pertama* yaitu kurangnya *devizen* (alat pembayaran di luar negeri) negara untuk keberangkatan jamaah haji yang cukup banyak. Adapun faktor yang *kedua* yaitu pembatasan jumlah jumlah jamaah haji dari pemerintah Arab Saudi.<sup>34</sup> Penetapan kuota haji ini merupakan wewenang dari kementerian Agama RIS berdasarkan minat calon jamaah haji tiap daerah atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan skala prioritas.

---

<sup>32</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 67

<sup>33</sup> Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, hlm 27

<sup>34</sup> Untuk mengetahui lebih lengkap dari Surat Edaran Menteri Agama RIS lihat Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 78-79

Penetapan jumlah kuota oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk: *Pertama* kuota dapat dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang peminat ibadah hajinya tinggi/rendah secara adil. *Kedua*, penyesuaian kuota dapat direncanakan secara tepat sehingga memudahkan pemberangkatan tiap-tiap pelabuhan. *Ketiga*, menjaga agar kuota tidak sampai terbuang sebab didaerah tertentu ada yang kekurangan dan di daerah lain ada yang kelebihan. *Keempat* untuk mengontrol agar tidak terjadinya jual beli jumlah kuota.<sup>35</sup>

Tabel 2  
Jumlah Quotum Jemaah Haji Indonesia tahun 1950

Nama Daerah	Jumlah Quotum
Provinsi Jawa Barat	2.750 orang
Provinsi Jawa Tengah	1.650 orang
Provinsi Jawa Timur	2.300 orang
Provinsi Sumatra Utara	400 orang
Provinsi Sumatra Tengah	250 orang
Provinsi Sumatra Selatan	400 orang
Kalimantan	700 orang
Sulawesi	800 orang
Maluku	100 orang
Sunda Kecil	500 orang
Cadangan	150 orang
Jumlah	10.000 orang

Sumber: Lampiran Surat Edaran Kementerian Agama No. III/I/1606 tahun 1950 tentang jumlah quotum haji haji tahun 1950

Tahun 1950 merupakan tahun pertama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS dengan sistem kuota. Jumlah kuota yang ditetapkan pada tahun tersebut berjumlah 10.000 jamaah. Sedangkan jumlah jamaah yang mendaftar ibadah haji pada tahun tersebut sejumlah 20.000 orang. Akibatnya banyak calon jamaah haji harus rela untuk menunggu keberangkatannya tahun depan. Jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun 1950 ini sejumlah

---

<sup>35</sup> Achmad Nizam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*, hlm 27

9.892 jamaah.<sup>36</sup> Tahun pertama dalam pemberangkatan ibadah haji ini juga disertai rombongan kesehatan Indonesia (RKI) berjumlah 14 orang<sup>37</sup> yang diketuai oleh DR. H Ali Akbar, Drs Sanusi Galbi, Dr Admiral dan Dr H Karmawan.<sup>38</sup> Disamping itu, juga disertai dengan petugas pembimbing haji (MPH) yang berjumlah 27 orang.<sup>39</sup>

Perjalanan ibadah haji bukanlah perjalanan yang mudah. Pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1950 masih menggunakan kapal. Bagi bangsa Indonesia bangsa yang baru merdeka, menyediakan kapal untuk mengangkut jamaah haji bukan pekerjaan yang mudah. Karena selama ini pengangkutan jamaah haji asal Indonesia menggunakan kapal Belanda yang disebut dengan *Kongsi Tiga*. Sebelum memutuskan menggunakan kapal dari Kongsi Tiga, pemerintah RIS berupaya dalam pemberangkatan ibadah haji pada tahun ini menggunakan pesawat.

Akan tetapi upaya tersebut menghadapi kendala, Kementerian Agama mendapat kabar bahwasannya Pemerintah Saudi Arab akan menolak semua jamaah haji yang menggunakan pesawat yang datang dari jurusan timur, melalui India dan Pakistan Timur. Salah satu faktor yang menyebabkan Pemerintah Saudi Arabia mengeluarkan keputusan tersebut ialah karena pada saat itu banyak wabah

---

<sup>36</sup> Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, *Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji di Indonesia*

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Sumur Harapan dan Murdisi, *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*, hlm 73

<sup>39</sup> Total jumlah jamaah haji yang berangkat adalah 9.892 jamaah haji + 14 orang RKI + 27 orang MPH = 9.933 jamaah. Sedangkan 67 dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 10.000 tidak diketahui dan tidak ada catatan apakah calon jamaah haji berangkat atau tidak. Dilihat dari data ini berarti setiap 1 orang RKI bertanggung jawab atas kesehatan 707 jamaah haji, begitu pula setiap 1 orang MPH harus memimpin sekitar 366 jamaah haji

penyakit cholera atau tha'un.<sup>40</sup> Karena itu, pemerintah RIS tetap menggunakan Kongsi Tiga untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. Adapaun kapal-kapal yang dipakai untuk mengangkut jamaah haji pada tahun 1950 berjumlah 9 buah kapal yaitu: kapal Agung, kapal Baroe, kapal Arakan, kapal Laertes, kapal Tawali, kapal Talise, kapal Tabian, kapal Tyndarus.

Gambar 4.5  
Suasana di Pelabuhan Tanjung Priok Sebelum Keberangkatan Menuju Tanah Suci



Sumber: Twitter @Kemenag\_RI



Sumber: Facebook Arsip Nasional Republik Indonesia

Mengenai proses keberangkatan, pemerintah RIS menetapkan 10 pelabuhan yang digunakan untuk pelabuhan haji, adapun nama-nama pelabuhannya sebagai berikut: pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Semarang, pelabuhan Surabaya, pelabuhan Apeman, pelabuhan Bima, pelabuhan Makasar, pelabuhan Padang, pelabuhan Palembang, pelabuhan Belawan dan pelabuhan Banjarmasin.<sup>41</sup> Pemberangkatan ibadah haji Indonesia yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS dimulai pada tanggal 10 Juli 1950, dengan diberangkatnya kapal Agung menuju ke Jeddah dari pelabuhan Tanjung Priok.

<sup>40</sup> Koran *Suara Rakyat*, Perjalanan Hadji Dengan Kapal Terbang Terhalang, terbit 12 September 1950

<sup>41</sup> Untuk lebih lanjut lihat lampiran. Arsip, *Maklumat Kapal Haji Kongsi Tiga*

Keberangkatannya pun disaksikan oleh Menteri Agama K.H Wahid Hasjim beserta rombongan.

Gambar 4.6  
Susasana Keberangkatan Jamaah Haji Indonesia di Tanjung Priok, tampak Menteri Agama Wahid Hayim Melepas Kepergian Jamaah haji Indonesia di Tanjung Priok



Sumber: Twitter @Kemenag\_RI

Mengenai ongkos naik haji, pembayaran ongkos naik haji dibayarkan melalui bank Rakyat Indonesia (BRI). Pembayaran ongkos naik haji ini juga termasuk pembayaran ongkos kapal *Kongsi Tiga*, selain untuk para calon jamaah haji juga dikenakan biaya tambahan untuk membut pas jalas atau paspor. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar para jamaah haji pada tahun 1950 sebesar Rp. 3.395.<sup>42</sup> Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut: Biaya passage pulang-pergi, biaya karantina di Indonesia, biaya penghidupan di tanah suci dan ongkos perjalanan Jedaah-Mekkah p.p, Arafat-Mina p.p, berziarah ke Madinah dan untuk keperluan sehari-hari lainnya, biaya bea pemerintah Saudi Arabia dll.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, *Data Statistik Jumlah Wafat, Ghoib, Kelahiran, Petugas, Biaya, Penyelenggara, Regulasi Biaya Jamaah Haji Indonesia Tahun 1950 sampai dengan 2018*

<sup>43</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perincian pembayaran ibadah haji tahun 1950 lihat lampiran, Arsip, *Tarif Perongkosan Perjalanan Haji tahun 1950/1363 H*

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1950 ini juga banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Waktu itu banyak terjadi beberapa PHI tingkat daerah telah memungut uang yang tidak termasuk perongkosan biaya dalam perjalanan ibadah haji. Menurut peraturan yang telah dikeluarkan Kementerian Agama, seluruh anggota PHI sekali-kali tidak diperbolehkan menerima, penyerahan ataupun penitipan uang dari calon jamaah haji. Tetapi walaupun demikian masih ada pemungutan yang terjadi di beberapa daerah seperti: Semarang, Bandung, Madura, Surakarta dan Tegal yang telah melakukan pemungutan sokongan sukarela.<sup>44</sup>

Mendengar akan halnya laporan tersebut, Kementerian Agama menganjurkan kepada PHI tingkat daerah guna melakukan tindakan korektif dan pembersihan. Untuk mewujudkan tindakan korektif yang dimaksud pihak Kementerian Agama melakukan cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, mengusahakan agar pemungutan-pemungutan tidak jelas itu dikembalikan di bawah pengawasan pejabat agama dan pamongpraja kepada jamaah-jamaah yang berkepentingan kelak. *Kedua*, mengusulkan kepada PHI pusat, agar melaksanakan pembubaran dari PHI cabang dan dapat disusun secara baru. *Ketiga*, dimana perlu adanya usulan tentang penuntutan terhadap orang-orang yang nyata-nyata menipu, berbuat curang dan mengambil suap. *Keempat*, selain itu Kementerian Agama mengumumkan pula, bahwa para jamaah haji berhak menuntut pembayaran kembali dari yang bersangkutan mengenai semua pemungutan-pemungutan yang tidak disahkan oleh Kementerian Agama.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Koran *Merdeka*, Ketjurangan dlm. Pemungutan Perongkosan Naik Hadji, terbit 7 Oktober 1950

<sup>45</sup> *Ibid.*,

Gambar 4.7  
Kecurangan Pemungutan Perongkosan Naik Hadji Dilakukan PHI daerah



Sumber: Koran *Merdeka*, terbit 7 Oktober 1950

Adapun jumlah jamaah yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1950 sejumlah 320 jamaah.<sup>46</sup> Sebagaimana akibat dari udara yang sangat panas di Arab Saudi, hampir 50% jamaah haji Indonesia terkena penyakit panas. Mula-mula para jamaah haji merasakan tubuhnya panas disertai dengan mual-mual, kemudian disusul dengan perasaan leih. Ketika wukuf di Arafah tiba-tiba turunlah hujan es sebesar-besar klereng dan disertai pula angin dasyat.<sup>47</sup>

Gambar 4.8  
Jamaah haji Indonesia yang Meninggal dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1950



Sumber: Koran *Merdeka*, terbit 6 Oktober 1950 dan Koran *Merdeka* 23 September 1950

<sup>46</sup> Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, *Data Statistik Jumlah Wafat, Ghoib, Kelahiran, Petugas, Biaya, Penyelenggara, Regulasi Biaya Jamaah Haji Indonesia Tahun 1950 sampai dengan 2018*

<sup>47</sup> Koran *Merdeka*, Kira-kira 2% Djemaah Hadji Meninggal di Tanah Sutji, terbit 6 Oktober 1950

Mengenai pemulangan jamaah haji Indonesia, tepat pada hari Senin tanggal 2 Oktober 1950 sore, rombongan pertama dari jamaah haji Indonesia mulai kembali ke Tanah Air dengan menggunakan kapal Leartes. Rombongan terakhir direncanakan akan bertolak pulang ke Tanah Air pada tanggal 2 November 1950 dengan menggunakan kapal pengangkut haji Tawali. Jamaah haji Indonesia semuanya sudah menyelesaikan ibadah hajinya dan kini sebagian dari mereka hanya tengah menunggu giliran pemulangan ke Tanah Air.<sup>48</sup>

## **2. Tragedi Tertinggalnya 800 Jamaah Haji di Tanjung Priok tahun 1950**

Ditunjuknya PHI sebagai wadah resmi untuk menyelenggarakan ibadah haji oleh Pemerintah RIS, maka hal itu tidak memungkinkan para *broker* atau *badal syech* untuk melakukan kegiatannya. Sehingga menjadi putuslah hubungan antara para *badal haj*, tengkulak haji atau para *broker* dengan pihak *Kongsi Tiga*, serta para *badal syech* dengan *syechnya* di Makkah. Walaupun pada hakikatnya praktek-praktek mereka sampai saat ini pun masih berlangsung, tetapi tidak secara terang-terangan dan terbatas.

Tak terkecuali pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1950, dimana dalam pelaksanaan ibadah haji yang diprakarsai oleh pemerintah RIS ini terjadi tragedi tertinggalnya kurang lebih 800 jamaah haji Indonesia di Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan sebagai pelabuhan untuk keberangkatan jamaah haji Indonesia ke Jeddah. Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama dalam pemberangkatan jamaah haji Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok melayani jamaah haji dari berbagai wilayah seperti: Jawa Barat, Jakarta dan Banten. 800

---

<sup>48</sup> Koran *Merdeka*, Kira-kira 2% Djemaah Hadji Meninggal di Tanah Sutji, terbit 6 Oktober 1950

jamaah haji yang gagal berangkat tersebut bernaung dalam suatu wadah yang mengatasnakan dirinya sebagai BPDHI (Badan Penolong Djamaah Hadji Indonesia) yang notabennya sebagai wadah ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Akan tetapi pihak BPDHI menyangkal, bahwasannya yang tertinggal dan terlantar dipelabuhan Tanjung Priok hanyalah kurang lebih 50 jamaah saja.<sup>49</sup>

Sebab-sebab yang menjadikan 800 jamaah haji itu ketinggalan di Tanjung Priok dikarena kesalahan dari BPDHI. Penuturan dari calon jamaah haji yang tertinggal tersebut menyebutkan bahwa pada bulan Mei 1950, BPDHI telah dinasehati agar bekerja sama dengan PHI yang diakui pemerintah sebagai wadah resmi pemberangkatan haji Indonesia. Nasehat itu ditolak oleh BPDHI dan akan berupaya bekerja sekeras tenaga untuk memberangkatkan jamaah haji secara mandiri. Selain itu BPDHI juga sudah disarankan oleh Kementerian Agama supaya bekerja sama dengan PHI, tetapi sekali lagi nasihat ini ditolak oleh mereka. BPDHI bersangka bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dengan mudah.

Adanya nasihat tersebut tidak menggoyahkan niat BPDHI untuk menyelenggarakan ibadah haji mandiri. BPDHI justru tambah berani mengambil keputusan. Mereka meminta bantuan kepada pihak CHTH (Chung Hua Tjung Hui) komunitas penduduk Tionghoa. BPDHI mengatakan bahwa mereka memelihara sekitar 800 orang bekas gerilyawan yang ingin pergi ke tanah suci dan bilamana keinginan para gerilyawan tersebut tidak diberi jalan, mereka akan membahayakan keamana. Kepada pihak CHTH disampaikan bahwasannya

---

<sup>49</sup>Koran *Merdeka*, Soal 800 Djemaah Hadji, terbit 9 September 1950

pemerintah RIS tidak dapat memberi ongkos yang cukup, untuk itu BPDHI mengharap agar dimintakan derma dikalangan penduduk Tionghoa sebanyak 12 juta. Tetapi semua itu hanyalah sia-sia, setelah pihak CHTH berhubungan dengan Kementerian Agama dan diberi nasihat jangan memenuhi permintaan dari BPDHI.<sup>50</sup>

Kini dalam saat yang sangat sempit, pihak BPDHI mengambil siasat untuk menyerahkan 800 jamaah haji yang sudah terlantar itu kepada pemerintah. Pihak BPDHI berdalih bahwasannya penambahan *quotum* jamaah haji pada tahun 1950 sudah disetujui oleh pemerintah ternyata hanya sandiwara belaka. BPDHI mempergunakan kebodohan jamaah haji dan tidak menyerahkan sama sekali kepada pemerintah. Sebab mereka masih ngotot meminta disediakan *devisen* (alat pembayaran di luar negeri) dan meminta kepada pemerintah RIS untuk dilanjutkan jalannya agar untuk mengirim 800 jamaah itu ke tanah suci.

Mendengar kabar adanya ketertinggalan 800 jamaah di Tanjung Proik. Kementerian Agama mengadakan perundingan dengan pihak yang bersangkutan, dalam perundingan tersebut dicetuskan bahwasannya tidak memungkinkan untuk dapat menolong 800 jamaah haji yang ketinggalan. Kementerian Agama memberikan dua salusi dalam insiden ini. Salusi yang *petama* yaitu mengangkut sebagian jamaah yang tertinggal tadi menggunakan pesawat terbang. *Kedua*, mencatat 800 jamaah haji yang tertinggal tadi, kemudian mereka akan diberangkatkan tahun depan. Tetapi masukan yang diberikan Kementerian Agama ini ditolak oleh BPDHI, mereka menginginkan 800 jamaah haji itu dikirim ke tanah suci sekarang juga, walaupun waktu pelaksanaan ibadah haji sudah terlewat.

---

<sup>50</sup> Koran *Merdeka*, 800 Orang Djemaah Hadji Ketinggalan di Djakarta, terbit 8 September 1950

BPDHI beralih mereka akan bermukim disana menunggu setahun lamanya untuk melaksanakan ibadah haji musim mendatang.<sup>51</sup>

Gambar 4.9  
800 jamaah haji ilegal tertinggal di Tanjung Priok



Sumber: Koran Merdeka, terbit 8 September 1950

Keinginan yang diminta oleh BPDHI ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Agama. Sebab kalau permintaan mereka dikabulkan, maka sudah tentu 800 jamaah haji tadi juga terlantar di tanah suci. Disamping itu pemerintah telah memikirkan suatu ketentuan yang akan timbul apabila mereka diberangkatkan. Sebab bilamana mereka diberangkatkan begitu saja dengan tidak adanya penyaringan, maka peraturan yang telah dijalankan terhadap 10.000 jamaah lainnya yang sudah berangkat akan sia-sia dan ini akan mengakibatkan kekacauan.

<sup>51</sup> Koran Merdeka, 800 Orang Djemaah Hadji Ketinggalan di Djakarta, terbit 8 September 1950

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sejalan dengan perkembangan agama Islam di Nusantara, yang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hasrat untuk menunaikan rukun Islam yang ke lima bagi umat Islam Nusantara cukuplah besar. Aktifitas pelaksanaan ibadah haji umat Islam Nusantara sangat tergantung dengan keadaan transportasi antara kepulauan Nusantara dengan Jazirah Arab. Hubungan antar wilayah Nusantara dan Jazirah Arab dilakukan melalui hubungan pelayaran perdagangan. Siapa dan kapan umat Islam Nusantara yang pertama kali menunaikan ibadah haji belum diketahui secara pasti. Kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam Nusantara diperkirakan dimulai sejak abad ke-16 M. Awalnya kegiatan ibadah haji yang dilakukan umat Islam Nusantara berjalan tanpa ada halangan yang berarti.

Semenjak kedatangan bangsa Belanda tahun 1596. Belanda sedikit demi sedikit mulai membangun kekuasaannya di Nusantara, setelah menguasai Nusantara dan mengetahui hasrat umat Islam Nusantara dalam melaksanakan ibadah haji cukuplah besar. Pemerintah Belanda pun mulai ikut campur dalam pelaksanaan ibadah haji umat Islam Nusantara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Belanda, mulai dari kebijakan Resolusi Haji 1825, kebijakan Resolusi Haji 1831, kebijakan Resolusi Haji 1852 lalu disempurnakan dengan kebijakan Ordonansi Haji 1859 dan yang terakhir dengan Kebijakan Ordonansi 1922. Masa pendudukan Jepang tidak ada kebijakan khusus dalam hal ibadah

haji. Masa pendudukan Jepang tidak mengatur layanan pengangkutan jamaah haji seperti yang dilakukan pada masa pendudukan Belanda. Masa pendudukan Jepang di Nusantara juga tidak ada data yang menyebutkan adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroperasi.

Dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tak lantas membuat umat Islam Indonesia dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji. Pasalnya, umat Islam Indonesia harus menghadapi kembali serangkaian genjotan senjata dari bangsa Belanda yang ingin menguasai lagi wilayah Indonesia. Ibadah haji pasca kemerdekaan Republik Indonesia, dijadikan sebagai alat propaganda bangsa Belanda untuk meraih simpati lagi dari umat Islam Indonesia. Bangsa Belanda menggunakan iming-iming ibadah haji untuk mencaplok kembali wilayah Indonesia.

Data yang dihimpun dari Ditjen PHU (Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh) menunjukkan bahwa pada tahun 1945-1947 terdapat kekosongan pemberangkatan jamaah haji dari Republik Indonesia. Kekosongan disini bukan berarti tidak ada umat Islam dari Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, melainkan dari pemerintah Republik Indonesia sendiri yang pada waktu itu belum mampu menanganinya sendiri ibadah haji. Saat itu pemerintah Republik Indonesia hanya berkonsentrasi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekosongan tersebut ialah: *Pertama*, Fatwa dari K.H Hasyim Asj'ari. Sabtu 20 April 1946 lewat saluran radio K.H Hasyim Asj'ari mengeluarkan fatwa bagi umat Islam Republik Indonesia. "*Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan Tanah Air dalam keadaan musuh menyerang*

*untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan negara”* seru K.H Hasyim Asj'ari dalam siaran radio.

*Kedua, Agresi Militer Belanda.* Bangsa Belanda melakukan agresi mileternya sebanyak dua kali. Agresi militer pertama Belanda dilaksanakan tepat tanggal 21 Juli 1947. Belanda mulai melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik Indonesia. Belanda menyerang Republik Indonesia dari segala jurusan dengan mengerahkan Angkatan Darat, Laut, dan Udaranya untuk menghancurkan Republik Indonesia. Belanda berdalih, bahwa serangan tersebut hanyalah sekedar tindakan kepolisian belaka. Tanggal 4 Agustus 1947 Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata bersama. Agresi militer ke dua, dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda secara tiba-tiba melaksanakan aksinya untuk menyerbu daerah ibu kota Republik Indonesia. Dampak dari agresi militer ke dua ini dengan dikeluarkannya mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

*Ketiga, Proses Penataan Negara.* Sebagaimana bangsa yang baru merdeka, bangsa Indonesia masih meraba-meraba dalam menjalankan roda pemerintahan. Walaupun sudah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka, bangsa Indonesia masih gamang dalam menjalankan roda pemerintahan. Langkah-Langkah dalam proses penataan negara ialah: menetapkan dan mengesahkan Undang-undang Dasar, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan kekuatan pertahanan dan keamanan.

Kegiatan ibadah haji Indonesia berlanjut pada tahun 1948. Bagi umat Islam Indonesia ibadah haji bukan hanya sekedar melaksanakan ritus keagamaan, melainkan juga bisa dijadikan sebagai alat politik diplomasi. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1948 berkaitan erat dengan nuansa politik diplomasi yang dilancarkan bangsa Indonesia. Dimana pada tahun tersebut, bangsa Indonesia mengirim misi haji R.I yang pertama kali. Tujuan dalam mengirim misi haji R.I ini untuk menyampaikan mision yang bersifat diplomatis, menarik simpati atas perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus sebagai bentuk usaha memperoleh pengakuan kedaulatan dengan jalan politik diplomasi. Rombongan misi haji R.I tersebut terdiri dari K.H Mohammad Adnan yang didapuk sebagai ketua misi haji R.I, Saleh Su'aidy sebagai sekretaris, H. Sjamsir sebagai bendahara, Ismail Banda sebagai anggota.

Perjalanan misi haji R.I ini banyak menuai hasil positif, adapun hasil positif ialah dengan medekatnya negara-negara Arab dan dunia Islam kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta menjauhkannya dari hasutan yang dilancarkan bangsa Belanda. Secara politis pemberangkatan misi haji R.I ini menggugah simpati dari negara-negara Islam, sehingga baik de facto maupun de jure, mereka mengakui kedaulatan Republik Indonesia.

Perjalanan ibadah haji umat Islam Indonesia berlanjut pada tahun 1950, dimana pada tahun tersebut pemberangkatan haji jamaah Indonesia diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS. Dari total kuota yang di sediakan oleh pemerintah sejumlah 10.000, berhasil memberangkatkan sejumlah 9.892 jamaah haji + 14

orang RKI + 27 orang MPH = 9.933 jamaah haji. Selain itu jamaah haji yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1950 hanya 2,23%. Ditahun pertama dalam penyelenggaraan ibadah haji ini juga menyisahkan tragedi tertinggalnya 800 jamaah haji di Tanjung Priok. 800 jamaah haji yang gagal berangkat tersebut bernaung dalam suatu wadah yang mengatasnakan dirinya sebagai BPDHI (Badan Penolong Djamaah Hadji Indonesia) yang notabennya sebagai wadah ilegal dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Arsip dan Dokumen**

1. Arsip Maklumat No. 3 Tentang Kapal Haji Kongsi Tiga
2. Arsip Tentang Tarif Perongkosan Perjalanan Hadji 1950/1369
3. Lampiran Surat Edaran Kementerian Agama No. III/I/1606 tahun 1950 tentang jumlah quotum haji tahun 1950
4. Arsip Ditjen PHU, Tim Informasi Haji Ditjen PHU/ar, Rekam Jejak Perjalanan Ibadah Haji di Indonesia
5. Arsip Ditjen PHU, Data Statistik Jumlah Wafat, Ghoib, Kelahiran, Petugas, Biaya, Penyelenggara, Regulasi Biaya Jemaah Haji Indonesia Tahun 1950 Sampai Dengan 2018

### **B. Koran**

1. Koran *Merdeka*, “800 Djemaah Hadji Tertinggal di Djakarta”, terbit 8 September 1950
2. Koran *Merdeka*, “Soal 800 Djemaah Hadji”, terbit 9 September 1950
3. Koran *Merdeka*, “2 Djemaah Hadji Meninggal”, terbit 23 September 1950
4. Koran *Suara Rakyat*, “Perjalanan Hadji Dengan Kapal Terbang Terhalang”, terbit 12 September 1950
5. Koran *Merdeka*, “Kira-kira 2% Djemaah Hadji Meninggal”, terbit 6 Oktober 1950
6. Koran *Merdeka*, “Ketjurangan Dalam Pemungutan Perongkosan Naik Hadji”, terbit 7 Oktober 1950
7. Koran *Patria*, “Misi Hadji R.I jang Pertama”, terbit 1 Oktober 1968
8. Koran *Republika*, “Sejarah Pelaksanaan Haji di Indonesia”, terbit Ahad, 10 Oktober 2010
9. Koran *Republika*, “Muslim Nusantara Berhaji pada Masa Kolonial”, terbit Ahad 30 Oktober 2011

### C. Buku

- Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Al-Aydrus, Muhammad Hasan. 1996. *Penyebaran Islam Di Asia Tenggara*. Terj. Ali Yahya. Jakarta: PT Lentera Basritama
- Ananta Toer, Pramudia, Soebagyo Toer, Koesalah dan Kamil, Ediati. 2001. *Konflik Revolusi Indonesai Jilid III*. Bogor: Percetakan SMK Mardi Yuana
- Ananta Toer, Pramudia, Soebagyo Toer, Koesalah dan Kamil, Ediati. 2003. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV*. Bogor: Grafika Mardiri Yuana
- Dekker, Nyoman. 1980. *Sejarah Revolusi Nasional*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Djakaria. 2014. *Sejarah Indonesia II*. Yogyakarta: Ombak
- Douwes, Dick dan Kaptein, Nico. 1997. *Indonesia dan Haji*. Jakarta: INIS
- Harapan, Sumur dan Murdisi. 1984. *Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: Insan Cemerlang
- Hutagalung, Batara R. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949*. Yogyakarta: Lkis
- K.H Abdussamad, "Melawat ke Makka", dalam buku, Henri Chambert-Loir. 2013. *Naik Haji Masa Silam tahun 1900-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Kansil, C.S.T dan Julianto. 1985. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Kartasasmita, Ginanjar dan dkk. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: PT Gita Karya
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Kartono, Ahmad dan Husna, Sarmidi. 2013. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group
- Kuntawijoyo. 1995. *Pendekatan Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya
- Kusnari, Mohammad. 1985. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Sastra Hudaya
- Madjid, M. Dien. 2008. *Berhaji Di Masa Kolonial*. Jakarta: CV Sejahtera

- Madjid, M.Dien dan Wahyudi, Johan. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Perneradamedia Group,
- Milal Bizawie, Zainul. 2014. *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garis Depan Menegakkan Indonesia 1945-1949*. Tangerang: Pustaka Compass
- Milal Bizawie, Zainul. 2016. *Masterpiece Islam Nusantara (sanad dan jejaring ulama-santri 1830-1945)*. Tangerang: Pustaka Compass
- Nasution, A.H. 1984. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid II*. Bandung: Disjarah Angkatan Darat dan Angkatan
- Noer, Delia. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Putuhena, Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara
- Rochimi, Abdurahamn. 2010. *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*. Jakarta: Erlangga
- Saleh, R.H.A. 2000. *Mari Bung Rebut Kembali*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suminto, Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES
- Syaukan, Iman. 2007. *Manajemen Pelayanan Haji Indonesia*. Jakarta: CV Prasasti
- Tjondronegoro, Purnawan. 1980. *Merdeka Tanahku Merdeka Negeriku*. Jakarta: Sinar Negara
- Yarmunuda, Miti. 2017. *Fiqh Haji dan Umroh (Tinjauan Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yatim, Badri. 2015. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

#### **D. Jurnal**

- Fauzi, Wildan Insan dan Hasanah, Neni Nurmayati. (2019). "DIPLOMASI DARI NEGERI KATA-KATA: *Diplomasi Haji Agus Salim pada Inter Asia Reletion Conference dan Komisi Tiga Negara*". *HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*. Vol. II, No. 2

- Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan Perlinungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No 1
- Rosyid, Muhammad. (2017). "Dinamika Haji Indonesia Sejak Era Kolonial dan Problematika Calon Haji Ilegal". *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol.17, No. 2
- Burhan Setia, Agil dkk, (Juni 2019). "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 1
- Abd. Rahman, Suranta. Oktober 2007. "Diplomasi R.I di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947", *Jurnal Wacana*, Vol. 9, No. 2
- Nizam, Achmad dan Hanan, Alatief. 2003. *Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Setia, Agil Burhan, dkk. Juni 2019. "Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959 di Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 1

#### **E. Skripsi/Tesis**

- Farihatul, Jannah Rina. Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia Tahun 1945-2002. Tesis, UIN Sunan Ampel Program Study Dirasah Islamiyah

#### **F. Internet**

- Abdul Basit Adnan dan Abdulhayi Adnan, Prof KHR Mohammad Adnan dan Pemikirannya dalam Islam, dalam: <http://digilib.uinsuka.ac.id/12690/1/Mohammad%2520Adnan.pdf> diakses pada 11 September 2020
- Achmad Afandi, BAB III: Latar Belakang Berdirinya Kementerian Agama di Indonesia, dalam <http://diligib.uinsby.ac.id/3919/6/Bab%203.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2020
- NU Online, Peristiwa Monumental Bendera Merah Putih Berkibar di Arafah, terbit Sabtu, 2 September 2017, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/80929/peristiwa-monumentalbenderamerah-putihberkibar-di-arafah> diakses pada tanggal 14 September 2020
- Kabar Washliyah, Fakta Sejarah, Peran Al Washliyah Dalam Misi Haji dan Kemerdekaan, terbit Senin, 27 Juni 2015 dalam <http://kabarwashliyah.com/2015/07/27/fakta-sejarah-peran-al-washliyah-dalam-misi-haji-dan-kemerdekaan/> diakses pada tanggal 14 September 2020

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Maklumat No. 3 Tentang Kapal Haji Kongsi Tiga

Harga yang tumpangan kapal-hadji pergi pulang bagi seorang yang berumur 12 tahun atau lebih menurut kelas2-nja berikut pembayaran segala uang Karantina dan Sambukiah (kotjual) peronkasan bea tetap dan uang bekal di HIDJAZ yang bagi seorang besarnya (jumlah R.2.113,34) untuk musim tahun 1950 (1369-H), dari beberapa pelabuhan serta nama2 dan ke-TORANGAN kira2 waktu berangkatnja kapal2-hadji sebagaimana tersebut dibawah ini.  
PERHATIAN. Dengan maklumat No.3 ini, maka maklumat2 no.1 dan no.2 menjadi tida berlaku lagi.

	DEK	BALEH2	K A M A R			Dari pelabuhan
			I A	I B	II A	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4070.- R. 131.80	R. 3270.- R. 131.80	R. 2270.- R. 131.80	Tandjung Priuk
Djumlah :	R.1281.80	R.1731.80	R.4201.80	R. 3401.80	R. 2401.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4230.- R. 131.80	R. 3430.- R. 131.80	R. 2330.- R. 131.80	Somarang
Djumlah :	R.1281.80	R.1731.80	R.4361.80	R. 3561.80	R. 2461.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4310.- R. 131.80	R. 3510.- R. 131.80	R. 2350.- R. 131.80	Surabaya
Djumlah :	R.1281.80	R.1731.80	R.4441.80	R. 3641.80	R. 2481.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4710.- R. 131.80	R. 3910.- R. 131.80	R. 2490.- R. 131.80	Ampanan
" tambahan K.P.M.	R. 37.-	R. 37.-	-	-	-	
Djumlah :	R.1318.80	R.1768.80	R.4841.80	R. 4041.80	R. 2621.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4910.- R. 131.80	R. 4110.- R. 131.80	R. 2610.- R. 131.80	B i m a
" tambahan K.P.M.	R. 49.50	R. 49.50	-	-	-	
Djumlah :	R.1331.30	R.1781.30	R.5041.80	R. 4241.80	R. 2741.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4910.- R. 131.80	R. 4110.- R. 131.80	R. 2610.- R. 131.80	Makassar
" tambahan K.P.M.	R. 50.50	R. 50.50	-	-	-	
Djumlah :	R.1332.30	R.1782.30	R.5041.80	R. 4241.80	R. 2741.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4374.- R. 131.80	R. 3574.- R. 131.80	R. 2484.- R. 131.80	Padang
" tambahan K.P.M.	R. 34.-	R. 34.-	-	-	-	
Djumlah :	R.1315.80	R.1765.80	R.4505.80	R. 3705.80	R. 2615.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4207.- R. 131.80	R. 3407.- R. 131.80	R. 2377.- R. 131.80	Palembang
" tambahan K.P.M.	R. 20.50	R. 20.50	-	-	-	
Djumlah :	R.1302.30	R.1752.30	R.4338.80	R. 3538.80	R. 2508.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4466.- R. 131.80	R. 3666.- R. 131.80	R. 2547.- R. 131.80	Belawan
" tambahan K.P.M.	R. 56.50	R. 56.50	-	-	-	
Djumlah :	R.1338.30	R.1788.30	R.4597.80	R. 3797.80	R. 2678.80	
Uang tumpangan " karantina	R.1150.- R. 131.80	R.1600.- R. 131.80	R.4310.- R. 131.80	R. 3510.- R. 131.80	R. 2350.- R. 131.80	Bandjermasin x)
" tambahan K.P.M.	R. 39.50	R. 39.50	-	-	-	
Djumlah :	R.1321.30	R.1771.30	R.4441.80	R. 3641.80	R. 2481.80	

x) Didasarkan atas uang tumpangan kamar pergi pulang Surabaya/Djiddah.

Adapun nama2 kapal-hadji yang akan mengangkut djamaah-hadji tahun ini ke DJIDDAH serta kira2 hari berangkatnja masing2 dari pelabuhan TANDJUNG-PRIUK ialah :

K-Agoeng permulaan Djuli	Laertes pertengahan Djuli	Tallase antara 15-31 Agustus
K-Baroe "	K-Baroe permulaan Agust.	Tabian akhir
Tarakan antara 1-15 "	Tawali pertengahan "	Tynderous "

Djakarta, 11 Mei 1950. HT/S.

2. Tarif Perongkosan Perjalanan Hadji 1950/1369

TARIEF PERONGKOSAN PERDJALANAN HADJI 1950/1369 H.

- A. Kepada "Kongsi Tiga" harus dibayar untuk seorang dewasa.  
1. Passage pulang-pergi, tidak termasuk uang karantina.

Tempat Pelabuhan	Dok	Baleh- baleh	K a m a r		
			I I A	I B	I A
Tandjung Priok	1150.-	1600.-	2270.-	3270.-	4070.-
Semarang	1150.-	1600.-	2300.-	3350.-	4150.-
Surabaya	1150.-	1600.-	2310.-	3390.-	4190.-
Bandjarmasin	1189.50	1639.50	2349.50	3429.50	4229.50
Makassar	1200.50	1650.50	2490.50	3740.50	4540.50
Bima	1199.50	1649.50	2489.50	3739.50	4539.50
Amponan	1187.-	1637.-	2417.-	3627.-	4427.-
Belawan	1206.50	1656.50	2603.50	3722.50	4522.50
Palembang	1170.50	1620.50	2397.50	3427.50	4227.50
Padang	1184.-	1634.-	2518.-	3608.-	4408.-

Untuk tempat2 pelabuhan, dimana ditetapkan ongkos passage, lebih tinggi dari stantartief (untuk tiap2 klas masing2 f 1150.-, f 1600.-, f 2270.- f 3270.-, f 4070.- ) didalamnja telah termasuk pula ongkos passage untuk kembali dari Tandjung Priok sampai tempat pelabuhan, dimana Djemaah itu naik ke Kapal Hadji (Bandjarmasin, Makassar, Bima, Amponan, Belawan, Palembang dan Padang).

2. Selain dari ongkos passage tersebut diatas, harus pula di-penuhi ongkos karantina di Indonesia, Kamaran, dan biaya ontscheping di Djeddah, untuk tiap orang dewasa sebanjak f 131.80.

- B. Untuk biaya penghidupan di Tanah Sutji dan ongkos perdjalananan (djeddah - Mekka p.p., Arafat - Mina p.p., Berszjarah ke Medina, dan untuk keperluan sehari-hari lainnja disediakan:

Untuk seorang dewasa £ 48/10/- atau f 1035.-

- C. Untuk "Beban tertentu" (Vaste Lasten) di Tanah Sutji harus dibayar untuk tiap orang dewasa:

a. Bea Pemerintah Saudi - Arab, upah sjech2, uang derma, Zemzem £ 28.-/-

b. Sewa rumah dan memperlengkapinja, sewa lampu, uang tamu waktu datang, Makassar dan penginapan di Arafat dan Mina £ 20.-/-

c. Pembayaran dimuka, ongkos kendaraan kepada Pemerintah Saudi-Arab £ 2/5/-

atau £ 50/5/-

f 1072,34

- D. Provisie N.H.M. untuk setiap orang

f 5,40

- E. Zegel untuk wissel

f 0,30

" " kwitantie "Vaste Lasten"

f 0,30

DITEMPAT PELABUHAN, DIMANA DJEMAAH HARUS PINDAH KAPAL, TIDAK DIBERIKAN PENGINEPAN GRATIS.

Menurut Pemberitahuan Kementerian Agama R.I.S. Surat Edaran TTG.22-3-'50 No. A.III/I/648 Bab 7, Anak2 dibawah umur 15 tahun TIDAK diperkenankan ikut naik Hadji.

Oleh karena demikian untuk tahun ini hanya diberitahukan tarief perongkosan untuk orang dewasa sadja.

3. Lampiran Surat Edaran Kementerian Agama No. III/I/1606 tahun 1950 tentang jumlah quotum haji tahun 1950

Quotum untuk seluruh Indonesia:

1.	Propinsi Djawa-Barat .....	2750 orang
2.	" " " Tengah .....	1650 "
3.	" " " Timur .....	2300 "
4.	" " Sumatra-Utara .....	400 "
5.	" " " Tengah .....	250 "
6.	" " " Selatan .....	400 "
7.	" " Kalimantan .....	700 "
8.	" " Sulawesi .....	800 "
9.	" " Maluku .....	100 "
10.	" " Sunda Kotjil .....	500 "
11.	Tjadangan .....	150 "

Djumlah .....10.000 orang

Quotum tjadangan itu oleh Kementerian Agama terutama akan dipasrahkan kepada daerah2 jang terbukti benar2 harus menerima tambahan quotum, djika keadaan memungkinkan buat quotum orang2 jang akan pergi hadji dengan naik kapal terbang dsb.

**XVI. MEMBAGIKAN QUOTUM.**

Quotum tersebut selanjutnja harus dibagi-bagikan kepada Kabupaten/Kotapradja Besar jang berada dalam Karesidenan/Propinsi jang bersangkutan. Berhubung dengan itu, Residen/Gubernur jang bersangkutan di tempat kedudukannya harus membentuk sebuah panitia terdiri dari Residen/Gubernur atau Wakilnja, Kepala Kantor Urusan Agama di tempat itu dengan P.R.I. Membagikan quotum itu terutama harus berdasarkan atas banjaknja penduduk jang beragama Islam dan banjaknja jang mendaftarkan dalam tiap2 daerah.

Sesudahnja ada kepastian tentang banjaknja quotum untuk tiap2 daerah itu, Kepala Kantor Urusan Agama jang menjadi anggota panitia tersebut, harus dengan segera mengawatkan (memberitahukan) kepada Kementerian Agama, Kantor Pusat P.T.T. di Bandung, D.R.I. Pusat di Djakarta, Kantor Pos dan B.R.I. jang bersangkutan tentang banjaknja quotum buat tiap2 Kabupaten/Kotapradja Besar, hal mana penting sekali untuk menentukan tentang kapal hadji jang akan ditumpangi oleh tjalon djemaah hadji, tanggal keberangkatannya serta pelabuhan dimana mereka harus naik kapal hadji, membagi-bagikan surat perdjalanen pergi hadji kepada Kantor Pos jang bersangkutan dsb.

**XVII. QUOTUM JANG LEBIH.**

Djika terdjadi kelebihan quotum dalam sesuatu Kabupaten/Kotapradja Besar, Bupati/Wali Kota Besar harus dengan segera mengawatkan kelebihan quotum itu kepada Kementerian Agama supaya kemudian oleh Menteri Agama kelebihan quotum itu dapat dipasrahkan ke daerah lain.

Kelebihan quotum itu tidak diperkenankan untuk diserahkan "dibawah tangan" oleh Kepala Daerah kepada Kepala Daerah lain, pemindahan kelebihan quotum mana harus melalui Kementerian Agama supaya tidak menimbulkan kesukaran2 seperti mengenai tanggal pemberangkatan tjalon djemaah hadji, pemungutan uang, pembagian banjaknja surat perdjalanen pergi hadji dll.

**XVIII. QUOTUM DI DAERAH2.**

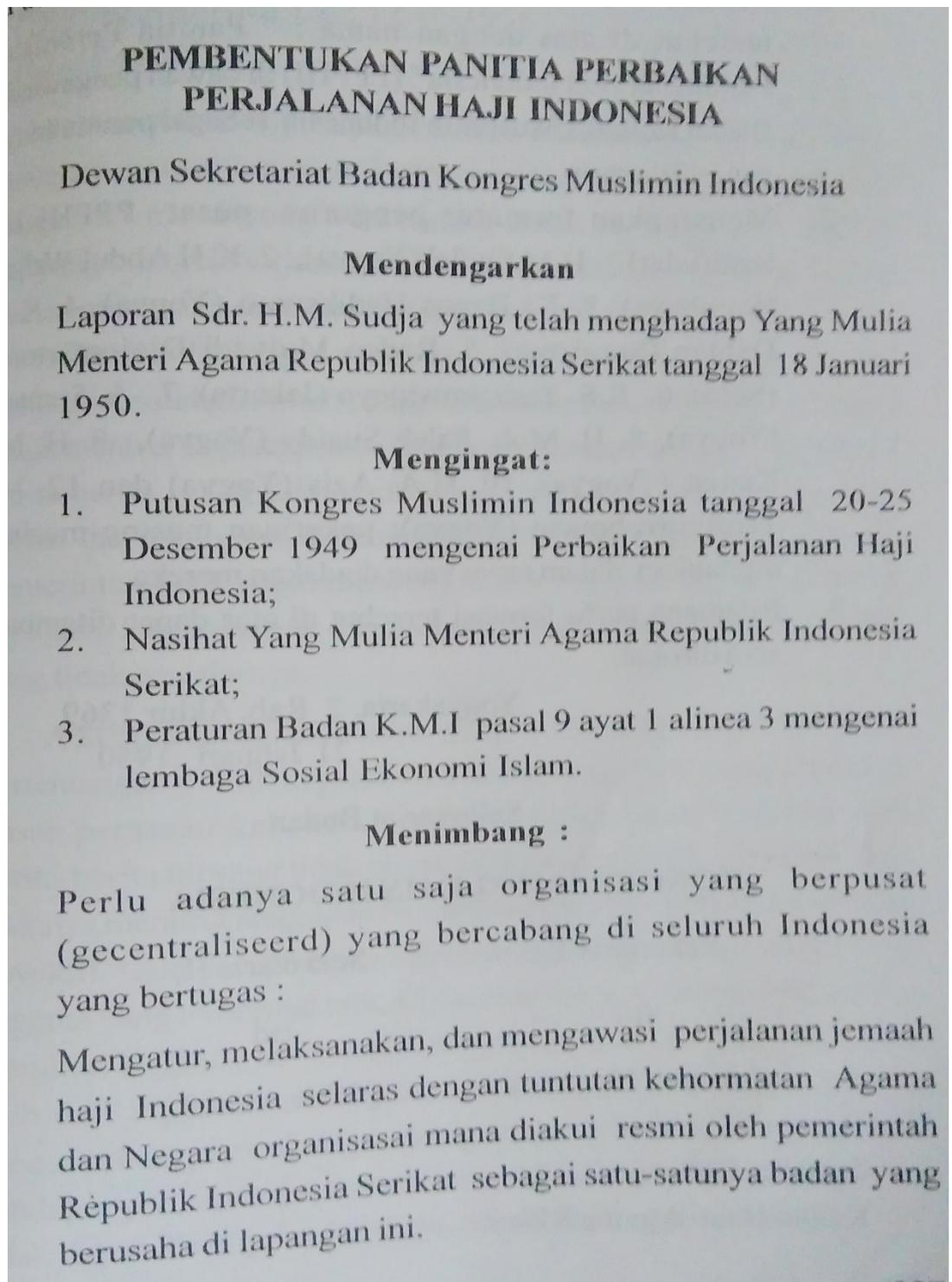
Sesudahnja ada ketentuan tentang quotum untuk daerah2 jang bersangkutan, Panitia Penjaringan didaerah2 itu harus memperhatikan hal2

4. Data Statistik Jumlah Wafat, Ghoib, Kelahiran, Petugas, Biaya, Penyelenggara, Regulasi Biaya Jemaah Haji Indonesia Tahun 1950 Sampai Dengan 2018 Ditjen PHU

DATA STATISTIK JUMLAH WAFAT, GHOIB, KELAHIRAN, PETUGAS, BIAYA, PENYELENGGARA, REGULASI BIAYA JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 1950 SAMPAI DENGAN 2018

NO	TAHUN		PEMBERANGKATAN		MENINGGAL			GHOIB	JUMLAH	PROSEN-TASE	MELAHIR-KAN	PETUGAS			ONGKOS HAJI (RHS)				PENYELENGGARA	KETERANGAN / KEPRES	
	MASEHI	HURIRYAH	LAUT	UDARA	JUMLAH	LAUT	UDARA					TPHI	TKH	DLI	LAUT	BERDARAH	UDARA				PENYELANGGARA
																	USD	RUPIAH			
1	1949	1370	9.892	0	9.892	320	0	0	320	2,23%	0	27	14	0	Rp. 1.395	0	0	0	Dep. Agama RI	-	
2	1950	1371	1.843	0	1.843	42	0	0	42	2,26%	0	6	15	0	Rp. 6.429	0	0	0	Dep. Agama RI	-	
3	1951	1372	9.502	0	9.502	278	0	0	278	1,94%	0	24	20	0	Rp. 6.847	0	0	0	Dep. Agama RI	-	
4	1952	1373	14.031	293	14.324	320	0	0	320	2,23%	0	32	28	0	Rp. 7.590	0	0	Rp. 16.691	Dep. Agama RI	-	
5	1953	1374	10.436	82	10.518	291	0	0	291	2,82%	0	27	25	0	Rp. 7.380	0	0	Rp. 13.390	Dep. Agama RI	-	
6	1954	1375	12.333	240	12.573	348	0	0	348	3,26%	0	30	43	0	Rp. 8.090	0	0	Rp. 23.394	Dep. Agama RI	-	
7	1955	1376	13.184	288	13.472	365	0	0	365	2,42%	0	16	23	0	Rp. 10.000	0	0	Rp. 22.900	Dep. Agama RI	-	
8	1956	1377	13.842	240	14.082	270	0	0	270	2,01%	0	16	28	0	Rp. 21.071	Rp. 13.240	0	Rp. 25.300	Dep. Agama RI	-	
9	1957	1378	13.613	0	13.613	267	0	0	267	1,80%	0	24	23	0	Rp. 28.200	0	0	0	Dep. Agama RI	-	
10	1958	1379	7.820	146	7.966	277	0	0	277	2,59%	0	24	35	0	Rp. 35.000	0	0	Rp. 59.000	Dep. Agama RI	-	
11	1959	1380	10.003	0	10.003	215	0	0	215	2,08%	0	24	34	0	Rp. 38.200	0	0	0	Dep. Peny. Lhs. Haji	-	
12	1960	1381	15.039	0	15.039	325	0	0	325	2,80%	0	32	34	0	Rp. 39.000	0	0	0	Dep. Peny. Lhs. Haji	-	
13	1961	1382	15.004	0	15.004	128	0	0	128	1,64%	0	32	28	0	Rp. 60.000	0	0	0	Dep. Peny. Lhs. Haji	-	
14	1962	1383	15.000	0	15.000	74	0	0	74	0,74%	0	60	34	0	Rp. 200.000	0	0	0	PANUHAD	-	
15	1963	1384	15.610	0	15.610	163	0	0	163	0,77%	0	60	110	0	Rp. 400.000	0	0	0	PANUHAD	-	

5. Keputusan BKMI No.1/BKMI/L.S.E/50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Panitia Perbaikan perjalanan Haji Indonesia (PHI)



**Memutuskan:**

1. Mendirikan Satu organisasi yang bertugas sebagai tersebut di atas dengan nama : " Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia " (PPPFI) di bawah pengawasan Badan Kongres Muslimin Indonesia sebagai peraturannya yang terlampir
2. Menetapkan formatur pengurus pusat PPPFI itu terdiri dari 1. H.M Sudja' (Yogya), 2. K.H Abdul Wahab (Surabaya), 3. Ki Bagus Hadikusumo (Yogya), 4. K.H Dahlan (Surabaya), 5. Raden Mulyadi Djojomartono (Solo), 6. R,S Sastrowignyo (Jakarta), 7. A. Sumadi (Yogya), 8. H. Moh. Saleh Suaidy (Yogya), 9. H. M. Kamar ( Yogya), 10. H.A. Azis (Yogya) dan 12. M. Taufiqurrohmaan (Yogya); pekerjaan masing-masing ditetapkan dalam rapat yang diadakan mereka.
3. Bilamana perlu formasi tersebut di atas dapat ditambah atau dirobah.

Yogyakarta, 2 Rab. Akhir 1369

21 Januari 1950

Sekretariat Badan

**KONGRES MUSLIMIN INDONESIA**

Sekretaris I,

Sekretaris II,

ttd

ttd

( Anwar Harjono)

( Wali Alfatah)

Tersalin Oleh:

Kementrian Agama RIS.

Sumber: Sumur Harapan dan Murdisi, Lintas Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, (Jakarta: Insan Cemerlang, 1984), hlm 337-338

6. Jumlah jamaah haji Nusantara tahun 1879-1939

JAMAAH HAJI INDONESIA 1879 – 1939				
<i>Tahun Hijriah</i>	<i>Tahun Masehi</i>		<i>Jamaah Indonesia.</i>	<i>Jamaah Dunia.</i>
1296	1879	(26-12-78 – 15-12-79)	5.331	---
1297	1880	(15-12-79 – 4-12-80)	9.542	59.659
1298	1881	( 4-12-80 – 23-11-81)	4.605	37.785
1299	1882	(23-11-81 – 12-11-82)	4.302	25.580
1300	1883	(12-11-82 – 2-11-83)	5.269	27.263
1301	1884	( 2-11-83 – 21-10-84)	4.640	31.157
1302	1885	(21-10-84 – 10-10-85)	4.692	53.010
1303	1886	(10-10-85 – 30-11-86)	2.523	42.374
1304	1887	(30-11-86 – 19-11-87)	2.426	42.185
1305	1888	(19-11-87 – 7-11-88)	4.328	50.221
1306	1889	( 7-11-88 – 28- 8-89)	3.146	44.686
1307	1890	(28- 8-89 – 17- 8-90)	5.419	39.186
1308	1891	(17- 8-90 – 7- 8-91)	6.044	45.476
1309	1892	( 7- 8-91 – 26- 7-92)	6.841	54.491
1310	1893	(26- 7-92 – 15- 7-93)	8.092	90.173
1311	1894	(15- 7-93 – 5- 7-94)	6.874	49.628
1312	1895	( 5- 7-94 – 26- 6-95)	7.128	57.503
1313	1896	(24- 6-95 – 12- 6-96)	11.788	62.726
1314	1897	(12- 6-96 – 2- 6-97)	7.075	41.133
1315	1898	( 2- 6-97 – 22- 5-98)	7.895	38.247
1316	1899	(22- 5-98 – 12- 5-99)	7.694	36.380
1317	1900	(12- 5-99 – 1- 5-00)	5.068	---
1318	1901	( 1- 5-00 – 20- 6-01)	7.421	---
1319	1902	(20- 6-01 – 10- 6-02)	6.092	---
1320	1903	(10- 6-02 – 30- 3-03)	5.679	---
1321	1904	(30- 3-03 – 18- 3-04)	9.481	74.344
1322	1905	(18- 3-04 – 8- 3-05)	4.964	66.451
1323	1906	( 8- 3-05 – 25- 2-06)	6.863	68.735
1324	1907	(25- 2-06 – 14- 2-07)	8.694	108.305
1325	1908	(14- 2-07 – 4- 2-08)	9.319	91.142
1326	1909	( 4- 2-08 – 23- 1-09)	10.300	69.077
1327	1910	(23- 1-09 – 13- 1-10)	10.994	71.421
1328	1911	(13- 1-10 – - -11)	14.234	90.051

<i>Tahun Hijriah</i>	<i>Tahun Masehi</i>		<i>Jamaah Indonesia</i>	<i>Jamaah Dunia</i>
1329	1911	( - -11 - 20-12-11)	24.025	83.749
1330	1912	(20-12-11 - 11-12-12)	18.353	83.295
1331	1913	(11-12-12 - 30-11-13)	26.321	96.924
1332	1914	(30-11-13 - 19-11-14)	28.427	56.855
1333	1915	(19-11-14 - 9-11-15)	---	---
1334	1916	( 9-11-15 - 28-10-16)	---	---
1335	1917	(28-10-16 - 17-10-17)	27	8.585
1336	1918	(17-10-17 - 7-10-18)	48	7.020
1337	1919	( 7-10-18 - 26-11-19)	1.123	22.101
1338	1920	(26-11-19 - 15-11-20)	14.805	59.370
1339	1921	(15-11-20 - 4-11-21)	28.795	60.786
1340	1922	( 4-11-21 - 24- 8-22)	22.412	---
1341	1923	(24- 8-22 - 14- 8-23)	22.022	86.353
1342	1924	(14- 8-23 - 2- 8-24)	39.800	91.786
1343	1925	( 2- 8-24 - 22- 7-25)	74	---
1344	1926	(22- 7-25 - 12- 7-26)	3.474	57.957
1345	1927	(12- 7-26 - 1- 7-27)	52.412	123.052
1346	1928	( 1- 7-27 - 20- 6-28)	43.082	98.635
1347	1929	(20- 6-28 - 9- 6-29)	31.405	86.021
1348	1930	( 9- 6-29 - 29- 5-30)	33.214	84.810
1349	1931	(29- 5-30 - 19- 5-31)	17.052	40.105
1350	1932	(19- 5-31 - 7- 5-32)	4.385	29.065
1351	1933	( 7- 5-32 - 26- 6-33)	2.260	20.026
1352	1934	(26- 6-33 - 16- 6-34)	2.854	25.252
1353	1935	(16- 6-34 - 5- 6-35)	3.693	33.898
1354	1936	( 5- 6-35 - 24- 3-36)	4.012	33.730
1355	1937	(24- 3-36 - 14- 3-37)	5.403	49.864
1356	1938	(14- 3-37 - 3- 3-38)	10.327	67.224
1357	1939	( 3- 3-38 - 20- 2-39)	10.883	59.548

Laporan resmi pemerintah  
Hindia Belanda tahun 1941

Sumber: Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1986),  
hlm 222-223

## **Kronik Perjalanan Ibadah Haji Indonesia**

**1596**

Kedatangan Bangsa Belanda di Nusantara yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten

**1825**

untuk pertama kalinya, sarana pemberangkatan jamaah haji menggunakan kapal khusus atau kapal penumpang

**1825**

Pemerintah Belanda membuat suatu kebijakan dalam penyelenggaraan haji yang disebut dengan kebijakan Resolusi Haji

**1831**

Pemerintah Belanda memperbarui kebijakan Resolusi Hajinya

**1852**

Pemerintah Belanda mencabut seluruh kebijakan Resolusi Hajinya kecuali dalam hal penggunaan pas jalan atau pasport, dan juga menginstruksikan kepada para kepala pemerintahan di Jawa, Residen Palembang, dan Gubernur Pesisir Barat Sumatra untuk mengawasi jamaah haji dan memberikan laporan mengenai keberangkatan dan kepulangan

**1859**

Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan sebutan Ordonansi haji

**1872**

Pemerintah Belanda mendirikan Kantor Konsulat Belanda di Jeddah

**1873**

Pemerintah Belanda menggandeng tiga perusahaan yang diberi wewenang untuk menangani pelayanan transportasi ibadah haji. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut ialah: De Rotterdamsche Lloyd, Stoomvaartmaatschappij Nederland, dan Stoomvaartmaatschappij Oseaan. Ketiga perusahaan pelayaran ini tergabung dalam satu kongsi yang dinamai dengan Kongsi Tiga.

**1896**

Dibukanya jalur pelayaran Terusan Suez

**1922**

Pemerintah Belanda memperbaharui kebijakan Ordonansi haji tentang pelayaran ibadah haji

**8 Maret 1942**

Pemerintah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang

**1942**

Mendirikan kantor urusan agama yang disebut Shumubu untuk tingkat pusat dan shumuk untuk tingkat daerah.

**17 Agustus 1945**

Ir. Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

**18 Agustus 1945**

pengesahan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar negara

**5 Oktober 1945**

Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat)

### **September 1945**

NICA yang membonceng Sekutu datang lagi di wilayah R.I

### **19 September 1945**

Adanya insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Orang-orang berkebangsaan Belanda, mengibarkan bendera berwarna merah, putih dan biru (bendera kebangsaan Belanda) di puncak hotel Yamato.

### **7 Januari 1946**

TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia)

### **20 April 1946**

Lewat saluran radio K.H Hasyim Asj'ari mengeluarkan fatwa bagi umat Islam Republik Indonesia yang bunyinya *"Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan Tanah Air dalam keadaan musuh menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardu'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan negara"*

### **27 Mei 1947**

Belanda mengirim nota ultimatum dan harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 hari. Isi pokok nota tersebut: membentuk pemerintahan *ad interim* bersama, mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, Republik Indonesia harus mengirim

beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

### **3 Juli 1947**

TRI (Tentara Rakyat Indonesia) breubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia)

### **15 Juli 1947**

Amir Sjarifuddin, yang memimpin kabinet berikutnya, memberikan jawaban ultimatum

### **17 Juli 1947**

Amir Sjarifuddin melalui RRI Yogyakarta, memberikan jawaban namun jawaban tersebut di tolak oleh pemerintah Belanda.

### **21 Juli 1947**

Belanda mulai melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik Indonesia.

### **21 Juli 1947**

Lapangan terbang Maguwo mendapatkan serangan udara, sekitar 4 buah pesawat terbang milik Belanda melancarkan pengeboman dan penembakan

### **1 Agustus 1947**

Dewan keamanan PBB memerintahkan kedua belah pihak menghentikan peperangan

### **4 Agustus 1947**

Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata bersama, dengan adanya pengumuman tersebut berakhirlah agresi militer yang

dilancarkan Belanda kepada Republik Indonesia.

### **19 September 1948**

K.H Masykur pergi ke Surakarta menemui K.H Mohammad Adnan. Lawatan ke kediaman K.H Mohammad Adnan tersebut untuk menyampaikan mandat yang diperintahkan Mohammad Hatta untuk mengirim misi haji R.I yang pertama kalinya ke tanah suci Mekkah, sekaligus menawari K.H Mohammad Adnan untuk memimpin misi haji tersebut

### **26 September 1948**

Rombongan misi haji R.I berangkat melalui Bandar Udara Maguwo

### **6 Oktober 1948**

Rombongan misi haji R.I sudah sampai Bandar Udara Farouk, Kairo, Mesir

### **10 Oktober 1948**

Rombongan misi haji R.I ditemani oleh H. Rosjidi melakukan kunjungan resmi kepada Kepala Negara Arab, Raja Ibn Saud di istana negaranya di Makkah

### **15 Oktober 1948**

Rombongan misi haji R.I mendirikan kemah-kemah di Mina, pendirian kemah-kemah tersebut berdampingan dengan kemah-kemah jajaran korps Diplomatik negara-negara Islam.

### **18 Oktober 1948**

Rombongan misi haji R.I menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Di Padang Arafah sinilah diadakan pertemuan dengan orang-orang Indonesia yang berjumlah kurang lebih 500 orang.

### **21 Oktober 1948**

Rombongan misi haji R.I berkunjung ke berbagai tempat, dan para tokoh agama dan tokoh politik serta orang-orang penting lainnya

### **23 Oktober 1948**

Rombongan misi haji mengadap lagi kepada Raja Ibn Saud untuk memohon diri kembali ke Indonesia

### **18 Desember 1948**

Jenderal Beel berpidato bahwa Belanda tidak terikat lagi pada persetujuan Renville dengan dalih bahwa Republik Indonesia dianggap tidak mematuhi isi perundingan tersebut

### **19 Desember 1948**

Belanda secara tiba-tiba melaksanakan agresi militer II untuk menyerbu daerah ibu kota Republik Indonesia

### **1 Maret 1949**

Bangsa Indonesia melakukan siasat serangan umum di Yogyakarta

### **23 Agustus 1949**

Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar di Deen Haag

### **27 Desember 1949**

Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat (RIS) bertempat di dua tempat, di Amsterdam dan Jakarta

### **21 Januari 1950**

Berdirinya Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI/PHI)

### **10 Juli 1950**

Awal mula pemberangkatan jamaah haji Indonesia yang diprakarsai sendiri oleh pemerintah RIS

**2 Oktober 1950**

Rombongan pertama dari jamaah haji Indonesia mulai kembali ke Tanah Air dengan menggunakan kapal Leartes

**1950**

Tragedi tertinggalnya 800 jamaah haji di Tanjung Priok

**2 November 1950**

Rombongan terakhir pemulangan jamaah haji Indonesia.